

STUDI BIAYA KONFLIK TANAH DAN SUMBER DAYA ALAM DARI PERSPEKTIF MASYARAKAT



STUDI BIAYA KONFLIK TANAH DAN SUMBER DAYA ALAM DARI PERSPEKTIF MASYARAKAT

R. Yando Zakaria
Rimawan Pradiptyo
Paramita Iswari
Putu Sanjiwacika Wibisana

Desember 2017

Disclaimer:

Laporan ini disiapkan melalui pendanaan UK aid oleh Pemerintah Kerajaan Inggris. Namun demikian pandangan yang diungkapkan tidak dapat ditafsirkan sebagai pendapat Pemerintah Kerajaan Inggris.

Laporan ini juga didukung oleh Yayasan David and Lucile Packard. Namun demikian pandangan yang diungkapkan tidak dapat ditafsirkan sebagai pendapat Yayasan David and Lucile Packard.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ix
Ringkasan Eksekutif	xiii
Pendahuluan	1
Metodologi Penelitian	5
Definisi Konflik	5
Karakteristik Konflik	7
Analisis Biaya Konflik	8
Metode Pengumpulan Data	15
Metoda Wawancara ZMET	16
Survei	17
Metode Analisis	19
Akuntansi Biaya Berdasarkan Harga Pasar (<i>Market Price Method</i>)	19
Model Pilihan (<i>Choice Model</i>)	20
Dinamika Pelaksanaan Penelitian	20
Wawancara ZMET	21
Pelaksanaan Survei	22

Profil Kasus yang Dikaji	25
Kasus Suku Anak Dalam 113, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.	25
Kasus Desa Trimulya, Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat	34
Kasus Desa Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur	40
Karakteristik Konflik yang Dikaji	46
Peta Mental Terkait Dampak Konflik	49
Biaya Konflik	63
Statistik Deskriptif	64
Pembelian Barang Konsumsi	65
Valuasi Ekonomi Dampak Konflik Terhadap Ketersediaan Air, Tanaman Obat dan Kerukunan Sosial	72
Penilaian Subjektif Kondisi Sosial	78
Aspek Pendidikan dan Kesehatan	78
Aspek Kriminalitas	82

Kondisi Lingkungan Hidup	84
Total Biaya Konflik Terhadap Rumah Tangga	88
Kondisi Sosial Sebagai Elemen Biaya Tambahan	
Akibat Konflik	92
Kemampuan Mengalihkan Biaya Ekonomi Konflik	94
Kesimpulan dan Rekomendasi	97
Kesimpulan	97
Rekomendasi	100
Daftar Pustaka	103
Lampiran	109
Lampiran A	109
Lampiran B	112
Lampiran C	117
Lampiran D	120

Daftar Tabel

Tabel 1.	Rincian Wilayah Desa Bungku, Obyek Tanah yang Disengketakan, Wadah perjuangan, dan Perkembangan Penyelesaian Sengketa Mutakhir	29
Tabel 2.	Identifikasi Korban Konflik Didasarkan Pada Persepsi Responden Survei	64
Tabel 3.	Total Konsumsi Primer - Sekunder dan Proporsi Konsumsi Primer Paska Konflik (Kini Beli) per KK per Bulan, per Wilayah	67
Tabel 4.	Total Konsumsi Primer – Sekunder dan Proporsi Konsumsi Primer Paska Konflik (Kini Beli) per KK per Bulan, per Kepemilikan Kebun Sawit	69
Tabel 5.	Total Konsumsi Primer, Sekunder dan Proporsi Konsumsi Primer Paska Konflik (Kini Beli) per KK per Bulan, per Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga	70
Tabel 6.	Income Gap Berdasarkan Pendidikan	71
Tabel 7.	Hasil Estimasi Model Mixlogit untuk Ekstraksi WTP	73

Tabel 8.	Hasil Estimasi WTP untuk setiap komponen, data agregat tiga wilayah	74
Tabel 9.	Estimasi Mixlogit per Wilayah Survei	75
Tabel 10.	Estimasi WTP per bulan per Wilayah Survei	76
Tabel 11.	Estimasi WTP per KK per Bulan per Kepemilikan Kebun Sawit	77
Tabel 12.	Estimasi WTP per KK per Bulan Menurut Gender	77
Tabel 13.	Penilaian Responden Terhadap Pendidikan dan Kesehatan di Wilayah Survei	80
Tabel 14.	Penilaian Responden Terhadap Pendidikan dan Kesehatan, Per Tingkat Pendidikan Responden	81
Tabel 15.	Penilaian Responden dalam Aspek Kesehatan, per Kepemilikan Sawit	82
Tabel 16.	Penilaian Responden dalam Kondisi Kriminalitas, per Wilayah Survei	83
Tabel 17.	Penilaian Responden dalam Kondisi Kriminalitas, per Tingkat Pendidikan Responden	83
Tabel 18.	Total Kerugian Langsung Akibat Kriminalitas/ Kehilangan Harta Benda, selama Periode Konflik	84
Tabel 19.	Penilaian Responden dalam Kondisi Lingkungan, per Wilayah Survei	85

Tabel 20.	Penilaian Responden dalam Kondisi Lingkungan, per Tingkat Pendidikan Responden	86
Tabel 21.	Penilaian Responden dalam Kondisi Lingkungan, per Kepemilikan Perkebunan Sawit	87
Tabel 22.	Penilaian Responden dalam Kondisi Lingkungan, per Gender	88
Tabel 23.	Total Biaya Konflik per Wilayah (per KK, per bulan)	89
Tabel 24.	Total Biaya Konflik per Kepemilikan Kebun Sawit (per KK, per bulan)	91
Tabel 25.	Total Biaya Konflik dan Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga (per KK, per bulan)	92

KATA PENGANTAR

Mencermati perihal konflik tanah dan sumber daya alam di Indonesia merupakan sebuah hal yang tiada habisnya. Catatan panjang sejarah konflik bertambah panjang seiring waktu. Berbagai upaya yang dilakukan untuk menangani konflik dibandingkan dengan munculnya konflik-konflik baru bagaikan deret hitung dengan deret ukur. Walaupun begitu seluruh pihak sepakat bahwa konflik menimbulkan biaya yang sangat besar dan harus segera ditangani karena merugikan seluruh pihak.

Seberapa besar biaya konflik ini terutama dari perspektif masyarakat? Pertanyaan besar inilah yang melandasi Conflict Resolution Unit (CRU) bekerja sama dengan KARSA (Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria) untuk melakukan studi, yang dimulai sekitar awal tahun 2017. Studi ini berusaha menjawab pertanyaan besar tersebut, dengan menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif.

Proses penelitian ini cukup panjang karena dilakukan sejak Juni sampai dengan Desember 2017. Diawali dengan upaya penyusunan riset desain yang kemudian dipresentasikan dalam *focus group discussion* (FGD) yang menghadirkan berbagai pihak yang relevan pada tanggal 14 Juni 2017 di

Jakarta. Dalam FGD ini diputuskan juga 3 (tiga) kasus yang dipilih untuk studi yakni kasus Suku Anak Dalam (SAD) 113 di Jambi, kasus di Desa Muara Tae, Kalimantan Timur dan kasus Desa Trimulya di Kalimantan Barat.

Paska riset desain yang utamanya menghadirkan metodologi penelitian yang disempurnakan, tahap berikutnya adalah melakukan wawancara ZMET di tiga lokasi. Hasil ZMET ini digunakan sebagai landasan untuk membangun peta mental terkait dampak konflik sekaligus untuk mengembangkan kuesioner dalam proses pengambilan data berikutnya melalui survei. Hasil survei kemudian dianalisis dan akhirnya penulisan laporan dilakukan. Untuk menyempurnakannya, laporan penelitian dipresentasikan di depan beberapa akademisi dengan berbagai latar belakang yang relevan untuk mendapatkan masukan untuk memfinalisasi laporan hasil studi.

Laporan hasil studi ini sendiri terdiri dari 6 (enam) bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan yang menggambarkan latar belakang studi. Dalam bagian ini dijelaskan pula pertanyaan yang melandasi studi serta maksud dari studi ini dilakukan. Bagian kedua menjelaskan perihal metodologi penelitian. Bagian ini menjelaskan mulai dari konsep “konflik” yang digunakan, metode pengumpulan data dan analisis sampai kepada dinamika yang terjadi dalam proses pelaksanaan penelitian.

Bagian berikutnya, bagian ketiga, menjelaskan profil tiga kasus yang menjadi kajian studi ini. Dalam bagian ini pula dijelaskan kesamaan karakteristik yang menjadi benang merah dari ketiga kasus di lokasi yang berbeda. Kemudian, dalam bagian berikutnya yaitu bagian keempat, dijelaskan peta mental terkait dampak konflik yang dihasilkan dari proses wawancara dan ZMET di setiap lokasi.

Hasil peta mental ini kemudian digunakan untuk menyusun kuesioner sehingga analisis biaya dapat dilakukan dan keseluruhannya disajikan pada bagian kelima. Pada akhirnya, bagian keenam adalah merupakan kesimpulan yang diperoleh dari studi sekaligus rekomendasi ke depan.

Studi ini tentu saja tidak akan dapat terlaksana tanpa kontribusi dari berbagai pihak. Kami selaku tim peneliti mengucapkan banyak terima kasih

pada Sujono, Risank Romadhoni, Arby Pujiantoro, Anisa Wulansari, Rinto, Bambang Isnaini dan Pauzan Pitra yang telah membantu kami menjadi asisten peneliti selama proses ZMET berlangsung sekaligus membantu pelaksanaan survei. Demikian pula Masrani dan Peter Asuy yang membantu memperdalam survei terkait data kebutuhan primer di Muara Tae. Tidak lupa terima kasih kami kepada Arrum Widayatsih, Wenni Prabaningrum dan Dwi Puji Pangesti di KARSA yang tanpa lelah berada di belakang kami memenuhi semua tuntutan kami. Tanpa kalian semua, maka studi ini tidak akan dapat terlaksana.

Terima kasih tak terhingga juga kami haturkan kepada Suraya A. Afiff, Ph.D (Universitas Indonesia), Dr. Satyawan Sunito (Institut Pertanian Bogor), Dr. Martin Daniel Siyaranamual (Universitas Padjadjaran), Dr. Soeryo Adiwibowo (Institut Pertanian Bogor) atas kontribusinya sebagai *reviewer* dalam studi ini. Input berharga yang kami peroleh memperkuat ruh dari studi ini.

Tidak lupa ucapan terima kasih diberikan kepada CRU-IBCSO dan Navitri Putri Guillaume selaku Direktur Program di institusi terkait atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada kami.

Kami berharap bahwa hasil studi ini bukan menjadi laporan penelitian yang kemudian disimpan di dalam laci. Namun, hasil penelitian ini dapat dijadikan amunisi berbagai pihak baik untuk penyempurnaan kebijakan maupun advokasi. Sehingga, konflik tanah dan sumber daya alam di Indonesia dapat diminimalisir dan seluruh pihak dapat hidup lebih tentram, damai dan sejahtera.

Yogyakarta, 15 Desember 2017

Tim Penulis

RINGKASAN EKSEKUTIF

Konflik terkait tanah dan sumber daya alam di Indonesia masih terus terjadi secara sistematis dan kronis. Konflik ini berdampak merugikan tidak saja bagi masyarakat, perusahaan, namun juga pemerintah, karena begitu besarnya biaya konflik. Berdasarkan hal tersebut, maka studi ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan dasar berapa biaya dan kerugian, baik nyata (*tangible*) maupun tidak (*intangible*), yang disebabkan oleh konflik tanah dan sumber daya alam, yang ditanggung oleh rumah tangga?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menggabungkan metode kualitatif dengan kuantitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan *Zaltman's Metaphore Elicitation Technique* (ZMET) dan wawancara mendalam untuk mengidentifikasi persepsi masyarakat terhadap konflik yang dialaminya termasuk memberikan pemetaan mengenai jenis-jenis biaya yang ditanggung masyarakat sehingga dapat dihasilkan *mental map* (peta mental) rumah tangga dalam menilai bagaimana dampak konflik terhadap kehidupan masyarakat. Sementara metoda kuantitatif untuk pengukuran biaya langsung dilakukan menggunakan metode akuntansi biaya berdasarkan harga pasar (*market price cost accounting*) dan model pilihan (*choice model*).

Berdasarkan upaya estimasi biaya ekonomi konflik, peneliti memperoleh nilai biaya konflik minimum (*minimum irreducible*).

Studi dilakukan pada 3 (tiga) kasus konflik yang dipilih dalam sebuah proses FGD (*Focus Group Discussion*) yang melibatkan berbagai pihak, dengan pertimbangan keberagaman kasus yaitu kasus Suku Anak Dalam 113 di Desa Bungku – Jambi, kasus Desa Muara Tae – Kalimantan Timur dan kasus Desa Trimulya – Kalimantan Barat. Di samping konteks yang berbeda pada tiap kasus, ketiga kasus ini memiliki kesamaan karakteristik yaitu konflik dengan perkebunan sawit sejak dekade 1990-an.

Dampak dari konflik, khususnya terkait dengan kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit, cenderung memiliki dampak yang lebih besar kepada rumah tangga relatif dibandingkan kehadiran Perusahaan (HPH) Hak Pengusahaan Hutan maupun perusahaan tambang. Intensitas konflik antara masyarakat dengan perusahaan HPH relatif lebih rendah daripada intensitas konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat. Kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit menciptakan konflik yang sangat intens dengan masyarakat.

Hilangnya sebagian besar fungsi hutan akibat perluasan operasi perusahaan perkebunan kelapa sawit berdampak pada perubahan drastis jenis komoditas konsumsi di tingkat rumah tangga. Sebagian besar barang konsumsi dapat diakses secara bebas (tidak perlu membayar) berubah drastis ketika perkebunan sawit meluas, karena sebagian besar barang kebutuhan harus dibeli.

Hasil kajian menunjukkan rata-rata sebanyak 36.79% dari nilai komoditas konsumsi masyarakat saat ini bisa didapatkan tanpa harus membeli di masa lalu. Kontraksi konsumsi ini tidak dapat dikatakan kecil, mengingat ketika krisis moneter di tahun 1998, kontraksi ekonomi yang terjadi hanyalah 15% (penurunan *Gross Domestic Product* (GDP)/kapita), namun dampaknya masih menghantui masyarakat dan pemerintah hingga sekarang.

Tiap keluarga responden di tiga lokasi survei harus menanggung total biaya sebesar Rp41.754.672 per tahun sebagai dampak dari konflik. Hasil analisis

juga menunjukkan bahwa justru rumah tangga yang memiliki kebun sawit atau mengikuti program inti-plasma, menanggung biaya konflik lebih besar dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak memiliki kebun sawit dan atau mengikuti program inti-plasma. Total biaya yang harus ditanggung kelompok pemilik sawit ini adalah sebesar Rp51.617.040 per tahun per keluarga, dibandingkan kelompok yang tidak memiliki sawit yang sebesar Rp32.294.844 per tahun per keluarga.

Berdasarkan temuan dari studi ini, jelas bahwa konflik yang berlangsung dan tidak selesai dalam waktu yang relatif lama telah memerangkap masyarakat ke dalam proses pemiskinan yang kian dalam, yang ditandai oleh melemahnya kemampuan masyarakat untuk menabung ataupun melakukan investasi, termasuk menyempitnya peluang untuk terjadinya mobilitas sosial karena terbatasnya peluang untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Dari sini diharapkan banyak pihak dapat digugah kesadarannya atas urgensi penyelesaian konflik tanah dan sumber daya alam di Indonesia.

1 PENDAHULUAN

Konflik terkait tanah dan sumber daya alam di Indonesia masih terus terjadi secara sistematis dan kronis (Hasil Inkuiri Nasional Komnas HAM sepanjang 2014-2015). Sepanjang tahun 2016, tercatat terjadi 450 konflik agraria (mayoritas adalah konflik di sektor perkebunan, properti, infrastruktur dan kehutanan) dengan luasan wilayah 1.265.027 Ha dan melibatkan 86.745 KK yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia (KPA, 2017). Hal ini menambah catatan panjang sejarah konflik agraria yang terjadi sepanjang 2004 - 2014 di Indonesia, dimana tercatat telah terjadi 1.391 kasus di wilayah seluas 5.711.396 Ha yang melibatkan 926.700 KK (Siaran Pers Komnas HAM, KPA dan WALHI, 2014).

Tidak hanya di Indonesia, konflik lahan yang terjadi di lima negara Asia, pada dasarnya memiliki pola yang hampir serupa (Yasmi, dkk., 2012). Benturan hak hukum positif oleh pemerintah dan perusahaan berhadapan dengan hak adat oleh masyarakat, kebijakan pembangunan ekonomi yang cenderung eksklusif bagi kelompok tertentu, dan buruknya koordinasi antar institusi yang mengurus penggunaan lahan yang ada, adalah tiga penyebab utama konflik lahan (Yasmi, dkk., 2012). Di Indonesia, konflik tanah dan sumber daya alam sebagian besar terjadi karena ketidakjelasan kepemilikan antara dua pihak yang berkepentingan (Rist dkk., 2009; Feintreine dkk., 2010; Yasmi dkk., 2012). Kajian oleh Feintreine dkk. (2010) dengan menggunakan data survei sosial ekonomi di Bungo, Jambi pada tahun 2007 – 2010 memperkuat

bukti bahwa konflik ini bersumber pada ketidakjelasan kepemilikan tanah. Ditambah lagi dengan lahirnya beragam konsesi terkait multi sektor pengurus sumber daya agraria, khususnya kehutanan, perkebunan, pertambangan yang diiringi dengan legitimasi oleh aparat keamanan (Polri dan TNI) yang hadir 'atas ijin negara' (Komnas HAM, 2016).

Konflik tanah dan sumber daya alam ini terjadi pada berbagai sektor, termasuk perkebunan sawit. Faktor lain penyebab konflik antara perusahaan sawit dengan masyarakat di Indonesia, adalah karena ketiadaan transparansi dari pihak perusahaan kepada para petani kecil dan pembagian hasil keuntungan yang tidak adil (Rist dkk, 2009). Rendahnya kualitas kepemimpinan dari pihak koperasi petani kecil turut meningkatkan kompleksitas konflik antara para petani yang tergabung di dalam koperasi dengan perusahaan kelapa sawit (Feintreine dkk., 2010).

Konflik yang terjadi ini berdampak merugikan tidak saja bagi masyarakat, perusahaan, namun juga pemerintah. Konflik tanah memiliki hubungan positif dengan tingkat pengangguran, ketimpangan, potensi bencana alam, dan perubahan sumber pendapatan (Barron dkk., 2004). Badan Pertanahan Nasional (BPN) sendiri menyatakan bahwa konflik agraria telah mengakibatkan 607.886 Ha lahan menjadi tidak produktif sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 146 Triliun. Sementara studi oleh Daemeter Consultant atas dukungan Conflict Resolution Unit (CRU) – Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) menyebutkan bahwa kerugian dari perusahaan akibat dari konflik, yang merupakan biaya yang tampak (*tangible cost*), adalah sebesar USD70.000-2.500.000. Estimasi tersebut diukur dari hilangnya laba usaha dan waktu staf yang dialihkan untuk mengatasi konflik. Biaya tersebut merupakan 51% - 88% dari biaya operasional perusahaan dan 102% - 177% dari biaya investasi per hektar per tahunnya.

Begitu besarnya biaya konflik bagi masyarakat, perusahaan maupun negara sehingga apabila konflik dapat diminimalisir atau dihindarkan maka manfaatnya sangat besar terutama oleh perusahaan dan petani dalam segi penggunaan lahan dan tenaga kerja. Upaya meminimalisasi konflik akan

dapat tercapai melalui kerjasama yang adil antara petani dan perusahaan sawit dengan dukungan pemerintah daerah (Risk dkk., 2009 dan Feintreine dkk., 2010) maupun pemerintah pusat (Larson dkk., 2013). Namun, upaya penyelesaian konflik tidaklah dapat dilakukan dengan cepat. Hal ini disebabkan karena terjadi peningkatan laju munculnya kasus-kasus konflik tersebut. Rekomendasi yang dikeluarkan lembaga-lembaga penanganan konflik seperti Komnas HAM, Dewan Kehutanan Nasional (DKN) maupun Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) cenderung diabaikan baik oleh pihak-pihak yang seharusnya melaksanakannya.

Setiap konflik menimbulkan dampak sosial kepada para pemangku kepentingan yaitu pihak pemerintah, masyarakat dan perusahaan yang terkait dengan konflik lahan tersebut. Studi mengenai biaya konflik lahan terhadap perusahaan perkebunan sawit telah dilakukan oleh Daemeter Consultant (2017). Namun demikian studi tentang dampak konflik lahan terhadap pemerintah dan rumah tangga, terutama yang tinggal di kawasan konflik, belum dilakukan. Kajian ini fokus pada estimasi biaya konflik lahan terhadap masyarakat, terutama rumah tangga yang tinggal di daerah wilayah konflik. Secara lebih detil studi ini bertujuan menjawab pertanyaan berikut :

- a. Bagaimana konsekuensi sosial-ekonomi dan lingkungan akibat konflik tanah dan sumber daya alam terhadap kehidupan rumah tangga?
- b. Apa implikasi dari konflik tanah dan sumber daya alam terhadap kehidupan rumah tangga?
- c. Berapa biaya dan kerugian, baik nyata (*tangible*) maupun tidak (*intangible*), yang disebabkan oleh konflik tanah dan sumber daya alam, yang ditanggung oleh rumah tangga?

Diharapkan dengan studi ini maka banyak pihak dapat digugah kesadarannya atas urgensinya penyelesaian konflik tanah dan sumber daya alam di Indonesia.

2 METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Definisi Konflik

Dalam kajian ini konflik (*conflict*) didefinisikan sebagai ‘hubungan antara dua pihak atau lebih, baik secara individu atau kelompok, yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan’.¹ Merujuk pada sumber dan definisi yang sama, Pasha & Sirait (2011) menggunakan istilah sengketa (*dispute*) tanpa ada penjelasan apapun tentang pilihan itu.² Dalam kenyataannya, kedua terma ini sering dipertukarkan penggunaannya untuk merujuk fenomena yang sama.

Pemerintah Indonesia, melalui peraturan Kepala BPN No. 3/2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, secara tegas membedakan penggunaan terma sengketa dan konflik. Peraturan Kepala BPN tersebut memilah kasus-kasus konflik/sengketa pertanahan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

-
- 1 Mitchell, C.R., 2001. Dikutip dari Simon Fisher, et.al., 2001. *The Structure of International Conflict*. Macmillan, London.
 - 2 Pasha, G. dan Sirait, M.T., 2011. *Analisa Gaya Bersengketa: Panduan Ringkas untuk Membantu Memilih Bentuk Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Alam*. The Samdhana Institute, Bogor.

1. Sengketa, yang dimaknai sebagai “perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis.”
2. Konflik yang diartikan sebagai “perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis.”
3. Perkara yang artinya adalah “perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan lembaga peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihannya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.”

Dalam kajian ini, meskipun terma yang digunakan adalah konflik, pengertian yang digunakan adalah mencakup ketiga bentuk kasus pertanahan di atas. Ketiga kategori ini diperlakukan sebagai tahapan perkembangan konflik yang menjadi studi kasus kajian ini. Perlu dicatat bahwa bentuk konflik yang terjadi di dunia sangat beragam, mulai dari konflik bersenjata antar negara, konflik antar etnis, konflik antar kelompok masyarakat, konflik akibat sengketa tanah dan sumber daya.

Kajian ini membatasi cakupan definisi konflik pada konflik tanah dan sumber daya alam. Namun berdasarkan pemilihan kasus, 3 (tiga) kasus yang diputuskan dalam FGD (*Focus Group Discussion*) untuk studi ini ternyata berkaitan erat dengan kelapa sawit. Meskipun begitu tidak dapat dipungkiri situasi di lapangan dipengaruhi oleh sektor lain, seperti tambang dan hutan. Sebagai konsekuensi pemilihan kasus ini, maka deskripsi kasus direkam, namun analisis dilakukan berdasarkan situasi hari ini. Hal ini berarti, walaupun analisis ditekankan pada perkebunan kelapa sawit, namun situasi hari ini dipengaruhi oleh berbagai sektor lain.

2.2. Karakteristik Konflik

Konflik dapat terjadi secara vertikal maupun horizontal atau terjadi gabungan antara keduanya. Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antar anggota suatu entitas, apakah entitas itu adalah pemerintah, perusahaan ataupun masyarakat.³ Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antar entitas pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Namun demikian setiap jenis konflik belum tentu memiliki pola yang sama antara satu konflik dengan konflik yang lain.

Kompleksitas konflik dan upaya untuk mengestimasi biaya ekonomi yang timbul akibat konflik, memerlukan pemahaman yang komprehensif tentang penyebab dan karakteristik dari setiap konflik itu sendiri. Pada kajian ini, konflik yang diteliti adalah konflik yang terjadi sebagai akibat dari adanya aktivitas bisnis yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

Karakteristik utama lain dari konflik adalah sifat konflik yang cenderung dinamis. Sejalan dengan perjalanan waktu, konflik yang semula sederhana dapat tereskalasi menjadi rumit. Namun di sisi lain, konflik yang berkepanjangan dapat reda secara drastis maupun gradual. Didasarkan pada karakteristik ini, idealnya dampak konflik dianalisis dengan analisis antar waktu (*intertemporal*) dengan memperhitungkan biaya akumulatif akibat konflik secara runtun waktu.

Namun demikian terdapat beberapa kompleksitas dalam melakukan kajian seperti ini. Pertama, sulit bagi peneliti untuk mengetahui apakah di suatu daerah akan terjadi konflik atau tidak dan seberapa besar eskalasi yang akan terjadi. Kedua, walaupun konflik telah terjadi, tidak mudah untuk mengetahui kapan konflik akan berhenti. Konflik seringkali terjadi berkepanjangan dan bahkan mencapai belasan hingga puluhan tahun. Upaya menghitung biaya akumulasi konflik setiap tahun, misalnya, untuk durasi konflik yang panjang, tentu membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit.

3 Misalnya pemerintah dengan masyarakat, atau pemerintah dengan perusahaan atau perusahaan dengan masyarakat.

Estimasi dampak konflik secara *intertemporal* merupakan analisis yang ideal untuk dilakukan, namun hal ini mengandung kompleksitas yang tinggi dengan kebutuhan sumber daya yang besar. Keterbatasan sumber daya dan ketersediaan data menyebabkan analisis penelitian ini dilakukan dengan metode analisis komparatif statik. Dampak konflik tetap dirasakan akibatnya meskipun konflik telah berakhir beberapa waktu lalu. Di area yang dipilih sebagai wilayah sampel penelitian ini, konflik masih terjadi. Keterbatasan lain dari penelitian ini adalah analisis dilakukan meskipun konflik masih belum selesai, sehingga analisis dampak yang dilakukan menggunakan asumsi bahwa konflik seolah-olah telah selesai saat ini.

2.3. Analisis Biaya Konflik

Dampak konflik terhadap rumah tangga pada dasarnya dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan pendapatan (*income approach*) maupun pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*). Rumah tangga yang memiliki tingkat konsumsi tinggi, pada dasarnya adalah rumah tangga yang memiliki pendapatan yang tinggi pula, jika diasumsikan setiap rumah tangga berperilaku rasional.

Namun demikian, pendekatan pendapatan rumah tangga lebih sulit untuk dilakukan mengingat diperlukan monitoring perubahan pendapatan sejak pra konflik hingga saat ini. Hal ini tentu tidak mungkin dilakukan mengingat kajian baru dilakukan saat ini tanpa ada data pra konflik maupun data selama konflik berlangsung. Terkait dengan upaya mengukur dampak konflik terhadap rumah tangga, maka penelitian ini menggunakan pendekatan pengeluaran rumah tangga.

Analisis biaya (*cost analysis*) adalah bagian dari analisis evaluasi ekonomi (*economic evaluation*) untuk mengetahui manfaat dan biaya dari suatu peristiwa/kegiatan/program. Analisis manfaat dan biaya (*benefits-costs analysis*) maupun analisis *cost-effectiveness* atau *cost-utility* hanya dapat dilakukan ketika elemen biaya (*cost*) diketahui dengan baik. Ketika kegiatan

dianggap berdampak negatif (misalnya kejahatan, konflik atau perang), maka setiap upaya yang mampu menurunkan intensitas maupun mencegah terjadinya peristiwa tersebut dapat dianggap sebagai ukuran efektivitas/manfaat.

Upaya mengestimasi biaya konflik tanah dan sumber daya alam terkait dengan keberadaan perkebunan kelapa sawit, harus didasarkan pada pemahaman mendalam terkait dengan karakteristik konflik tersebut. Karakteristik konflik yang cenderung dinamis dan berkembang sejalan dengan waktu, memerlukan identifikasi elemen biaya konflik yang juga mempertimbangkan aspek waktu (*intertemporal analysis*).

Biaya konflik pada dasarnya dapat dianalisis melalui tiga pendekatan: a) analisis finansial terhadap konflik; b) analisis fiskal terhadap konflik, dan c) analisis ekonomi terhadap konflik. Analisis finansial terhadap konflik fokus pada biaya dan manfaat konflik terhadap perusahaan, sementara analisis fiskal terhadap konflik fokus pada manfaat dan biaya konflik yang terkait dengan aspek fiskal bagi pemerintah. Analisis ekonomi terhadap konflik memiliki cakupan yang lebih luas, tidak saja terhadap perusahaan, dan pemerintah, namun juga kepada rumah tangga/masyarakat.

Analisis biaya ekonomi konflik mencakup tidak saja biaya langsung (*direct cost*) namun juga biaya tidak langsung (*indirect cost*) yang disebabkan oleh konflik. Cakupan analisis biaya ekonomi konflik, tidak saja mencakup biaya privat namun juga biaya eksternalitas (biaya sosial) yang diakibatkan oleh konflik. Mengingat karakteristik utama konflik bersifat dinamis dalam kurun waktu yang seringkali panjang, maka analisis biaya ekonomi terhadap konflik idealnya dilakukan antar waktu (*intertemporal*) baik di awal konflik, selama konflik hingga paska konflik.

Di setiap tahap konflik, baik di awal hingga di akhir konflik, perlu dilakukan estimasi biaya privat dan biaya eksternalitas konflik. Konsekuensi dari pendekatan ini adalah perubahan intensitas konflik berdampak pada peningkatan dan penurunan biaya konflik pada kurun waktu tertentu, namun dari sisi akumulasi biaya akan terus terjadi peningkatan hingga dampak konflik berakhir. Didasarkan pada pendekatan ini, maka analisis

biaya konflik idealnya merupakan akumulasi biaya ekonomi dari sejak awal konflik tercipta hingga paska konflik berakhir, mengingat konflik seringkali menciptakan dampak ikutan (*repercussion*) yang cukup panjang.

Untuk mengukur dampak konflik pertanahan dan perkebunan kelapa sawit secara komprehensif, tidaklah berlebihan jika digunakan *agrarian questions* untuk menentukan elemen biaya konflik di setiap tahap konflik sebagai berikut:

- a. Biaya pra konflik pertanahan; biaya ini muncul pada umumnya akibat transformasi status kepemilikan tanah masyarakat oleh pemerintah. Jauh sebelum Indonesia merdeka, masyarakat di luar Jawa pada umumnya, mendasarkan kepemilikan tanah pada warisan dan pembagian kepemilikan (*property right*) sesuai hukum adat. Pembagian hak milik tanah diatur ketat di hukum adat namun demikian mengingat hukum adat tidak berdasarkan dokumen tertulis, maka hukum adat pada dasarnya adalah konvensi yang diterima umum dan berlaku terbatas pada suatu kelompok masyarakat tertentu. Pada masa itu, masyarakat memiliki akses optimal terhadap hutan, dan masyarakat di luar Jawa pada umumnya melakukan ladang berpindah karena faktor agroklimat yang berbeda dari di Jawa. Fakta menunjukkan bahwa konflik tanah di Indonesia bersumber dari konflik antara hukum positif dengan hukum adat. Hukum adat didasarkan pada konvensi antar anggota masyarakat adat, sementara hukum positif didasarkan pada bukti dokumen tertulis. *Property right* yang diperoleh dari dan diakui oleh hukum adat, seringkali tidak diakui oleh hukum konvensional karena tidak adanya bukti kepemilikan *property right* dalam bentuk dokumen resmi pemerintah. Ketika *property right* oleh masyarakat adat ternyata tidak diakui oleh pemerintah, maka di saat itulah, rumah tangga menanggung biaya implisit akibat hilangnya hak kepemilikan rumah tangga atas tanah.
- b. Biaya di tahap awal konflik; biaya ini pada umumnya muncul ketika perusahaan mendapatkan hak mengelola dari pelepasan kawasan hutan dan mereka mulai mengimplementasikan pengelolaan hutan menjadi kebun sawit. Pada titik ini terjadi konflik vertikal antara perusahaan dengan masyarakat. Perusahaan yang mendapat

dukungan dari pemerintah dan bahkan dukungan aparat penegak hukum, seringkali harus berhadapan dengan masyarakat yang melakukan demonstrasi karena tidak puas dengan kehadiran perkebunan sawit. Ketidakpuasan masyarakat dapat disebabkan oleh berbagai sebab: a) hilangnya pengakuan hak atas tanah akibat penerapan hukum positif; b) sengketa atas tanah antara perusahaan dan masyarakat; c) penurunan mata pencarian dan kualitas lingkungan akibat operasionalisasi perkebunan sawit; hingga d) sistem bagi hasil di program inti-plasma yang lebih menguntungkan perusahaan dan tidak sesuai dengan janji yang diberikan; serta faktor lain yang memantik sengketa/konflik antara perusahaan dan masyarakat.

- c. Biaya eskalasi konflik; tidak dipungkiri bahwa konflik seringkali tereskalasi oleh berbagai sebab. Biaya eskalasi konflik muncul ketika konflik terjadi semakin dalam atau bahkan terjadi perluasan wilayah konflik atau bahkan keduanya. Eskalasi biaya konflik akan mencapai puncak ketika tidak saja konflik yang terjadi bersifat vertikal, namun juga berkembang menjadi konflik horizontal.⁴ Ketika konflik tereskalasi sehingga menjadi konflik vertikal sekaligus horizontal, maka kompleksitas konflik meningkat dibandingkan ketika konflik masih bersifat vertikal saja atau horizontal saja. Dampak ekonomi konflik berbanding lurus dengan tingkat kompleksitas yang terjadi pada konflik.
- d. Biaya penyelesaian konflik; biaya penyelesaian konflik muncul sebagai upaya untuk mengakhiri konflik yang terjadi. Beberapa elemen biaya ini muncul sebagai konsekuensi dari kegiatan mediasi, konsultasi, dan sosialisasi terkait dengan upaya penyelesaian konflik.
- e. Biaya paska konflik; biaya paska konflik adalah berbagai biaya yang harus ditanggung para pihak untuk melakukan pemulihan agar kondisi yang ada dapat kembali seperti ketika masa pra konflik.

4 Misalnya konflik yang semula bersifat vertikal (horizontal) misalnya antara pemerintah dengan masyarakat (antar kelompok di masyarakat) berkembang menjadi konflik vertikal dan horizontal (konflik antara pemerintah dan masyarakat serta konflik antar kelompok masyarakat), dapat dipastikan konflik tereskalasi menjadi semakin kompleks.

Pada saat yang bersamaan, biaya privat dan biaya eksternalitas ditanggung oleh masing-masing pemangku kepentingan yang terlibat dalam konflik. Bahkan pada kasus biaya eksternalitas, seringkali biaya konflik tersebut juga ditanggung oleh para pihak yang tidak terkait langsung dengan konflik. Ketika konflik berdampak negatif terhadap lingkungan hidup, misalnya, maka perlu dilakukan estimasi biaya langsung maupun tidak langsung dari perubahan lingkungan akibat konflik.

Perlu dicatat bahwa jasa lingkungan hidup (*ecosystem services*) pada dasarnya memiliki cakupan yang luas antara lain:⁵ a) penyediaan bahan pangan, air bersih, bahan baku bangunan dan energi, dan sumber obat-obatan; b) pengaturan iklim lokal dan kualitas udara, penyimpanan karbon, kemampuan meminimalisasi perubahan ekstrem di alam dan pengolahan alami air limbah, c) penyediaan habitat bagi spesies dan menjaga keanekaragaman genetik, dan d) jasa kebudayaan mencakup rekreasi, turisme, inspirasi budaya, seni dan desain, serta pengalaman spiritual. Perlu dicatat bahwa tidak semua dampak konflik terhadap lingkungan tersebut diukur di penelitian ini, meskipun berbagai faktor biaya tersebut diakui keberadaannya.

Fokus kajian ini adalah mengukur biaya konflik terhadap rumah tangga, sehingga relevansi dampak lingkungan yang terjadi akibat konflik perlu dipertimbangkan dari perspektif rumah tangga. Keterbatasan sumber daya dalam melakukan riset ini mendorong peneliti untuk menggunakan pendekatan biaya minimum konflik (*minimum irreducible costs of conflict*). Pendekatan ini mengakui keberadaan berbagai jenis dampak lingkungan tersebut, namun hanya mengestimasi biaya yang dirasakan oleh rumah tangga didasarkan pada wawancara dengan metoda ZMET dan FGD. Pendekatan ini memastikan bahwa biaya konflik yang ditanggung rumah tangga tidak mungkin lebih rendah dari apa yang diestimasi peneliti. Konsekuensi dari pendekatan ini adalah jika semua komponen dampak dihitung dengan seksama, dipastikan biaya yang ditanggung rumah tangga lebih besar daripada biaya yang dihitung oleh peneliti di studi ini.

5 Lihat <http://www.teebweb.org/resources/ecosystem-services/> diakses pada 23 Februari 2018.

Apabila kajian hanya fokus pada analisis biaya ekonomi konflik dari perspektif rumah tangga, maka kelima elemen biaya di atas harus dihitung untuk mengestimasi biaya langsung dan tidak langsung akibat konflik yang ditanggung oleh rumah tangga/masyarakat. Akumulasi biaya konflik dikumpulkan dari estimasi biaya konflik di setiap tahap. Dalam perspektif analisis evaluasi dampak (*impact evaluation*), idealnya dampak konflik diestimasi dengan membandingkan keadaan sebelum dan sesudah (*before and after approach*) terjadinya konflik di daerah yang mengalami dan tidak mengalami (*with and without*) konflik. Untuk melakukan kajian seperti ini diperlukan baseline data dan data selama konflik hingga paska konflik, baik di wilayah konflik (*treatment area*) maupun di wilayah yang setara namun tidak terjadi konflik (*control area*).

Tentu saja estimasi detil biaya konflik seperti ini tidak mudah untuk dilakukan. Hal tersebut dikarenakan, pertama, tidak tersedianya data baseline di tingkat rumah tangga di kawasan konflik maupun di kawasan pembanding (*control area*). Kedua, tidak mudah menentukan wilayah pembanding yang memiliki karakteristik yang mirip dengan kawasan konflik namun tidak mengalami konflik. Ketiga, keterbatasan sumber daya yang tidak memungkinkan peneliti melakukan metoda pengumpulan data seperti mekanisme yang dijelaskan di atas.

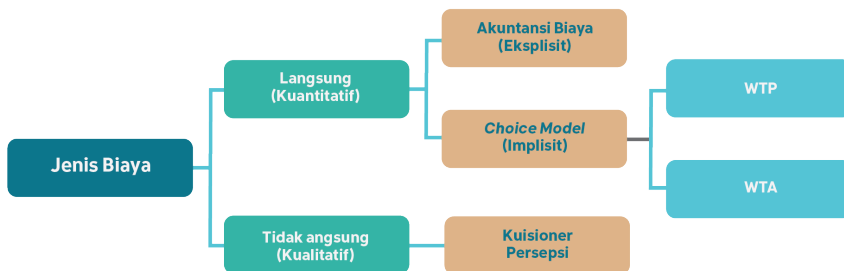
Pendekatan estimasi nilai biaya konflik minimum (*minimum irreducible approach*) memungkinkan peneliti melakukan estimasi terhadap tingkat biaya ekonomi minimum akibat konflik, meskipun fakta menunjukkan biaya ekonomi konflik sesungguhnya lebih besar daripada biaya ekonomi minimum tersebut. Estimasi ini menghasilkan biaya ekonomi konflik yang konservatif, artinya nilai biaya konflik tidak mungkin lebih rendah dari nilai estimasi, namun pasti lebih besar daripada nilai estimasi. Estimasi biaya yang dilakukan pada penelitian ini terbatas pada elemen sebagai berikut:

- a. Estimasi tingkat konsumsi primer dan sekunder yang saat ini dibeli namun di masa lalu dapat diakses secara gratis oleh rumah tangga bergantung pada usaha dari anggota rumah tangga, dengan pendekatan akuntansi biaya;
- b. Estimasi valuasi ekonomi dari rumah tangga terhadap tiga sumber

daya yaitu kualitas air, ketersediaan tanaman obat-obatan dan kualitas modal sosial, dengan pendekatan *choice model*.

- c. Estimasi dampak perubahan sosial, menyangkut akses dan biaya kesehatan, pendidikan, kondisi kriminalitas dan kondisi lingkungan hidup. Berbeda dengan poin a) dan b), elemen biaya pada poin c) ini bersifat kualitatif dan upaya untuk mengkuantifikasi perubahan sosial bukanlah cakupan dari penelitian ini.

Metode kuantitatif dalam pengukuran biaya langsung yang dilakukan kemudian dalam studi ini adalah metode akuntansi biaya (*cost accounting*) dan *choice model*. Akuntansi biaya merupakan salah satu metode estimasi biaya yang sederhana (Abadie, A. dan Gardeazabal, J.,2010), dimana biaya eksplisit diestimasi dari data aktual. Sementara itu, biaya implisit diukur menggunakan konsep biaya oportunitas (*opportunity cost*), contohnya dari rusaknya atau hilangnya faktor produksi seperti barang modal, atau hilangnya akses terhadap suatu barang.⁶ Estimasi biaya oportunitas dilakukan dengan menggunakan metoda *choice model*. Selain biaya kuantitatif, penelitian ini juga mengukur biaya kualitatif melalui kuesioner persepsi. Hasil dari kuesioner ini akan diulas pada bab 5.



Gambar 1. Konsep Biaya dalam Studi Pengukuran Biaya Konflik

⁶ Konsep *opportunity cost* merupakan konsep sentral dalam analisis biaya dalam perspektif ilmu ekonomi (Brand and Price, 2000). Secara teknis penerapan konsep ini akan menghasilkan skala biaya dalam bentuk *willingness to pay* (WTP) dan atau *willingness to accept* (WTA). Contoh penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode serupa untuk mengukur biaya konflik dari partisipasi negara dalam peperangan dilakukan oleh Davis dkk. (2006) dan Arunatilake dkk. (2001).

Kesenjangan elemen biaya konflik yang idealnya diestimasi dengan elemen biaya yang dapat diestimasi merupakan keterbatasan dari penelitian ini. Diharapkan di masa datang dapat dilakukan penelitian yang jauh lebih komprehensif terkait dengan biaya sosial konflik tanah dan sumber daya alam. Diperlukan kajian dengan cakupan jumlah daerah konflik yang lebih banyak di berbagai pulau besar di Indonesia sehingga diperoleh estimasi biaya konflik yang lebih komprehensif.

2.4. Metode Pengumpulan Data

Implikasi kerugian yang dapat muncul dari adanya konflik dapat diklasifikasikan pada dimensi sebagai berikut:

- a. Dimensi Topik: Sosial-Ekonomi dan Lingkungan
- b. Dimensi Harga: *Market dan Non-Market* (Martinez-Giralt, 1999)
- c. Dimensi Akuntansi: *Tangible dan Intangible*

Ketiga dimensi tersebut memerlukan pendekatan yang berbeda-beda dalam proses estimasinya. Bentuk-bentuk kerugian dan biaya yang muncul perlu diklasifikasikan berdasarkan dimensi-dimensi tersebut, untuk menentukan metode estimasi dan *variable proxy* yang akan digunakan. Fokus kajian ini terletak pada estimasi biaya sosial-ekonomi dan lingkungan, yang terbagi ke dalam dua jenis, yakni biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung merupakan biaya yang dapat diukur dengan pendekatan kuantitatif, baik secara eksplisit maupun implisit.

Biaya tidak langsung merupakan dampak yang tidak dapat dikuantifikasi dengan nilai moneter, contohnya persepsi masyarakat. Kombinasi dari beberapa jenis dimensi ini merujuk pada catatan dari Davis dan Franks (2014), dimana mereka melakukan kajian biaya konflik antara masyarakat dan perusahaan di industri ekstraktif di Peru dengan menggunakan metoda akuntansi biaya. Estimasi biaya konflik dari perspektif perusahaan lebih mudah dilakukan mengingat perusahaan memiliki laporan keuangan. Namun demikian jika hanya akuntansi biaya saja yang digunakan, peneliti

tidak dapat mengetahui struktur dan intensitas konflik beserta peran setiap pelaku di dalam konflik. Kompleksitas ini dapat ditanggulangi dengan cara melakukan studi literatur, dan wawancara mendalam untuk memahami pola dan karakteristik konflik, sebelum kemudian peneliti melakukan survei untuk mengukur biaya konflik.

Sejalan dengan rekomendasi oleh Davis dan Franks (2014), penelitian ini menggunakan pendekatan triangulasi dengan menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dalam empat tahap:

1. Studi pustaka terkait dengan konflik,
2. Wawancara mendalam dengan metoda *Zaltman's Metaphore Elicitation Technique* (ZMET);
3. Didasarkan pada kajian pustaka dan hasil ZMET disusun instrumen survei dan diikuti dengan survei di lapangan;
4. Analisis terhadap hasil survei.

2.4.1. Metoda Wawancara ZMET

Metode kualitatif dengan wawancara ZMET digunakan untuk memahami kasus konflik tanah dan sumber daya alam terhadap rumah tangga. Wawancara ZMET dilakukan untuk mengidentifikasi persepsi masyarakat terhadap konflik yang dialaminya termasuk memberikan pemetaan mengenai jenis-jenis biaya yang ditanggung masyarakat (lihat Lampiran A untuk deskripsi lebih lanjut tentang ZMET). Wawancara ZMET bertujuan untuk mengetahui peta mental rumah tangga dalam menilai bagaimana dampak konflik terhadap kehidupan mereka. Hasil dari pelaksanaan metode ini diharapkan dapat mencapai tujuan studi pertama dan kedua.

Informan yang diwawancarai dengan metode ZMET dipilih agar dapat mewakili masyarakat yang terkena dampak dari konflik tersebut. Jumlah informan dalam wawancara ZMET adalah 8 orang per wilayah. Mengingat wawancara ZMET adalah metoda kualitatif, maka bukan jumlah responden yang penting namun sejauh mana informasi yang digali dari wawancara

mengalami saturasi. Studi ini mewawancara 8 orang per wilayah dengan metoda ZMET dengan kriteria seperti sebagai berikut:

- Kepala wilayah administratif (Kepala Desa atau lainnya)
- Tokoh Adat di desa maupun wilayah setempat yang memiliki pengetahuan terkait dengan konflik tersebut.
- Tokoh Agama di desa maupun wilayah setempat yang memiliki pengetahuan terkait dengan konflik tersebut.
- Perempuan yang memiliki pengetahuan terkait konflik tersebut, baik menjadi korban maupun pelaku.
- Pemuda yang memiliki pengetahuan terkait konflik tersebut, baik menjadi korban maupun pelaku.
- Penduduk atau anggota masyarakat di daerah tersebut yang bekerja pada sektor yang berkaitan langsung dengan konflik tanah dan sumber daya alam, misalnya petani.
- Penduduk atau anggota masyarakat di daerah tersebut yang bekerja pada sektor yang tidak berkaitan secara langsung dengan konflik tanah dan sumber daya alam. Misalnya pekerja sektor jasa atau pedagang.

Hasil yang diharapkan dari wawancara ZMET adalah konvensi peta mental rumah tangga di daerah-daerah konflik yang menjadi sampel penelitian. Hasil ZMET menjawab aspek kualitatif dari pertanyaan penelitian pertama dan kedua, yakni konsekuensi sosial-ekonomi dan lingkungan akibat konflik tanah dan sumber daya alam terhadap kehidupan rumah tangga dan implikasinya. Berdasarkan peta mental tersebut disusunlah instrumen survei untuk mengukur dampak konflik terhadap kehidupan ekonomi rumah tangga.

2.4.2. Survei

Berdasarkan pada hasil wawancara ZMET, kuesioner disusun untuk kemudian diikuti dengan survei di ketiga wilayah konflik. Hasil interview ZMET digunakan untuk mengeksplorasi berbagai aspek terkait dengan dampak konflik terhadap rumah tangga. Hasil wawancara ZMET memberikan

informasi yang sangat berharga kepada peneliti untuk menyusun kuesioner yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Wawancara melibatkan 40 (empat puluh) rumah tangga di setiap wilayah konflik. Survei dilakukan terhadap suami dan istri di dalam rumah tangga sampel untuk mengakomodasi perbedaan pengetahuan terhadap jenis konsumsi yang seringkali terdapat bias gender. Konsumsi primer yang cenderung rutin lebih banyak dipahami oleh istri, sementara konsumsi sekunder cenderung lebih dipahami oleh suami. Pada kasus orang tua tunggal maka semua pertanyaan kuesioner ditanyakan kepada orang tua tunggal tersebut.

Untuk memperoleh data primer yang mendukung metode ini, peneliti melakukan survei dalam bentuk kuesioner terhadap masyarakat yang berada di kawasan konflik. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *stratified random sampling*. Dari masing-masing desa yang mengalami kasus tersebut, diambil 40 sampel (atau 5 kali jumlah informan dalam metode ZMET) yang sekiranya mampu menjawab aspek-aspek berikut:

- a. Nilai uang dari kehilangan harta benda yang terjadi sebagai akibat konflik
- b. Kondisi aspek kehidupan dalam rumah tangga pra dan paska konflik, yang meliputi:
 - Pendapatan rumah tangga
 - Kegiatan utama (profesi) dari anggota rumah tangga
 - Pola konsumsi komoditas dan tabungan rumah tangga
 - Komoditas yang dahulu dapat dikonsumsi secara cuma-cuma
 - Akses terhadap infrastruktur
 - Kesehatan keluarga
 - Pendidikan anak
 - Aspek kehidupan sosial, keamanan, kepastian masa depan anggota rumah tangga
- c. Variabel *proxy* untuk pengukuran biaya non-pasar (*Choice model*)

Kuesioner ini dikembangkan dari hasil wawancara ZMET, dengan mengakomodasi faktor-faktor temuan yang ada. Klasifikasi biaya-biaya eksplisit dan implisit yang muncul dari peta mental kemudian menjadi bagian dari pertanyaan yang ditanyakan pada kuesioner ini. Faktor-faktor lain yang teridentifikasi selama wawancara ZMET juga dikuantifikasi melalui pertanyaan di kuesioner.

2.5. Metode Analisis

2.5.1. Akuntansi Biaya Berdasarkan Harga Pasar (*Market Price Method*)

Biaya konflik diestimasi dengan pendekatan harga pasar untuk mengakomodasi temuan wawancara ZMET dimana warga merasa kehilangan akses untuk sebagian jenis komoditas yang dulunya mereka konsumsi tanpa harus membeli. Metode harga pasar bertujuan untuk mengukur barang dan jasa ekosistem dengan menggunakan harga pasar. Beberapa komoditas dan jasa, seperti ikan dan hasil hutan diperdagangkan di pasar, sehingga komoditas ini memiliki harga pasar (Garrod dan Willis, 1992).

Akuntansi biaya adalah pendekatan harga berbasis pasar yang paling sederhana dalam valuasi ekonomi. Jumlah sumber daya atau layanan yang dinilai dikalikan dengan harga pasar saat ini untuk memberikan nilai keseluruhan. Dalam riset ini, metode akuntansi biaya digunakan untuk mengestimasi konsumsi responden secara keseluruhan, beserta nilai konsumsi dari barang dan jasa yang tidak harus dibeli di masa lampau atau sebelum konflik. Kehilangan akses terhadap sebagian komoditas membuat penduduk di wilayah konflik harus mendapatkan barang tersebut dengan mengorbankan sejumlah uang (membeli), dimana sebelumnya komoditas tersebut diperoleh secara cuma-cuma.

Kuesioner survei menanyakan konsumsi primer dan sekunder dari 100 jenis komoditas primer yang dikonsumsi oleh responden beserta indikator

apakah komoditas tersebut bisa didapatkan oleh responden secara cuma-cuma di masa lalu. Total nilai konsumsi kemudian dibandingkan dengan jumlah konsumsi dari komoditas yang tidak harus dibeli di masa lampau. Nilai konsumsi yang muncul didasarkan pada harga pasar saat ini.

2.5.2. Model Pilihan (*Choice Model*)

Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang lebih luas seperti bagaimana populasi mempersepsikan biaya, McFadden (1974) mengembangkan model pilihan diskrit (*discrete choice modelling*), yang didasarkan pada teori utilitas random (*random utility theory*). Dalam konteks riset ini, kita melakukan valuasi dari keinginan membayar sampel terhadap suatu atribut, dalam hal ini ialah kondisi dari tiga hal, yakni air, tanaman obat dan kerukunan sosial.

Secara sederhana, pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan penilaian subjek terhadap suatu barang tanpa harus bertanya secara langsung mengenai nilai barang tersebut. Peneliti membuat berbagai skenario ketersediaan ketiga jenis kondisi di atas, beserta harga yang harus dibayarkan responden untuk setiap kombinasi tersebut. Hasil dari metode ini adalah biaya implisit yang dinotasikan dengan istilah *willingness to pay* (WTP) dan atau *willingness to accept* (WTA).

2.6. Dinamika Pelaksanaan Penelitian

Studi ini fokus di tiga wilayah studi kasus yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Jambi. Sebagaimana telah disinggung pada bagian metodologi penelitian, ada 2 (dua) metode pengumpulan data yang diterapkan di lapangan. Pertama, wawancara ZMET untuk mendapatkan konvensi peta mental rumah tangga di wilayah penelitian. Kedua, pengambilan data primer (survei) dengan menggunakan kuesioner.

Wawancara ZMET di Jambi dan Kalimantan Timur dilakukan oleh 1 (satu) orang peneliti senior dibantu oleh 2 (dua) orang asisten lapangan. Sedangkan di Kalimantan Barat dilakukan oleh 1 (satu) peneliti senior dibantu oleh 3 (tiga) orang asisten lapangan, dengan pertimbangan medan lapangan yang cukup berat. Dalam proses ZMET, tim peneliti berbagi tugas, peneliti senior mewawancarai informan, asisten peneliti-1 merekam hasil wawancara secara tertulis, dan asisten peneliti-2 merekam wawancara dengan alat audio visual.

2.6.1. Wawancara ZMET

Proses wawancara ZMET di tiga wilayah diawali dengan *briefing* informan untuk menjelaskan tentang bagaimana proses ZMET dilakukan, sekaligus membuat jadwal wawancara. Proses *briefing* berjalan dengan lancar di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Calon informan yang hadir dapat menerima metode wawancara ZMET yang ditawarkan oleh peneliti. Sementara di Jambi, calon informan menolak untuk menggunakan metoda ZMET.

Pengalaman yang buruk terkait dengan konflik yang berkepanjangan membuat para informan di Jambi tidak sabar memilih gambar, sebagai rangkaian dari proses ZMET. Para informan di Jambi ingin langsung mengutarakan perasaan yang mereka alami sesegera mungkin kepada peneliti. Namun demikian, informan di Jambi bersedia mengikuti FGD yang diselenggarakan peneliti sebagai pengganti ZMET.

Di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat, peneliti mewawancarai 8 informan sebagaimana kriteria yang telah ditetapkan dalam metode penelitian. Terjadi penggantian beberapa informan di Kalimantan Timur mengingat di hari yang dijadwalkan ternyata beberapa informan harus pergi ke luar kota. Di Jambi, dilakukan 3 (tiga) kali FGD dan 8 (delapan) wawancara individual secara mendalam; dan pengamatan lokasi kejadian dan tempat pengungsian.

Secara keseluruhan, kegiatan FGD dan wawancara ini melibatkan 18 orang. Dalam FGD maupun wawancara individual mendalam diperoleh informasi tentang kronologis kasus; bentuk-bentuk interaksi antara tanah/hutan dan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat; serta bentuk-bentuk dampak yang dirasakan masyarakat akibat munculnya konflik yang dimaksud.

2.6.2. Pelaksanaan Survei

Survei di ketiga wilayah studi dilakukan sebagai kelanjutan dari informasi yang diperoleh melalui metode ZMET dan FGD. Survei dilakukan oleh para enumerator atau *surveyor* yang sudah dilatih oleh tim peneliti di Yogyakarta. Pengambilan data primer dilakukan kepada 40 (empat puluh) rumah tangga atau kepala keluarga (KK) di tiap wilayah konflik dengan menggunakan kuesioner. Ada 5 (lima) elemen kuesioner yang disiapkan dalam kuesioner, yaitu identitas, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, aspek sosial kemasyarakatan, dan *choice model*.

Langkah awal yang dilakukan enumerator di lapangan adalah mencari data KK di lokasi konflik. Populasi KK kemudian diseleksi sebagaimana kriteria yang sudah disepakati dalam desain penelitian, yaitu mengeluarkan calon responden yang kepala keluarganya berusia kurang dari 34 tahun (di tahun 2000 belum berusia 17 tahun), mengeluarkan calon responden yang bukan korban langsung maupun tidak langsung, dan mengeluarkan calon responden yang pernah menjadi informan pada saat ZMET. Dengan menggunakan metode *stratified random sampling*, data KK yang sudah diseleksi kemudian dibagi dengan jumlah responden yang dibutuhkan, yaitu 40. Hasil bagi menjadi angka yang digunakan untuk menentukan kelipatan urutan calon responden yang dipilih. Total responden yang dipilih berjumlah 40 orang responden utama dan 20 responden cadangan, pada tiap-tiap wilayah studi.

Dalam proses pemilihan responden di Desa Muara Tae yang terletak di Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan

Timur, terseleksi sebanyak 177 KK dari jumlah KK semula sebanyak 318.⁷ Sedangkan pada proses pemilihan responden di Dusun Johor Baru yang terletak di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, terseleksi sebanyak 123 KK dari jumlah KK semula sebanyak 227 KK.⁸ Sementara itu pada proses pemilihan responden di Desa Tri Mulya, Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, dari jumlah KK sebanyak 709, terseleksi sebanyak 435 KK.⁹

7 Dari 177 KK ini dibagi 40 responden, sehingga mendapatkan angka hasil 4,4 dibulatkan menjadi 4. Dengan demikian, maka responden pertama adalah no urut KK 4, responden kedua no urut KK 8, responden ketiga no urut KK 12, dan seterusnya.

8 Dari 227 KK ini dibagi 40 responden, sehingga mendapatkan angka hasil 3,075 dibulatkan menjadi 3. Dengan demikian, maka responden pertama adalah no urut KK 3, responden kedua no urut KK 6, responden ketiga no urut KK 9, dan seterusnya.

9 Dari 435 KK ini dibagi 40 responden, sehingga mendapatkan angka hasil 10,875 dibulatkan menjadi 11. Dengan demikian maka responden pertama adalah no urut KK 11, responden kedua no urut KK 22, responden ketiga no urut KK 33, dan seterusnya.

3 PROFIL KASUS YANG DIKAJI

3.1. Kasus Suku Anak Dalam 113, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.

Kasus ‘SAD 113’, atau lengkapnya kasus ‘Suku Anak Dalam 113’, merujuk pada serangkaian upaya dari sekitar 600-an KK yang mengaku dirinya sebagai Suku Anak Dalam yang awalnya bermukim di 3 *dusun tuo*. Ketiga *dusun tuo* itu kini menjadi bagian dari wilayah administratif Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.

Ketiga *dusun tuo* yang dimaksud adalah Tanah Menang, Pinang Tinggi, dan Padang Salak. Luas wilayah ketiga *dusun tuo* adalah 3.550 Ha. Pada tahun 1985-1986 keseluruhan wilayah tiga *dusun tuo* itu secara formal dimasukkan ke dalam wilayah hak guna usaha (HGU) yang sekarang dikuasai oleh PT. Asiatic Persada.

Namun perkampungan, berikut perkuburan maupun areal perladangan tiga *dusun tuo* ini secara eksplisit disebut dalam surat pelepasan areal kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit milik PT. BDU – sebagai pemegang

HGU sejak tahun 1970 -- yang dikeluarkan oleh Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Departemen Kehutanan Jakarta No. 393/VII-4/1987 tanggal 11 Juli 1987.¹⁰

Sejak tahun 1970, wilayah yang kemudian terdapat HGU untuk PT. BDU tersebut, merupakan wilayah kerja dari perusahaan pemegang HPH yaitu PT. Asialog. Menurut pengakuan Abas Ubuk, kegiatan pembalakan saat itu tidak mengganggu perekonomian warga SAD. Sebaliknya masyarakat mendapat keuntungan dengan kehadiran perusahaan pembalak ketika itu. Hal ini dimungkinkan karena kegiatan pembalakan kayu berada di rimba dan bukan di perladangan masyarakat. Hasil hutan lain pun tidak terganggu karena perusahaan hanya berburu pohon kayu besar. Pohon-pohon di mana terdapat sarang lebah (disebut sebagai pohon *sialang*), untuk menghormati penduduk, juga tidak ditebang perusahaan. Keadaannya menjadi sangat berbeda ketika di wilayah tersebut beroperasi perusahaan perkebunan.¹¹

Pada tahun 1992, PT. BDU berganti nama menjadi PT Asiatic Persada.¹² PT. Asiatic Persada mengalami beberapa kali pergantian kepemilikan. Pada tahun 2000, perusahaan yang awalnya dikuasai oleh keluarga Senangsyah ini dijual kepada Commonwealth Development Corporation and Pacific Rim (CDC PacRim), selanjutnya kepada Cargill (2006), dan akhirnya oleh Wilmar pada tahun yang sama.¹³ Terakhir perusahaan dialihkan lagi kepada PT. Agro Mandiri Semesta (AMS), di mana pemilik masih bersaudara dengan pemilik Wilmar sebelumnya.¹⁴

10 Rukaiyah Rofiq & Rian Hidayat, 2013. Mediasi; strategi atau tujuan?. Sebuah Catatan Perjalanan dan pengalaman mediasi konflik antara PT Asatic Persada dengan Kelompok Suku Anak Dalam Batin Sembilan di Jambi. Tanpa Penerbit.

11 Wawancara pribadi dengan Abas Ubuk, tanggal 17 Juli 2017, saat penelitian dilakukan sedang menjabat sebagai Ketua Perkumpulan Kelompok Masyarakat Suku Anak Dalam 113, disingkat KM SAD 113. Pada awalnya, saat masuk PT. BDU, ada dua komoditi yang ditanam kala itu, yaitu coklat dan sawit. Saat itu, di lokasi 3 dusun tuo masih ditanami coklat. Dalam kasus komoditi coklat, masyarakat pun masih bisa bekerja (secara sambilan) di perusahaan. Pekerjaan merawat tanaman menjadi lapangan kerja yang terbuka bagi masyarakat. Situasi itu berubah sama sekali ketika komoditi beralih menjadi sawit. Di mana penggunaan tenaga kerja relatif lebih terbatas.

12 Rofiq & Hidayat, 2013, op.cit.

13 Rofiq & Hidayat, 2013, op.cit.

14 Lihat juga <http://www.mongabay.co.id/2016/06/07/kala-konflik-lahan-sad-113-dengan-asiatic-persada-berlarut-mengapa/>

Pada masa berlakunya HGU PT. Asiatic Persada, tepatnya pada tahun 1985 – 1986, dilakukan penggusuran untuk mengubah pemukiman warga – lengkap dengan lahan pertaniannya -- menjadi kebun sawit. Warga *tigo dusun tuo* itupun kemudian tinggal ditempat yang terpencar-pencar meski sebagian besar masih bermukim di sekitar dan di dalam Desa Bungku.

Keadaan menjadi berbeda sejak terjadinya reformasi pada tahun 1998. Penyebutan 'SAD 113' sendiri, yang pada tahun 2015 dilembagakan secara formal menjadi Perkumpulan Kelompok Masyarakat Suku Anak Dalam 113, berasal dari suatu inisiatif pada tahun 2003 yang menandai lahirnya upaya pengembalian tanah adat -- jika dapat dikatakan begitu -- bekas 3 *dusun tuo*. Pada pertemuan itu hadir 113 KK dari sekitar 600-an KK warga yang menjadi pemangku hak di ketiga *dusun tuo*. Penyebutan 'SAD 113' ini dibutuhkan sebagai pembeda dengan kelompok-kelompok SAD lain yang juga tengah memperjuangan hak-haknya atas tanah di kawasan tersebut.¹⁵

Pada perkembangan selanjutnya, ketiga *dusun tuo* ini disebut sebagai bagian dari wilayah adat Suku Anak Dalam Batin IX.¹⁶ Konsepsi ini telah menimbulkan persoalan-persoalan tersendiri di dalam proses-proses penyelesaian konflik pada masa-masa berikutnya.

Sebagaimana dapat dilihat dari beberapa penanda peristiwa di atas, kasus SAD 113 merupakan kasus yang telah berlangsung cukup lama dan menjadi bagian dari kasus konflik agraria yang kompleks. Kasus SAD 113 ini dikatakan kompleks karena para pihak yang terlibat dalam upaya pengembalian dan/atau pengakuan hak yang tergusur oleh hadirnya HGU dan/atau izin beberapa usaha di daerah itu menggunakan klaim hak yang berbeda, yang pada gilirannya telah menimbulkan ketegangan-ketegangan tertentu.

Di satu pihak, sebagaimana mana halnya kelompok SAD 113 menggunakan klaim pengakuan hak-hak masyarakat adat yang diambil secara tidak fair oleh perusahaan melalui tangan negara. Di pihak lain ada pula kelompok petani -- yang awalnya tuna tanah – melihat tanah-tanah yang telah mereka

15 Wawancara dengan Abas Ubuk, tanggal 17 Juli 2017.

16 Lihat Riaan Hidayat, 2012. Membangkitkan Batang Terendam. Sejarah Asal-Usul Kebudayaan dan Perjuangan Hak SAD Batin 9. Jambi: Yayasan SETARA Jambi; dan Rofiq & Hidayat, 2013, ibid.

kuasai itu adalah obyek redistribusi bagi petani miskin/tuna tanah. Makin kompleks lagi, dalam upaya memperoleh dan mempertahankan hak-haknya, kelompok petani juga menggunakan strategi-strategi yang berkaitan dengan klaim adat, antara lain, melalui perkawinan dengan warga (perempuan) SAD, dan melalui strategi itu juga membentuk organisasi-organisasi yang berbasis klaim hak adat.¹⁷

Desa Bungku, yang secara formal baru terbentuk pada tahun 1982 dan definitif pada 1984, dan juga beberapa desa yang ada di sekitar itu, adalah kawasan yang penuh dengan kasus konflik agraria. Akar masalahnya, sebagaimana yang dikemukakan Kepala Desa Bungku saat ini, Utut Ardianto yang juga merupakan aktivis Serikat Tani Nasional yang banyak mendampingi gerakan petani dan masyarakat adat di daerah itu, dari luas Desa Bungku seluas 120.000 ha hanya sekitar 27 ha saja yang berstatus kawasan Areal Penggunaan Lain (APL). Selebihnya telah dibebani hak, termasuk HGU, atau merupakan kawasan hutan negara yang telah diberikan izin kepada berbagai kegiatan usaha sektor swasta. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1, sekurang-kurangnya terdapat 6 (enam) kasus konflik agraria di desa ini.

Terhadap kasus-kasus itu telah banyak upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan, khususnya paska-reformasi tahun 1998 lalu. Terkait kasus SAD 113, adalah Yayasan Masyarakat Kubu (YAMABU), di bawah pimpinan Husein Aroni yang bemarkas di Unit 6 Transmigrasi di Desa Sungai Bahar, bekerja sama dengan Yayasan Setara Jambi, mengawali upaya pendampingan untuk pengembalian hak warga SAD dari *tigo Dusun tuo* itu. Di Dusun-dusun lain, pada waktu yang relatif bersamaan, juga muncul organisasi-organisasi yang mengatasnamakan SAD, yang memang sengaja dibentuk untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat SAD.

Pada tahap berikutnya, sebagaimana telah disinggung, gerakan pengembalian tanah-tanah SAD pada umumnya telah pula digabungkan atau bergabung dengan gerakan rakyat dan atau petani yang lebih luas. Pengorganisasiannya pada level ini dibantu oleh berbagai organisasi masyarakat sipil dari tingkat

17 Lihat Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), 2014. "Indigenouse Rights VS Agrarian Reform in Indonesia: A case Study from Jambi", 15 April 2104, IPAC Report No. 9; dan Rina Mardiana, 2014, loc.cit.

nasional.¹⁸ Upaya advokasi yang dilakukan pun tidak biasa, mulai mobilisasi massa (demonstrasi), sampai melakukan *long march* sejauh 1000 Km yang ditempuh selama lebih dari 40 hari menuju ibukota Jakarta.

Tabel 1. Rincian Wilayah Desa Bungku, Obyek Tanah yang Disengketakan, Wadah perjuangan, dan Perkembangan Penyelesaian Sengketa Mutakhir.

Dusun	Sebaran RT	Tanah yang Disengketakan	Para Pihak yang Bersengketa	Wadah Perjuangan dan Pendamping	Perkembangan terakhir
Dusun 1: Bungku Indah	01, 02, 03, 04, 05, 06, 32	Sebagian wilayah yang sudah jadi pemukiman dan kebun dijadikan wilayah TAHURA	TAHURA Sultan Thaha ¹⁹	SAD (sebagian dari 3 dusun tuo yang lain), petani	2015-2016: ada penetapan batas desa antar desa Poma Air dan Desa Bungku
Dusun 2: Johar Baru	07, 08, 09, 10, 11, 33, 34	Bekas 3 dusun tuo (seluas 3550 ha) ²⁰	Ahli waris 3 dusun tuo dengan PT. AP	Yamabu (awal tahun 2000-an); KM SAD 113 (2003)	Terdapat PT. Humusindo (tidak berkonflik dengan masyarakat)
		Masy. non-3 dusun tuo	PT. AP (HGU) dan PT. JT	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia
Dusun 3: Rantau Rasau	12, 13, 14, 15, 16, 17, 35	Wilayah telah jadi pemukiman dan kebun masyarakat.	PT. MPS (pemisahan HGU AP) dan PT. JT (pemisahan HGU AP)		- Lahan 2000 ha berada. - Ada kebun Aka (PT. Bahar Pasific) + lahan Tahura -Tanah sudah dikuasi petani tapi tidak bisa sertifikat

18 Lebih jauh lihat Rofiq & Hidayat (2013), IPAC (2014), dan Mardiana (2014).

19 Ditetapkan 2001- 2002.

20 Sebaran RT di bekas 3 dusun tuo: (1) Tanah Menang (07,08,09, 33, 34); seluruh wilayah (2) Pinang Tinggi dan (3) Padang Salak seluruhnya menjadi wilayah kerja PT. Asiatic Persada. Luasan RT 33 + RT 34 (241 ha) ini adalah wilayah yang tidak sempat 'digusur ulang' paska pendudukan pada tahun 2012 – 2014.

Dusun 4: Kunangan Jaya 1	18, 19, 20, 21, 22, 23, 37, 38, 39, 40	Wilayah telah jadi pemukiman dan kebun masyarakat	PT. MPS/PT. JT, REKI, PT. WN	STN, CAPPA	PT. MPS dan salah satu PT yang lain sudah dikuasai masyarakat. REKI dikuasai masyarakat seluas 2009 ha., dan saat ini diusulkan masuk ke dalam program perhutanan sosial. ²¹
Dusun 5: Kunangan Jaya 2	24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 41	Wilayah telah jadi pemukiman dan kebun masyarakat	WN (HP). AAS (HP), REKI (HPT) (2400)	STN, CAPPA	7489 ha telah dikuasi masyarakat. Dipetakan oleh Dishut 2013, tetapi status belum jelas. Lahan yang berada di dalam kawasan izin REKI diusulkan masuk ke dalam program PS.

Sumber: Diolah dari data primer dan sekunder.

Selain itu, inisiatif-inisiatif penyelesaian konflik pun ditempuh. Awalnya, setidaknya hingga awal tahun 2010, upaya-upaya itu lebih banyak dilakukan langsung oleh pemerintah, pihak perusahaan, dan kelompok-kelompok masyarakat. Namun hasilnya relatif nihil. Malah tak jarang justru menimbulkan konflik internal di kalangan masyarakat sendiri.

Dalam rentang waktu tahun 2010 hingga akhir Desember 2012 muncul dua inisiatif untuk melibatkan mediator dengan mengundang pihak independen, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Lagi-lagi, upaya ini menemui jalan buntu. Menurut catatan Rofiq dan Hidayat (2013), pada tahap pertama, proses mediasi gagal menemukan kata sepakat karena pihak PT. Asiatic Persada melakukan pelanggaran atas tata laksana perundingan yang telah disepakati di awal.

Mediasi tahap kedua gagal karena PT. Asiatic Persada selaku pemilik saham menjual seluruh saham kepada PT. AMS yang tidak memiliki hubungan baik dengan CAO-IFC yang bertindak sebagai mediator dalam mediasi tahap kedua dan juga dengan RSPO yang menginisiasikan mediasi tahap kedua ini.

²¹ Saat ini berjuang bersama-sama dengan kelompok masyarakat desa Bungku lainnya (SAD 113 dan Kunangan Jaya 2). Dulu warga di dusun Kunangan Jaya 1 ini didampingi oleh CAPPA.

Penjualan saham memutus rantai kewajiban PT. Asiatic Persada untuk taat pada proses mediasi, dan memutus kewajiban PT. Asiatic Persada terhadap kesepakatan-kesepakatan yang telah dihasilkan dalam proses perundingan yang telah berjalan.²²

Dinamika proses dan kegagalan mencapai kesepakatan yang dapat diterima para pihak telah mendorong munculnya gelombang demonstrasi besar-besaran. Pada bulan Maret 2012, SAD menduduki kantor Gubernur Jambi.²³ Tindakan serupa berulang pada di bulan November 2012.²⁴ Puncaknya pada tanggal 12 bulan Desember 2012, pukul 12 siang, para pihak yang tidak puas terhadap proses penyelesaian konflik yang berlangsung tidak menentu itu bertekad mengadakan kasusnya ke pihak-pihak yang berwenang di Jakarta.²⁵

Namun, karena aksi ini adalah aksi gabungan antara warga SAD dan non-SAD, timbul kecurigaan beberapa pihak bahwa aksi ini tidak murni aksi warga SAD.²⁶ Karena tidak kunjung ada perubahan yang berarti, kelompok masyarakat SAD 113 kembali masuk ke kawasan perkebunan dan menduduki tanah tersebut. Bahkan warga SAD 113 sempat memanen sawit perusahaan selama dua tahun tujuh bulan.²⁷

Tentu saja pihak perusahaan tidak terima. *"Kami akan lapor ke Komnas HAM",* kata Sjafe'i, Kepala Divisi Bina Mitra PT. Asiatic Persada ketika itu. *"Mereka mengklaim 3.550 Ha tanah milik PT AP. Ironisnya di dalam lahan yang sudah berupa HGU itu ada 11 kelompok asli SAD dan yang mengatasnamakan SAD dan berebut diatas tanah itu. PT AP sendiri dua tahun lalu sudah melepas 1000*

22 Kronologi, proses, dan posisi masing-masing kelompok dalam proses penyelesaian sengketa terhadap pilihan-pilihan penyelesaian sengketa sebelum tahun 2014 ini dapat dilihat dalam Rafiq & Hidayat, 2013.

23 <http://rosenmanmanihuruk.blogspot.co.id/2012/03/menuntut-hak-suku-anak-dalam-nginap-di.html>

24 <http://rosenmanmanihuruk.blogspot.co.id/2012/11/petani-jambi-desak-pt-asiatic-persada.html>

25 Lihat <http://rosenmanmanihuruk.blogspot.co.id/2012/12/petani-dan-suku-rimba-berangkat-jalan.html> ; <https://nasional.sindonews.com/read/694335/12/demo-sad-disinyalir-ada-kepentingan-politik-1354625355> ; <http://sad113.blogspot.co.id>; dan <http://poskotanews.com/2012/12/06/demo-suku-anak-dalam-dipertanyakan/>

26 <http://poskotanews.com/2012/12/06/demo-suku-anak-dalam-dipertanyakan/>

27 <http://www.lifemosaic.net/ind/berita/perusahaan-kelapa-sawit-asiatic-persada-usir-paksa-suku-anak-dalam/>

Ha tanah untuk SAD. Kami akan lapor ke Komnas HAM, karena kami yang jadi korban dan kami juga akan lapor ke Kapolri," kata Syafe'i lagi."²⁸

Pada tanggal 7 Desember 2013, dua hari setelah pemilihan Kepala Desa Bungku terjadi penggusuran kembali. Proses pemilihan ini terpaksa dilakukan dua kali dan Kepala Desa terpilih saat itu adalah Utut Ardianto.²⁹ Sebanyak 10 keluarga melawan penggusuran tersebut. Kini terdapat lahan seluas 241 ha yang tetap dihuni meski pada lahan tersebut terdapat pohon sawit milik perusahaan. Pada tahun 2014 konflik ditandai oleh jatuhnya korban jiwa.³⁰ Selanjutnya pada bulan November 2014, masyarakat kembali melakukan aksi berjalan kaki ke Jakarta yang ditempuh dalam waktu 42 hari.³¹

Aksi berjalan kaki ke Jakarta yang kedua kalinya tersebut mendorong proses penyelesaian sengketa yang baru. Pada tanggal 13 Mei 2014 diperoleh kesepakatan tentang akan ada lahan pengganti seluas 2000 ha.³² Namun, yang menerima penggantian kelompok lain. SAD 113 tidak dilibatkan.³³ Penerima ganti rugi bukan yang menjadi korban sesungguhnya.³⁴

Di tengah pro-kontra atas kesepakatan yang telah dicapai itu, pada tanggal 21 Maret 2014, melalui harian lokal, Tribun Jambi, Lembaga Adat Daerah Batanghari memasang iklan dengan tajuk mencolok: "SAD: Permasalahan dengan PT. Asiatik Sudah Selesai dengan Tuntas". Lembaga Adat Daerah Batanghari erat kaitannya dengan keberadaan masyarakat adat Suku Anak Dalam Batin IX dan akhir-akhir ini muncul sebagai lembaga yang mengaku merepresentasikan kelompok-kelompok masyarakat yang bertikai dengan

28 <http://sp.beritasatu.com/ekonomidanbisnis/lahan-diduduki-asiatic-persada-lapor-ke-komnas-ham/27513>

29 <http://www.berdikarionline.com/surat-terbuka-warga-suku-anak-dalam-sad-untuk-keadilan-agraria/>; <http://muherda.blogspot.co.id/2013/12/tujuh-alasan-penggusuran-pt-asiatic.html>; dan <http://ubkm-mandala.com/?p=1413>

30 <http://www.gresnews.com/berita/ekonomi/17083-konflik-abadi-suku-anak-dalam-vs-pt-asiatic-persada-bagian-iv/>

31 <http://gaung.aman.or.id/2015/05/13/utusan-sad-bathin-ix-solusi-persoalan-dengan-pt-ap-enclave/>; dan <https://indoprogress.com/2014/01/yang-tersingkir-dari-jambi/>

32 <http://www.batangharikab.go.id/bat/publikasi-126-suku-anak-dalam-sad-des-bungku-terima-2000-ha-lahan-dari-ptasiatic-persada.html>

33 <http://gaung.aman.or.id/2015/05/13/utusan-sad-bathin-ix-solusi-persoalan-dengan-pt-ap-enclave/>

34 <http://forumkeadilan.com/kriminal/kongkalikong-menggusur-anak-dalam/>

pihak perusahaan, termasuk kelompok-kelompok SAD. Pada iklan yang dimaksud, dicantumkan nama-nama yang mewakili masing-masing pihak yang termasuk ke dalam kelompok yang disebut '17 rumpun keturunan', lengkap dengan jumlah KK, jiwa, dan luas lahan yang diterima oleh masing-masing 'rumpun keturunan'.

Namun, beberapa sumber dari kelompok SAD 113 tidak mengakui ataupun memahami keberadaan '17 rumpun keturunan' yang dimaksud, dan kelompok SAD 113 tidak ada yang termasuk ke dalam salah satu 'rumpun keturunan' itu.

Singkat cerita, bagi SAD 113, kasus konflik tanah yang dihadapinya masih jauh dari selesai. Menyikapi keadaan yang ada, Usman, seorang tokoh masyarakat dari kelompok SAD 113 berkata: *"Kami sudah cukup rasanya meminta hak dengan cara baik-baik. Kami juga bisa melawan dengan cara kami. Tapi kami tidak mau ceroboh, tetap sabar. Jika kami tidak juga diindahkan, kami punya hukum adat. Kalau siapa salah, bunuh. Akan ke sana perginya nanti."* Tidak lama setelah penelitian lapangan tahap 1 berakhir yaitu sekitar awal bulan Agustus 2017, warga SAD 113 kembali memasuki area perkebunan dan mendudukinya.

3.2. Kasus Desa Trimulya, Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat

Profil kasus berikut dibangun berdasarkan hasil studi pustaka dan wawancara dalam proses penelitian. Secara umum, konflik yang terjadi di Desa Trimulya, Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat teridentifikasi menjadi dua tahap, yaitu :

1. Konflik Masyarakat Adat Dayak Jangkang dengan transmigran dari Jawa di wilayah transmigrasi Desa Trimulya, dan
2. Konflik masyarakat Desa Trimulya (baik Masyarakat Adat Dayak maupun Jawa) dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Masing-masing konflik memiliki karakteristik dan dampak berbeda yang mempengaruhi kehidupan. Berikut ini akan dijelaskan profil dari setiap kasus yang mewarnai konflik terkait. Konflik pertama merupakan konflik antara Masyarakat Adat Dayak Jangkang dengan transmigran dari Jawa di wilayah transmigrasi yang kemudian dinamakan Desa Trimulya. Berawal pada tahun 1980, ketika transmigrasi sebagai program pemerintah sedang dipopulerkan dengan tujuan untuk pemerataan penduduk. Provinsi Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah untuk proyek percontohan nasional dalam program transmigrasi.

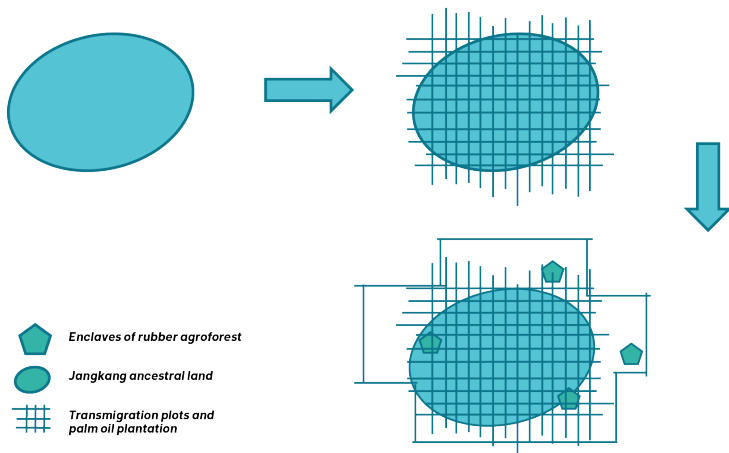
Masyarakat Adat Dayak Jangkang yang berada di Desa Trimulya, Kabupaten Sanggau sebagai salah satu lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan transmigrasi, dijadikan transmigran lokal. Mereka dijanjikan adanya akses pendidikan, transportasi yang layak dan juga fasilitas rumah beserta kebun. Setiap keluarga transmigran akan menerima rumah beserta seperempat hektar lahan sebagai halaman rumahnya, satu hektar lahan untuk kebun pada plot pertama dan tiga perempat hektar pada plot kedua. Pemberian lahan dilakukan bertahap dan bersertifikat.

Pada tahun 1983, sekitar 58 (lima puluh delapan) keluarga transmigran dari Delanggu, Klaten, Jawa Tengah tiba dan bergabung dengan transmigran lokal sebanyak 43 (empat puluh tiga) keluarga. Mereka menempati rumah-

rumah yang telah disediakan di kawasan transmigrasi tersebut.

Namun, sampai sekian tahun menempati lokasi transmigrasi, sertifikat yang dijanjikan tidak kunjung diperoleh. Sertifikat untuk plot pertama pada tahun 1986 akhirnya diberikan, namun plot kedua yang dijanjikan tidak berhasil diwujudkan karena klaim tumpang tindih dengan pemilik hak ulayat. Konflik antara Masyarakat Adat Dayak Jangkang dengan transmigran dari Jawa mulai mewarnai kehidupan di desa tersebut. Hal ini disebabkan karena buruknya perencanaan dan pelaksanaan program transmigrasi dimana perencanaan dilakukan dengan mengabaikan sistem kepemilikan tanah adat.

Lahan yang sudah diplot dan dibagi-bagi ke seluruh transmigran ternyata secara adat dimiliki oleh warga setempat. Beberapa warga transmigran dari Jawa yang sudah mulai mengolah tanahnya digugat dan diminta membayar ganti rugi sejumlah uang atas tanah terkait oleh pemilik hak secara adat. Sertifikat tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan sah atas tanah karena secara adat tanah tersebut telah ada pemiliknya. Perubahan lanskap tanah tersebut ditunjukkan pada gambar berikut ini.



Gambar 2. Perubahan Lanskap di Tanah Komunal (1983-2008)

Menghadapi konflik ini, sebagian anggota masyarakat adat kembali ke desa asalnya dan melanjutkan budidaya lahan mereka melalui perladangan berpindah dan penjadapan karet.

Sementara beberapa transmigran Jawa menjual tanahnya dan kembali ke Jawa atau pindah ke tempat lainnya. Transmigran yang menetap memilih kemudian bekerja menjadi buruh di perusahaan atau berdagang. Bahkan desa ini sempat berada pada periode dimana hampir seluruhnya yang tinggal adalah perempuan dan anak-anak, karena seluruh laki-laki bekerja merantau ke luar wilayah.

Konflik kedua diawali pada tahun 1999 ketika sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yaitu PT CNIS mulai masuk ke wilayah ini. Pihak perusahaan menawarkan program inti-plasma kepada seluruh warga desa. Perusahaan menjanjikan untuk mengembalikan tanah tiga perempat hektar yang bersertifikat dengan (imbalan) luasan yang sama.

Sementara untuk tanah tanpa sertifikat, ditawarkan imbalan seluas dua hektar untuk setiap lima hektar. Hampir seluruh warga memberikan tanahnya melalui program inti-plasma ini. Hal ini berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber, dikarenakan warga merasa terintimidasi baik oleh perusahaan maupun warga yang lain apabila tidak mengikuti skema tersebut. Mereka pun menerima selembar kertas yang menyatakan bahwa mereka terdaftar sebagai anggota Koperasi Tut Wuri Handayani setelah ikut dalam program inti-plasma tersebut.

Pada tahun 2000, PT CNIS diambil alih oleh Grup Sinar Mas. Pemilik baru mengabaikan skema yang dijanjikan sebelumnya dan menawarkan skema baru dengan sistem saham.³⁵ Dalam sistem ini, seluruh warga desa menjadi pemilik saham dan terdaftar sebagai anggota pasif, sementara perusahaan mengelola sendiri seluruh perkebunan sawitnya. Setiap tahunnya, anggota pasif memperoleh imbalan yang tidak seberapa karena dipotong kredit yang harus dibayarkan. Lahan ini dijanjikan akan dikembalikan dalam tempo 16 (enam belas) tahun.

Namun, dalam perjalanannya imbalan sebagai anggota pasif seringkali didistribusikan terlambat. Di samping itu, beberapa masyarakat mulai menanyakan status sertifikat tanah yang mereka berikan kepada perusahaan. Beberapa kali masyarakat melakukan demonstrasi baik ke perusahaan maupun ke koperasi, namun berdasarkan hasil wawancara, masyarakat tidak pernah memperoleh jawaban atas pertanyaan mereka.

Konflik tahap kedua di lokasi ini berdampak cukup signifikan bagi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, berikut ini identifikasi kerugian masyarakat akibat konflik dengan perkebunan dan situasi hari ini di Desa Trimulya:

a. Lingkungan

- Sungai mengalami pencemaran (disebutkan oleh masyarakat terkontaminasi racun) yang diyakini akibat keberadaan perkebunan sawit yang berjarak sekian meter dari sungai. Warna air sungai berubah dari bening menjadi keruh kemerahan.
- Hutan terbabat habis digantikan kebun sawit dimana-mana.
- Cuaca berubah ekstrim, dahulu sejuk sekarang panas sekali

35 Secara umum terdapat empat generasi terkait skema yang ditawarkan perusahaan perkebunan sawit: 1. Skema inti murni, yang diperkenalkan sekitar tahun 1980 ini berasumsi bahwa masyarakat memiliki lahan yang luas namun tidak punya hak untuk menguasai, sekaligus tidak memiliki kepentingan untuk mempertahankan bahkan berinvestasi ; 2. Skema plasma-inti, dipromosikan pada tahun 1990-an oleh World Bank dan ADB dengan mengasumsikan bahwa masyarakat bersedia menginvestasikan tanahnya dengan imbalan hasil panen dan saham di lahan perkebunan sawit besar; 3. Skema Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) yang dikenalkan paska reformasi 1998 didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat memiliki lahan yang luas, bersedia melakukan investasi namun tidak memiliki akses terhadap kredit untuk pengembangan lahannya; 4. Skema akuan atau sering disebut skema saham merupakan skema generasi berikutnya dimana lahan dikelola oleh perusahaan dan masyarakat menerima pendapatan pasif (*passive income*) dari produksi rata-rata plot. Walaupun dalam kenyataannya seringkali terjadi manipulasi baik oleh perusahaan maupun koperasi terkait skema ini (Sirait, 2009).

- Banyak hama tikus sejak ada perkebunan sawit, dan sering menyerang ladang warna sehingga gagal panen.

b. Livelihood

- Masyarakat kehilangan sumber air minum dari sungai (dulu air sungai diminum langsung). Masyarakat mengalami sakit perut apabila meminum air sungai langsung.
- Saat ini sumber air minum berasal dari sumur bor, namun masyarakat mulai sering dilanda kekeringan ketika kebun sawit meluas sampai ke dekat pemukiman masyarakat.
- Masyarakat kehilangan ikan dari sungai (dulu banyak sekali dan mudah mendapatkan ikan, sekarang sulit mendapatkan ikan; dulu jenis ikan bervariasi, bahkan ikan silok atau arwana mudah ditemui, sekarang hanya semacam dua macam saja). Masyarakat harus membeli ikan di pasar dengan harga Rp70.000/kg untuk ikan toman atau Rp30.000/kg untuk ikan sarden.
- Dahulu mendapatkan babi hutan untuk dimakan sangatlah mudah, saat ini sudah tidak ada. Dulu banyak sekali burung enggang, babi hutan, rusa, orang hutan, beruang. Saat ini berbagai binatang juga tidak dapat ditemui lagi.
- Buah-buahan yang dahulu ditemui banyak di hutan (seperti buah maram) sekarang tidak ada dan untuk itu masyarakat harus membelinya di pasar sekitar Rp10.000/kg
- Demikian pula dengan tumbuhan untuk dijadikan sayur-mayur, saat ini hanya tertinggal rebung dan pakis yang harus diperoleh dengan jarak yang sangat jauh.
- Rotan dan daun pandan untuk membuat lampit/tikar dan berbagai keperluan hidup orang Dayak (seperti tas, gendongan anak, wadah, dll) punah dan digantikan dengan barang-barang substitusi (terbuat dari plastik, kain).

c. Sumber obat-obatan tradisional

- Akibat ketiadaan hutan yang berakibat pada punahnya berbagai hewan, maka obat penting seperti empedu beruang yang dapat berkhasiat mengobati segala macam penyakit juga hilang.
- Selain itu akar-akaran, kayu dan daun-daunan yang umumnya digunakan untuk obat-obatan tradisional juga mulai sulit didapatkan.

- Sementara rumah sakit berjarak 2-3 jam dari desa atau di ibukota kabupaten. Hanya ada puskesmas di lokasi.

d. Sosial

- Ketentraman terganggu karena setiap saat memikirkan sertifikat tanah yang belum dikembalikan oleh perusahaan sawit.
- Tanah diserahkan ke perusahaan dalam jangka waktu 16 (enam belas) tahun sehingga masyarakat kehilangan tanah dan hanya memperoleh sekitar Rp300.000/bulan dari bagi hasil.
- Sebagian besar laki-laki terpaksa merantau keluar wilayah untuk bekerja sebagai buruh karena tanah diserahkan kepada perusahaan sawit.
- Perempuan dan anak-anak ditinggalkan di desa tanpa kepastian kapan kembali. Beban perempuan menjadi semakin berlipat ganda.
- Kecemburuan sosial meningkat terutama pada masyarakat yang bekerja pada perusahaan sawit karena mampu membeli kendaraan bermotor.
- Narkoba mulai masuk ke desa.
- Gotong-royong semakin menurun.
- Namun pendidikan anak terjamin karena ada sekolah di desa.
- Waktu yang hilang karena tersita untuk demonstrasi dan rapat-rapat warga untuk konsolidasi.

Saat ini, tepatnya pada pertengahan tahun 2017, lahan sudah dikembalikan kepada masyarakat. Namun dampak dan kerugian dari keberadaan perkebunan sawit yang mengubah kehidupan seperti dijelaskan di atas tidak dapat dipulihkan begitu saja.

3.3. Kasus Desa Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur

Desa Muara Tae adalah tempat tinggal Masyarakat Adat Dayak Benuaq. Masyarakat Adat Dayak Benuaq umumnya bekerja sebagai petani. Berladang, memungut rotan, berburu, menyadap karet dan melakukan budi daya madu adalah kegiatan keseharian masyarakat Dayak Benuaq. Terdapat juga masyarakat pendatang yang umumnya dari Jawa dan tinggal tetap di kawasan itu, namun sebagian besar berprofesi sebagai pedagang. Demikian juga para pekerja perusahaan tambang dan sawit dari luar daerah juga tinggal di kawasan tersebut meski mereka hanya tinggal sementara waktu.

Konflik pertanahan di Desa Muara Tae pada dasarnya dapat dibagi ke dalam tiga jenis konflik vertikal: a) konflik perusahaan HPH dan HTI dengan masyarakat; b) konflik perusahaan tambang dengan masyarakat; dan c) konflik perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat. Ketiga jenis konflik tersebut memiliki karakteristik dan intensitas yang berbeda, meskipun ketiganya memiliki kesamaan yaitu bersumber dari konflik lahan. Tercatat enam perusahaan terlibat konflik dengan masyarakat desa selama 46 tahun terakhir. Desa Muara Tae seluas kurang lebih 12.000 ha dengan jumlah penduduk 2.360 jiwa (Komnas HAM, 2016, p. 209), selalu didera gelombang konflik selama 46 tahun terakhir tanpa ada satu kasus-pun yang terselesaikan (Kaoem Telapak, 2016).

Konflik perusahaan HPH dan masyarakat terjadi sejak masuknya investasi perusahaan HPH di tahun 1971. Konflik bermula dari lahan dan kemudian perusahaan menebang pohon-pohon besar dan pohon buah-buahan di hutan adat (Komna HAM, 2016). Perusahaan juga melakukan *land clearing* di lahan pertanian masyarakat adat (Sirait, Fay dan Kuswoyo, 1999). Masyarakat melawan tindakan perusahaan, meskipun dalam melakukan *land clearing* pihak perusahaan seolah-olah mengatasnamakan kepentingan negara. Di tahun 1993 perusahaan yang sama mengembangkan HTI di wilayah adat desa Muara Tae. Penggusuran terjadi dan keanekaragaman pohon di kawasan tersebut diganti dengan pohon akasia (Komnas HAM, 2016).

Konflik masyarakat dengan perusahaan HTI melibatkan aparat keamanan dan pemerintah daerah. Masyarakat melayangkan surat pernyataan pengembalian tanah adat kepada perusahaan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, namun tidak ada tanggapan terhadap surat tersebut (Sirait, Fay dan Kuswoyo, 1999). Sebagai reaksi terhadap surat tersebut, di tahun 1994 Gubernur Kalimantan Timur justru melakukan tuntutan pidana dengan tuduhan pemalsuan tandatangan kepada masyarakat adat atas nama kepala adat, namun pengadilan membebaskan kepala adat dari tuntutan tersebut (Sirait, Fay dan Kuswoyo, 1999).

Konflik masyarakat dengan perusahaan tambang terjadi akibat masuknya investasi perusahaan tambang pada tahun 1995 dan 2012. Lokasi tambang tersebut pada umumnya lebih mendekati pemukiman penduduk dibandingkan dengan lokasi perusahaan HPH. Seperti halnya konflik dengan perusahaan HPH, konflik dengan perusahaan tambang berawal dari konflik lahan. Didasarkan pada hasil wawancara, masyarakat menilai intensitas konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan tambang relatif lebih intensif dibandingkan dengan konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan HPH. Kedekatan lokasi tambang dengan pemukiman masyarakat merupakan salah satu pemicu munculnya konflik, disamping pembukaan lahan mulai menurunkan fungsi hutan sebagai penyedia kebutuhan masyarakat.

Kegiatan pertambangan saat ini menyisakan lubang-lubang tambang yang digenangi air. Lubang-lubang tersebut menelan korban jiwa, terutama bagi anak-anak atau para remaja dari luar kawasan tersebut karena mereka tidak mengetahui keberadaan lubang tambang dan mereka tenggelam di lubang tersebut. Keberadaan lubang tambang yang ditinggalkan begitu saja, meningkatkan risiko yang dihadapi masyarakat.

Konflik vertikal ketiga adalah konflik antara perusahaan kelapa sawit dengan masyarakat. Konflik ini dimulai dengan masuknya investasi perusahaan kelapa sawit sejak tahun 1995. Konflik pertanahan yang terjadi dengan perusahaan kelapa sawit dapat dibagi ke dalam dua fase, yaitu fase pertama pada rentang waktu 1995-2009 dan fase kedua pada rentang

waktu 2010-sekarang. Pada fase pertama, konflik lebih cenderung sebagai konflik vertikal, sementara pada fase kedua tidak saja terjadi konflik vertikal namun juga berkembang lebih kompleks menjadi konflik horizontal (antar kelompok masyarakat).

Di fase pertama konflik, perusahaan kelapa sawit melakukan *land clearing* dan berdampak pada hilangnya kuburan para leluhur masyarakat desa Muara Tae. Konflik tanah terjadi akibat terjadi penggusuran dan tanah masyarakat mulai ditanami kelapa sawit tanpa ganti rugi (Komnas HAM, 2016). Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat untuk menolak kehadiran beroperasinya perusahaan kelapa sawit, namun penggusuran dan penanaman kelapa sawit terus terjadi. Penangkapan terhadap tokoh-tokoh masyarakat oleh aparat terjadi di tahun 1998 ketika masyarakat berdemonstrasi menuntut pertanggung jawaban perusahaan kelapa sawit (Komnas HAM, 2016).

Di fase kedua konflik dengan perusahaan kelapa sawit, kehadiran investor baru perusahaan kelapa sawit menciptakan dua jenis konflik sekaligus yaitu konflik vertikal dan horizontal. Pembebasan lahan yang dilakukan perusahaan tersebut di desa tetangga ternyata merebut wilayah desa Muara Tae (Komnas HAM, 2016). Di satu sisi warga desa tetangga mendukung pembebasan lahan tersebut, namun di sisi lain warga desa Muara Tae merasa dirugikan dengan pembebasan lahan tersebut. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pembebasan lahan seluas 638 Ha atas nama hanya empat orang adalah janggal, mengingat kepemilikan lahan rata-rata rumah tangga tidak seluas itu.

Hasil wawancancara menunjukkan ketika HPH mulai beroperasi di sekitar wilayah Muara Tae, praktis fungsi hutan masih terjaga dengan baik. Lokasi HPH yang jauh di dalam hutan menyebabkan kerusakan fungsi hutan di sekitar kawasan pemukiman cenderung minimum, meskipun konflik merusak kawasan hutan adat. Pada masa itu air sungai masih tetap jernih seperti semula dan bahkan dapat diminum langsung. Sungai menyediakan berbagai jenis ikan dengan ukuran yang tidak berbeda dengan kondisi sebelum kehadiran HPH. Berbagai tanaman obat-obatan, berbagai jenis

kayu, hewan buruan dan buah-buahan masih tersedia melimpah dan belum ada tanda-tanda perubahan konsumsi masyarakat akibat penurunan fungsi hutan.

Kualitas air sungai masih sama dengan sebelum hadirnya perusahaan HPH dan tambang. Kawasan hutan di sekitar pemukiman penduduk masih berfungsi dengan baik menyediakan hampir seluruh kebutuhan hidup masyarakat. Hewan buruan, buah buahan, rotan dan kayu masih banyak dan berlimpah sementara itu madu dengan mudah dibudidayakan oleh masyarakat. Kerukunan masyarakat pada saat itu masih baik dan tingkat kriminalitas sangat rendah. Masing-masing rumah tangga pada dasarnya masih memiliki akses yang sama ke sumber daya hutan. Pola perladangan berpindah masih dilaksanakan karena tiap rumah tangga mendapatkan warisan tanah turun-temurun yang cukup luas.

Kegiatan kepercayaan dan tradisi masyarakat pada saat itu belum terganggu. Kayu ulin, babi hutan, burung-burung jenis tertentu untuk upacara adat dan berbagai tanaman obat-obatan masih tersedia melimpah sehingga berbagai upacara adat masih terjaga dengan baik.

Hasil wawancara menunjukkan perubahan pola kehidupan mulai dirasakan ketika konflik terjadi antara masyarakat dengan perusahaan kelapa sawit yang mulai masuk di pertengahan dekade 1990-an. Praktik *land grabbing* yang dibungkus dengan program inti-plasma, diperburuk dengan rusaknya hutan, dan pembuangan limbah *land clearing* di hulu sungai, menyebabkan perubahan pola hidup yang mendasar bagi masyarakat.

Sejalan dengan semakin luasnya lahan perkebunan kelapa sawit, maka lahan hutan, *lembo* dan lahan masyarakat semakin menyempit. Ketika hutan hilang, berbagai sumber daya hutan yang awalnya bisa dikonsumsi tanpa perlu membeli, kemudian harus dibeli oleh rumah tangga. Di sisi lain konflik semakin memburuk karena operasional perkebunan kelapa sawit mulai menyebabkan penurunan kualitas air sungai. Masyarakat tidak lagi dapat meminum air sungai seperti dulu, bahkan untuk mandi pun kualitasnya tidak layak.

Pada tahap lanjut, konflik yang semula bersifat vertikal antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dan masyarakat, berkembang semakin kompleks. Hasil wawancara menunjukkan perusahaan kelapa sawit mulai melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan hanya melibatkan kelompok masyarakat yang mendukung investasi mereka.

Kelompok masyarakat ini tentu saja adalah kelompok yang merasa diuntungkan oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan ditengarai mendekati beberapa tokoh masyarakat untuk mendapatkan hak membeli tanah penduduk untuk usaha mereka. Tokoh-tokoh masyarakat ini seringkali mendapatkan perlakuan khusus oleh perusahaan kelapa sawit. Berkembanglah konflik tidak saja secara vertikal namun juga berkembang menjadi konflik horizontal. Pada titik ini, konflik seringkali terjadi di tingkat keluarga besar di dalam suatu kekerabatan. Konflik bahkan menciptakan perpecahan antar saudara di dalam suatu keluarga. Dampak konflik semakin memburuk karena tingkat kriminalitas juga meningkat sebagai akibat berkurangnya lahan kepemilikan tanah oleh penduduk.

Hasil wawancara juga menunjukkan masyarakat pada dasarnya memiliki persepsi yang sangat negatif terhadap investor. Mereka memiliki persepsi bahwa setiap investor selalu tamak dan akan menggunakan segala cara untuk mengelabui masyarakat demi memaksimalkan keuntungan investor. Masyarakat Muara Tae juga memahami bahwa aparat pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tidak pernah mendukung mereka. Sebaliknya, masyarakat merasa bahwa setiap kali terjadi konflik antara perusahaan dan masyarakat, baik pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum terkesan melindungi dan berpihak kepada perusahaan

Sejak tahun 1995 hampir setiap tahun terjadi demonstrasi di Muara Tae. Namun masyarakat selalu mengeluh bahwa di setiap demonstrasi, mereka tidak pernah mampu bertemu dengan direksi perusahaan kelapa sawit. Mereka hanya ditemui oleh aparat penegak hukum dan pengurus koperasi. Pengurus koperasi biasanya aktif hadir melakukan mediasi dengan masyarakat dan mereka umumnya berpihak kepada perusahaan. Hal ini terjadi mengingat pihak koperasi terikat perjanjian inti-plasma dengan

perusahaan, dan sesuai kontrak kerja, pihak koperasi bertanggung jawab mengendalikan anggotanya yang melakukan aksi demonstrasi.

Kalaupun permasalahan menjadi semakin serius, maka aparat pemerintah daerahlah yang akan menemui mereka untuk berunding. Pada titik sekritis itu, tetap saja direksi perusahaan tidak dapat ditemui. Timbullah kesan di masyarakat bahwa pemerintah daerah dan aparat penegak hukum bekerja untuk melindungi investor. Dalam setiap kontrak kerjasama antara perusahaan dan koperasi untuk skema inti-plasma, biasanya kontrak kerjasama juga ditandatangani oleh kepala daerah yang bertindak sebagai saksi.³⁶

Desa Muara Tae adalah desa terakhir yang tanahnya belum dapat sepenuhnya dikuasai oleh perusahaan kelapa sawit. Desa-desa di sekitar Muara Tae telah dikuasai perusahaan kelapa sawit dengan cara-cara yang menurut masyarakat tidak etis. Tidak mengherankan jika tekanan terhadap masyarakat di Muara Tae semakin tinggi untuk melepaskan hak tanahnya kepada pihak perusahaan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil survei, dari 40 responden tidak ada yang mengikuti program inti-plasma. Mereka belum mau tergabung di dalam program tersebut karena di daerah lain terbukti merugikan masyarakat.

36 Informasi yang disampaikan dalam kasus yang dikaji bersumber dari hasil wawancara ZMET di Muara Tae pada tanggal 31 Juli – 6 Agustus 2017..

3.4. Karakteristik Konflik yang Dikaji

Setiap jenis konflik memiliki karakteristik yang seringkali berbeda antara satu dengan yang lain. Pada penelitian ini konflik yang dianalisis adalah konflik pertanahan dan terkait dengan operasi perusahaan sawit. Konflik yang terjadi di sekitar perkebunan sawit pada umumnya dimulai dari sengketa tanah. Meski di tahap awal konflik yang terjadi cenderung bersifat vertikal, yaitu antara perusahaan dan masyarakat sekitar perkebunan, namun pada tahap lanjut dapat berevolusi menjadi konflik horizontal (konflik antar anggota masyarakat).

Di ketiga wilayah penelitian, terdapat beberapa kesamaan karakteristik konflik yang terjadi, yaitu:

1. Di tahun 1970-an konflik terjadi antara masyarakat dan perusahaan HPH. Namun demikian konflik ini tidak seserius konflik yang terjadi kemudian antara masyarakat dengan perusahaan tambang dan perusahaan minyak kelapa sawit. Lokasi HPH yang umumnya jauh di dalam hutan, relatif tidak berdampak langsung terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.
2. Di dekade 1980-an konflik terjadi antara masyarakat dan perusahaan tambang (kecuali pada kasus Desa Trimulya yang merupakan wilayah transmigrasi, konflik terjadi antara masyarakat asli dengan pendatang). Pada kasus Muara Tae, perusahaan tambang yang berinvestasi adalah perusahaan tambang emas dan batu bara. Lokasi tambang biasanya tidak terlalu luas dan berada jauh dari pemukiman, sehingga polusi akibat pertambangan tidak begitu dirasakan masyarakat. Namun proses alih fungsi lahan dan proporsi pekerja dari luar daerah seringkali menjadi pemicu konflik.
3. Sejak dekade 1990-an konflik yang terjadi adalah antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan sawit. Kebutuhan ekspansi lahan yang tinggi dan aktivitas pembukaan lahan di hulu sungai, menyebabkan limbah dibuang ke sungai dan menciptakan polusi (contohnya kayu dan daun yang membusuk). Selain itu, polusi air meningkat, area hutan menyempit, praktik ladang berpindah semakin sulit dilakukan, dan luas kebun serta *lembo* masyarakat menyempit,

maka hal ini memicu konflik. Kondisi ini masih diperburuk oleh praktik *land grabbing* dari skema inti-plasma dan perjanjian kemitraan inti-plasma yang pada dasarnya menguntungkan perusahaan. Hal ini menjadikan konflik antara masyarakat dan perkebunan sawit berkepanjangan.

4. Perkembangan terakhir dari pola konflik, tidak lagi bersifat vertikal (antara perusahaan dan masyarakat) namun telah pula memicu konflik horizontal (antar kelompok masyarakat). Kondisi ini tidak terlepas dari peran perusahaan yang cenderung aktif memberikan CSR ke kelompok masyarakat yang mendukung investor dan tidak memberikan CSR ke kelompok masyarakat yang menentang investor. Sehingga CSR tidak lagi bersifat netral namun disalurkan untuk kepentingan perusahaan.
5. Pola kolusi antara investor-pemerintah daerah-aparat penegak hukum sangat menjadi perhatian dari masyarakat. Masyarakat cenderung tidak mempercayai pemerintah daerah dan aparat penegak hukum karena mereka umumnya mendukung para investor. Namun demikian, masyarakat berharap banyak dari pemerintah pusat yang mereka nilai masih dapat dipercaya. Mereka sangat berharap pemerintah pusat menyelesaikan masalah konflik tersebut.

4 PETA MENTAL TERKAIT DAMPAK KONFLIK

Berkaitan dengan kesamaan karakteristik antara ketiga jenis konflik tersebut, maka peneliti melakukan penggabungan antara peta mental informan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat serta melengkapinya dengan hasil FGD di Jambi. Hasil dari peta mental telah mengakomodasi kondisi di tiga wilayah konflik yaitu di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Jambi..

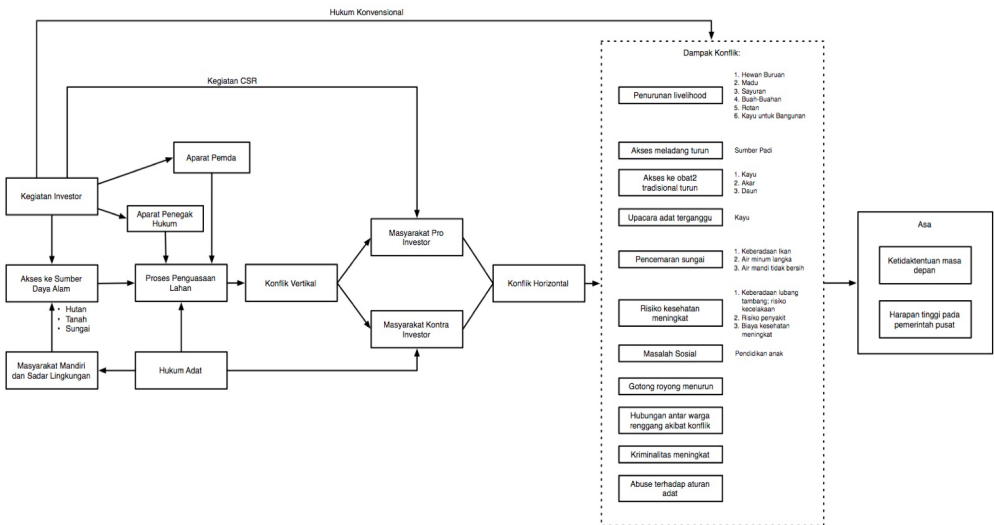
Gambar 3 menunjukkan peta mental konsolidasi dari informan terkait konflik. Secara umum pola peta mental antar para informan cenderung menggunakan pendekatan historis. Mereka menjelaskan kondisi sebelum adanya aktivitas perusahaan, hingga perusahaan beroperasi di daerah mereka dan menimbulkan konflik.

Dampak konflik kemudian muncul, baik akibat aktivitas perusahaan maupun juga dari konflik itu sendiri. Pola konflik juga mengalami evolusi yang semula bersifat vertikal menjadi kompleks karena berkembang menjadi konflik horizontal hingga terbentuklah konflik multidimensi. Konflik tersebut kemudian menciptakan berbagai dampak, baik langsung maupun tidak langsung. Hingga saat ini konflik masih berlangsung di ketiga wilayah konflik. Kalaupun suatu saat konflik tersebut terselesaikan, namun dampak konflik

tetap akan muncul paska konflik.

Aktivitas perusahaan sawit tidak saja menyebabkan penurunan kehidupan ekonomi masyarakat, namun juga menurunkan akses ke lahan untuk berladang, akses memperoleh obat-obatan tradisional, kendala ke upacara-upacara adat, menurunkan kohesifitas masyarakat, terjadi peningkatan kriminalitas dan masalah-masalah sosial lainnya.

Di akhir bagian para informan memiliki asa, baik yang bersifat optimis (harapan) maupun juga ketidaktentuan akan masa depan. Mereka sangat berharap pemerintah pusat turun tangan dan memecahkan masalah konflik tersebut. Di sisi lain mereka merasa memiliki masa depan yang suram karena mereka tidak tahu sampai kapan bisa bertahan melawan perluasan perusahaan sawit.



Gambar 3. Hasil Peta mental

Gambar 3 hasil ZMET mulai di baca dari kiri yaitu ketika sebelum perusahaan sawit hadir maka praktik akses masyarakat terhadap hutan, lahan dan sungai pada dasarnya bebas. Mereka bebas mengambil berbagai hasil hutan yang sebagian besar tidak ada yang menanam, dan di sisi lain mereka hanya mengkonsumsi yang mereka butuhkan saja.

Di masa itu, air sungai jernih sehingga jamak masyarakat langsung meminum air dari air sungai. Sungai juga kaya dengan ikan berukuran besar yang menyediakan kebutuhan protein bagi masyarakat. Pada saat itu ikan yang dapat diperjualbelikan adalah ikan asin dengan ukuran tertentu. Ikan segar digunakan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi rumah tangga sehari-hari.

Hutan menyediakan hampir semua kebutuhan rumah tangga. Makanan pokok diperoleh dari bercocok tanam di ladang dengan sistem ladang berpindah. Sistem perladangan berpindah hanya dimungkinkan ketika masing-masing rumah tangga memiliki area lahan yang cukup luas, mengingat petani akan melakukan rotasi dalam bercocok tanam dari satu lokasi ke lokasi lain. Tanaman keras dan buah-buahan diperoleh baik dari hutan maupun dari kebun dan *lembo* milik masyarakat.

Hutan menyediakan sumber mata pencarian yang kaya namun tidak ada yang perlu menanam atau memeliharanya secara khusus. Masyarakat hanya perlu memanfaatkan sumber daya hutan secara bijaksana dengan mengkonsumsi sesuai kebutuhan untuk menjaga kelestarian hutan. Hal ini sudah diatur dengan baik di hukum adat yang berlaku di masyarakat.

Hukum adat dibangun atas dasar asumsi bahwa kehidupan masyarakat adat tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sekitarnya. Konsekuensinya adalah bahwa *property right* tidak terletak pada tingkat individu, namun pada tingkat masyarakat dan lingkungan di mana mereka tinggal.

Pada masa pra konflik hingga tahun 1995, berbagai binatang buruan seperti babi hutan, kijang, rusa, kancil, landak, dan berbagai jenis burung hidup bebas dan dapat diburu oleh masyarakat. Musim babi terjadi dua kali setahun selama beberapa bulan setiap musim, bersamaan dengan musim buah-

buahan. Di musim babi hampir semua rumah tangga mampu menjebak babi setiap hari sehingga kebutuhan protein hewani dan minyak hewani dapat tercukupi tanpa harus membeli. Di musim buah-buahan berbagai buah-buahan dapat diambil oleh setiap orang di kebun masyarakat tanpa perlu meminta ijin kepada pemilik kebun. Berlimpahnya akses terhadap bahan makanan oleh masyarakat, yang dapat di akses dari kebun, *lembo* maupun hutan, menyebabkan rendahnya angka kejahatan yang terjadi kala itu.

Obat-obatan juga disediakan oleh hutan dalam bentuk akar-akaran, kayu dan daun-daunan. Berbagai jenis penyakit dapat ditemukan obatnya di hutan dan masyarakat mengembangkan pengetahuan ini secara turun-temurun. Pada saat itu belum dikenal beberapa penyakit yang muncul di era modern seperti stroke dan penyakit jantung. Penyakit stroke dan serangan jantung baru dikenal sejalan dengan perubahan gaya hidup dan pola konsumsi yang terjadi di masyarakat.

Komoditas perdagangan seperti rotan (terdapat 10 jenis rotan) tumbuh dengan sendirinya dan tidak perlu ada yang merawat. Masyarakat menggunakan rotan untuk berbagai keperluan, baik untuk digunakan sendiri maupun untuk kerajinan yang diperjualbelikan.

Madu dibudidayakan masyarakat di atas pohon madu dengan menjaga kualitas ekologi di sekitar pohon madu. Pohon-pohon di sekitar pohon madu, secara adat, dilarang untuk ditebang karena akan mengganggu keberadaan komunitas lebah di pohon madu. Terdapat tiga pihak yang akan memperoleh hasil panen madu, yaitu pemilik pohon, pemanjat pohon madu dan para penggembira yang hadir di saat panen madu.

Bagi hasil dijalankan antara ketiga pihak tersebut dengan proporsi masing-masing mendapatkan bagian 1/3 dari hasil panen. Begitu melimpahnya sumber daya hutan pra konflik hingga seorang pemanjat pohon madu mampu memperoleh bagian madu ratusan liter per musim (2 kali setahun, setiap musim sekitar 2 bulan). Madu dijual dan juga digunakan untuk pemanis makanan/minuman sehingga saat itu masyarakat praktis tidak perlu membeli gula.

Kayu bakar selalu tersedia di hutan di masa pra konflik. Pada saat itu masyarakat tidak perlu membeli minyak tanah atau gas untuk keperluan memasak. *Leombo* dan hutan menyediakan kayu bakar yang lebih dari cukup ketika itu. Patut dicatat bahwa rumah tangga memiliki areal ladang, *leombo* dan hutan. Hak kepemilikan ini diatur oleh ketentuan adat dengan batas geografis yang jelas.

Hutan merupakan bagian dari budaya bagi masyarakat adat di sekitar hutan. Hutan menyediakan berbagai perangkat untuk upacara adat. Kayu ulin bukanlah komoditas yang diperjualbelikan karena kayu ulin digunakan untuk membangun rumah atau untuk keperluan upacara adat. Berbagai upacara adat dilakukan oleh masyarakat termasuk di dalamnya upacara paska kesembuhan anggota keluarga dari penyakit.

Terdapat berbagai tingkatan jenis binatang yang digunakan untuk upacara syukuran atas kesembuhan penyakit, yaitu ayam, babi dan kerbau. Urutan jenis hewan tersebut menunjukkan tingkatan seberapa besar upacara adat yang dilakukan dengan tingkatan tertinggi adalah kerbau. Peran kayu ulin di upacara adat digunakan sebagai alas persembahan. Kayu ulin dikenal sangat keras, namun waktu untuk berkembang memang lambat, sehingga dapat dibayangkan bahwa ketika kayu ulin melimpah, kualitas hutan pada saat itu demikian baik.

Ulap doyo, atau kain tenun khas masyarakat Dayak juga dibuat dari tumbuhan yang tumbuh di hutan. Zat pewarna alami juga diperoleh dari hasil hutan. Peralatan musik yang dimainkan di upacara adat dan asesoris hiasan untuk pakaian adat juga disediakan oleh hutan.

Pada titik ini, masyarakat hidup dalam sistem adat yang cenderung menjaga kelestarian hutan. Mereka cenderung mandiri dan tidak memerlukan subsidi apapun dari pemerintah karena semua kebutuhan hidup pada dasarnya terpenuhi dari alam di sekitarnya. Secara tradisional masyarakat adat adalah petani dan meski mereka belum tentu memegang uang, saat itu hutan menyediakan segalanya, mulai dari buah-buahan, sayuran, binatang

buruan, ikan yang melimpah, sumber air dan air sungai yang jernih, dan berbagai produk hutan lain seperti madu, rotan, kayu dll. Kondisi yang relatif sama juga berlaku bagi pendatang yang hadir melalui program transmigrasi. Tetapi tidak berlaku bagi pendatang yang bekerja sebagai pedagang.

Pada era tersebut, setiap rumah tangga memiliki akses yang sama terhadap sumber daya hutan. Potensi seseorang untuk melakukan akumulasi kapital, pada saat itu, tidak ditentukan oleh besarnya asset yang diwariskan oleh leluhur, namun pada kemauan dan keuletan untuk memanfaatkan sumber daya hutan.

Tantangan yang harus dihadapi rumah tangga untuk memenuhi kehidupan mereka adalah apakah rumah tangga memiliki kemauan atau tidak dan bukan pada kepemilikan aset. Dapat dipahami pula bahwa tingkat konsumsi primer rumah tangga pada saat itu sangat beragam, mulai dari berbagai jenis hewan, berbagai jenis sayuran dan buah-buahan.

Didasarkan pada kerangka jasa ekosistem, hasil wawancara dengan metode ZMET dan FGD menunjukkan bahwa keempat fungsi jasa ekosistem terobservasi dan sangat dirasakan manfaatnya oleh rumah tangga informan. Meski demikian, diantara ke-empat fungsi ekosistem tersebut, fungsi penyedia barang konsumsi dan fungsi kebudayaan relatif lebih terartikulasikan oleh para informan dibandingkan dengan dua fungsi ekosistem yang lain. Beberapa informan mengutarakan tingginya diversifikasi genetik serta fungsi ekosistem yang mampu menurunkan dampak perubahan alam secara ekstrem sebelum era datangnya para investor di daerah mereka.

Masuknya investor, terutama perkebunan kelapa sawit, memerlukan lahan yang luas untuk mengembangkan perkebunan mereka. Para investor memperoleh ijin usaha dari pemerintah daerah dan didukung oleh aparat keamanan karena mereka beroperasi berdasarkan hukum positif. Di sisi lain masyarakat adat pemilik lahan belum tentu memiliki landasan hukum positif terkait kepemilikan tanah mereka. Meski hukum adat mengatur ketat kepemilikan tanah beserta batas-batas geografisnya, namun hukum adat tidak tertulis dan memiliki pendekatan yang berbeda dengan hukum positif

yang serba mengedepankan fakta hukum tertulis.

Di sinilah sumber konflik bermula yaitu adanya benturan antara hukum positif dan hukum adat. Konflik vertikal yang tidak terelakkan terjadi dimana investor yang didukung pemerintah daerah dan aparat penegak hukum yang berlandaskan hukum positif, berhadapan dengan masyarakat yang berpegang pada hukum adat yang merupakan konvensi (hukum yang tidak tercatat).

Para informan menilai adanya kerjasama antara investor-aparat pemerintah daerah-aparat penegak hukum di dalam setiap konflik. Selama mereka mengalami konflik sejak tahun 1970an hingga sekarang, mereka mengeluhkan:

- a. Setiap kali demo tidak ada pihak perusahaan yang menemui mereka namun mereka berhadapan dengan aparat penegak hukum
- b. Pemerintah daerah dipandang menganak-emaskan investor dan ditengarai berperan di pihak investor
- c. Hal serupa juga ditengarai untuk aparat penegak hukum di daerah.

Ada indikasi masyarakat mengetahui terdapat praktik korupsi dan kolusi antara investor-aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Bahkan ada indikasi terjadinya *state captured corruption* pada penerbitan beberapa kebijakan daerah/ atau peraturan daerah.

Proses alih lahan dari masyarakat ke perusahaan seringkali dilakukan dengan cara yang tidak semestinya. *Land grabbing* seringkali terjadi akibat investor berkolusi dengan aparat pemda dan aparat desa dengan mudah memberikan pengakuan kepemilikan lahan secara hukum positif agar mudah berpindah tangan.

Hal ini diperparah oleh janji-janji betapa nikmatnya mengikuti program skema inti-plasma bagi para masyarakat pemilik tanah. Mereka dijanjikan akan memperoleh pendapatan rutin yang besar tanpa harus bekerja. Para petani pemilik lahan juga ditawarkan biaya pengganti hak guna sebesar Rp3 juta/ha, meski kontrak akad sepenuhnya mengikuti aturan perusahaan.

Jika tanaman sawit di program inti-plasma telah berbuah, para petani juga dijanjikan memperoleh pendapatan rutin yang tinggi setelah dikurangi biaya operasi dan fee koperasi. Uang transaksi Rp3 juta/ha/bulan diserahkan kepada pemilik tanah, namun setelah itu praktis petani kehilangan akses ke tanahnya. Bahkan banyak petani yang tidak mengetahui apakah perjanjian tanah tadi berupa hak guna atau Sertifikat Hak Milik (SHM). Janji pendapatan rutin dan tinggi tidak terjadi.

Fakta di lapangan menunjukkan benar petani mendapat pendapatan rutin namun sangat kecil yaitu Rp50 ribu/ha/bulan dengan sistem pembayaran dilakukan per tiga bulan sekali. Setelah program inti-plasma berjalan, para masyarakat kecewa karena pendapatan tinggi yang dijanjikan tidak pernah terjadi.

Berbagai masalah tersebut di atas memicu konflik vertikal antara perusahaan dengan masyarakat. Berkaca dari pengalaman di masa lalu yaitu pada era 1990-an, saat ini banyak keluarga tidak lagi ingin mengikuti program inti-plasma. Konflik juga sering terjadi antara petani anggota inti-plasma dengan perusahaan. Konflik juga terjadi antara perusahaan-perusahaan sawit yang baru memperoleh ijin usaha dengan masyarakat yang menolak kehadiran investor karena cara-cara yang mereka gunakan terbukti merugikan petani.

Perlu dicatat bahwa dari ketika wilayah konflik, Desa Muara Tae di Kabupaten Kutai Barat merupakan wilayah yang paling steril dari operasi perkebunan kelapa sawit. Masyarakat desa di sana selalu menolak untuk mengikuti program inti-plasma. Konflik antara masyarakat dengan perusahaan sawit terjadi hampir setiap tahun sejak tahun 1995. Konflik terakhir di kawasan tersebut terjadi di tahun 2016 ketika masyarakat yang menolak mengikuti program inti-plasma atau tidak mau menjual tanahnya berhadapan dengan elemen masyarakat lain yang mendukung perusahaan.

Perkembangan konflik menjadi semakin kompleks ketika kehadiran investor menciptakan pro dan kontra di antara elemen masyarakat. Perusahaan kemudian menggunakan dana CSR untuk memperuncing situasi dengan memberikan CSR kepada daerah yang mendukung keberadaan investor dan tidak memberikan CSR ke daerah yang menolak investor.

Hal ini pun diikuti pula oleh aparat pemerintah daerah yang mempersulit pelayanan administrasi bagi warga yang menolak investor seperti halnya KTP yang tidak segera jadi. Tidak jarang terjadi perusahaan sengaja menjamu para tokoh masyarakat yang selama ini mendukung kehadiran mereka dengan kunjungan ke daerah-daerah wisata. Bahkan tokoh yang semula menolak juga mereka berikan pelayanan ekstra seperti ini agar kemudian berubah pikiran dan menerima kehadiran perusahaan.

Konflik yang semula bersifat vertikal kemudian berubah menjadi kompleks ketika berkembang konflik horizontal antar anggota masyarakat. Eskalasi konflik antara masyarakat yang pro dan kontra terhadap kehadiran investor meningkat ketika perusahaan hanya menyalurkan dana CSR kepada kelompok masyarakat yang pro kepada perusahaan.

Konflik ini tidak saja membuat hubungan antar warga menjadi kurang harmonis, bahkan di level keluarga pun tidak jarang terjadi perpecahan. Mulai terjadi polarisasi di dalam masyarakat dan terjadi pemisahan antara masyarakat yang menolak dan yang mendukung investor. Hubungan kemasyarakatan yang semula harmonis menjadi penuh kecurigaan dan pertemuan kampung tidak lagi seharmonis dulu.

Informan mampu menjelaskan berbagai dampak positif maupun negatif dari kehadiran para investor. Mereka mengakui adanya pembangunan ekonomi di daerahnya, namun demikian sebagai petani mereka sangat dirugikan karena mereka kehilangan tanah pertanian dan kehilangan akses ke sumber daya terutama hutan dan air sungai. Hutan dan sungai menyediakan berbagai sumber daya untuk mata pencaharian hingga aspek budaya mereka. Terdapat kecenderungan masyarakat adat di sekitar kawasan hutan tidak memiliki kemampuan memadai untuk berpindah dari profesi sebagai petani. Mereka menjadi petani secara turun-temurun. Kondisi ini berbeda dengan para pendatang di daerah mereka yang umumnya berprofesi bukan sebagai petani.

Dampak lain dari aktifitas perkebunan kelapa sawit adalah hilangnya hutan dan penurunan kualitas air sungai yang selama ini menyediakan sumber daya bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

- a. Hutan menyediakan makanan: hewan buruan (babi hutan, landak, kancil, rusa, kijang, burung-burung), berbagai buah-buahan, sayuran, dan madu. Musim babi hutan terjadi sebanyak 2 kali setahun bersamaan dengan musim buah. Babi hutan diperoleh dengan cara diperangkap, dan dalam musim babi tiap rumah tangga pasti menangkap babi setiap hari. Sementara itu musim madu juga terjadi sebanyak 2 kali setahun dengan durasi per musim selama 2 bulan. Setiap pemilik pohon madu, pemanjat dan penggembira masing-masing membagi hasil sebanyak satu per tiga. Seorang pemanjat pohon madu bisa memperoleh bagian ratusan liter madu sekali musim.
- b. Hutan menyediakan komoditas ekonomi: rotan dan madu adalah komoditas ekonomi. Ulap doyo adalah produk turunan yang dapat dijual dari hasil hutan. Kayu tidak dijual karena kayu dibutuhkan untuk rumah dan upacara adat.
- c. Hutan menyediakan obat-obatan: berbagai jenis kayu dan akar serta daun dapat digunakan sebagai obat-obatan.
- d. Hutan menyediakan alat pendukung upacara adat dan membangun rumah yaitu kayu ulin. Kayu ulin menempati tempat sakral dalam upacara. Upacara masyarakat adat terkait dengan penyembuhan menyuguhkan hewan kurban mulai dari kurban yang paling kecil yaitu ayam, babi hingga terakhir kerbau. Untuk kurban babi dan kerbau biasanya beberapa rumah tangga saweran untuk melakukan hajatan. Namun semua rangkaian upacara ini memerlukan kayu ulin sebagai media upacara.
- e. Hutan adalah area untuk membuka ladang yang menghasilkan tanaman pangan terutama padi tadah hujan. Ladang dimungkinkan berpindah, namun *lembo* dan kebun tidak berpindah. Ladang merupakan *common resources* dimana ladang yang sudah ditinggalkan orang bisa digunakan orang lain jika lahan tersebut dibiarkan.
- f. Sungai menyediakan banyak hal seperti untuk kebutuhan air minum, mandi dan masih menyediakan hasil sungai untuk dikonsumsi. Setiap hari masyarakat bisa makan ikan asalkan rajin memancing. Untuk kebutuhan lauk setiap anak-anak bisa memancing untuk memenuhi kebutuhan makan sendiri. Sedangkan untuk kebutuhan dagang atau dijual, masyarakat biasanya mengeringkan ikan terlebih dahulu.

Hasil wawancara metode ZMET dan FGD di atas menunjukkan bahwa salah satu dampak konflik adalah adanya perubahan komoditas yang dikonsumsi oleh masyarakat. Di masa pra konflik, rumah tangga cenderung mengkonsumsi makanan dengan jenis yang beragam, namun setelah konflik terjadi jenis barang yang dapat dikonsumsi turun drastis. Sebelum kehadiran perusahaan sawit, hutan menyediakan komoditas konsumsi yang beragam dan melimpah dan setiap rumah tangga memiliki akses yang sama terhadap sumber daya hutan.

Namun dengan kehadiran perusahaan kelapa sawit, lahan hutan menyempit, sehingga hampir semua komoditas keperluan hidup harus dipenuhi dengan membeli. Konsekuensi logis dari hal ini adalah penurunan jumlah dan kuantitas konsumsi mengingat konsumsi suatu barang hanya dapat dilakukan ketika rumah tangga memiliki uang.³⁷

Dampak negatif dari kehadiran perkebunan sawit yang dirasakan oleh masyarakat adalah:

- a. Paska mengikuti program inti-plasma banyak masyarakat kehilangan ladang/kebun. Sementara itu mereka tidak bisa dengan mudah pindah ke profesi lain selain petani. Di Muara Tae, telah bermunculan toko dan warung namun pada umumnya diusahakan oleh pendatang. Bagi pendatang peningkatan aktifitas tambang/sawit menguntungkan mereka, namun para petani mengalami masalah yang pelik akibat mereka belum tentu dapat mengikuti transformasi ke modernitas. Di Desa Trimulya bahkan pernah berada dalam satu periode dimana hampir seluruh laki-laki bekerja menjadi buruh tani di luar desa, sehingga hanya tersisa para perempuan dan anak di desa.
- b. Jika dahulu mereka bisa hidup mandiri dengan ladang dan hutan serta sungai, maka sekarang mereka membutuhkan subsidi. Dahulu masyarakat dapat mengakses secara gratis dan hanya memerlukan

37 Perubahan keranjang barang konsumsi akibat konflik juga dilaporkan oleh Keegan (2011), meskipun jenis konflik yang diteliti bukanlah terkait dengan konflik tanah dan perkebunan sawit. Berdasarkan pada konteks peperangan, Hess (2012) melaporkan bahwa biaya konflik bermuara pada dua aspek: a) perubahan pola konsumsi; dan, b). meskipun sulit untuk dikuantifikasi, adalah biaya emosi dan kesengsaraan, keterpaksaan untuk mengungsi dan bahkan kemungkinan terbunuh.

usaha untuk mengakses sumber daya tersebut. Namun sekarang hampir semua sumber daya hanya dapat diakses dengan uang. Yang menjadi permasalahan bagi masyarakat yang merupakan petani adalah uang tunai. Tanpa adanya uang, mereka tidak bisa mengkonsumsi komoditas yang dulunya mereka peroleh secara gratis (tanpa menggunakan uang tunai).

- c. Muncul *property right* setelah adanya perkebunan kelapa sawit akibat kelangkaan lahan. Dulu pertanian lahan berpindah menimbulkan masalah jika dilakukan namun saat ini dengan adanya keterbatasan lahan maka ladang berpindah tidak dapat dilakukan karena akan melanggar wilayah tanah orang lain. Pendekatan gotong royong yang dahulu banyak dilakukan, sekarang cenderung digantikan dengan menggunakan pendekatan transaksional. Kejahatan merebak akibat kelangkaan lahan dan terbatasnya akses masyarakat ke hutan dan sungai. Konflik berbasis lahan antar masyarakat juga meningkat akibat transisi dari sistem adat ke hukum konvensional yang seringkali tidak terjadi dengan baik.

Pada bagian akhir dari wawancara ZMET, sebagian besar informan menjelaskan asa yang mereka miliki. Pada titik ini terdapat dua asa yang mungkin bertolak belakang atau bahkan disebut *mixed feeling*. Di satu sisi sebagian besar informan pada umumnya mempertanyakan masa depan mereka dan anak-cucu mereka. Mereka mengatakan bahwa saat ini masih bisa bertahan, namun sejalan dengan usia, mereka tentu tidak dapat melakukan perlawanan lagi terhadap korporasi sawit. Mereka sangat mengkhawatirkan masa depan anak-anak mereka karena penguasaan lahan semakin sempit. Modernitas yang terjadi akibat masuknya investasi menyebabkan semua harus dinilai dengan uang. Sebagai petani, kepemilikan lahan mereka semakin menyempit dengan adanya peningkatan investor sawit yang membutuhkan lahan luas.

Di sisi lain, para informan memiliki kepercayaan yang besar terhadap pemerintah pusat. Dua lembaga yang sering disebut-sebut dan menjadi pusat kepercayaan masyarakat adalah Presiden dan KPK. Mereka sangat berharap Presiden dan KPK dapat turun tangan di kawasan mereka dan menyelesaikan konflik tersebut. Mereka mengakui kinerja KPK di tingkat

nasional, hanya saja mereka mempertanyakan mengapa KPK belum hadir di daerah mereka. Presiden Jokowi sangat dipercaya oleh masyarakat sebagai tokoh yang mampu membantu mereka menyelesaikan konflik dan menindak para pengusaha dan aparat yang tidak bekerja sebagaimana mestinya.

5 BIAYA KONFLIK

Dalam kajian ini, biaya konflik dimanifestasikan ke dalam dua unsur utama yaitu: a) biaya langsung (*direct costs*), dan b) biaya tidak langsung (*indirect costs*). Biaya langsung diestimasi melalui dua pendekatan yaitu akuntansi biaya dan *choice model*, dimana pendekatan akuntansi biaya bertujuan untuk mengukur biaya eksplisit (biaya yang dikeluarkan secara aktual dan disadari), sedangkan *choice model* digunakan dalam pengukuran biaya implisit (biaya yang tidak dikeluarkan secara aktual oleh rumah tangga).

Di sisi lain, biaya tidak langsung tidak dapat dikuantifikasi secara ekonomi, maka dari itu diestimasi dalam bentuk persepsi rumah tangga terhadap berbagai perubahan sosial yaitu:

- a. Akses dan biaya pendidikan,
- b. Akses dan biaya kesehatan,
- c. Aspek kriminalitas,
- d. Kualitas lingkungan hidup; dan
- e. Kepastian masa depan.

Dua elemen biaya pertama dihitung secara kuantitatif sementara elemen biaya terakhir diestimasi melalui pendekatan kualitatif.

5.1. Statistik Deskriptif

Survei yang dilakukan meliputi 217 responden yang merupakan sampel dari 3 wilayah yaitu 74 responden dari Jambi, 66 responden dari Kalimantan Barat dan 72 responden dari Kalimantan Timur. Distribusi gender menunjukkan 53.77% dari responden adalah wanita dan 46.23% adalah pria (lihat Tabel C.1. di Lampiran C). Perlu dicatat bahwa di tiap daerah, sebanyak 40 rumah tangga dipilih sebagai responden, namun wawancara dilakukan baik kepada suami maupun istri, kecuali responden adalah orang tua tunggal.

Didasarkan pada aspek pendidikan, mayoritas responden berpendidikan setara SD/MI (37.44%), diikuti responden yang tidak pernah bersekolah (33.18%). Hanya ada dua responden yang memiliki tingkat pendidikan tertinggi di taman kanak-kanak dan pada dasarnya mereka dapat diklasifikasikan sebagai tidak pernah sekolah. Tercatat sebesar 13.74% responden mengenyam bangku SMP, diikuti oleh SMA sebesar 10.43% dan perguruan tinggi (PT) sebesar 4.27% (lihat Tabel C.2. di Lampiran C. Untuk jumlah anggota keluarga per rumah tangga, rata-rata dari ketiga daerah memiliki empat orang anggota keluarga (lihat Tabel C.3 di Lampiran C).

Tabel 2. Identifikasi Korban Konflik Didasarkan Pada Persepsi Responden Survei

Area	Tidak Langsung	Langsung	Total
<i>Jambi</i>	27	52	79
	34.18%	65.82%	100%
<i>Kalimantan Barat</i>	26	40	66
	39.39%	60.61%	100%
<i>Kalimantan Timur</i>	15	29	44
	34.09%	65.915	1005
<i>Total</i>	68	121	189
	35.98%	64.02%	100%

sumber: Data primer, diolah

Secara umum, sebesar 64.02% dari responden mengidentifikasi diri mereka sebagai korban langsung dari konflik lahan yang terjadi di daerahnya. Angka ini tidak berbeda secara signifikan antar daerah sampel. Tercatat 61 responden perempuan dari total 98 responden perempuan (62,24%) menyatakan bahwa mereka adalah korban langsung dari konflik. Konfigurasi serupa terjadi untuk laki-laki yaitu 57 responden dari total 86 responden laki-laki (66,28%) merasa sebagai korban langsung dari konflik (lihat Tabel C.4 di Lampiran C). Didasarkan pada tingkat pendidikan, berturut-turut sebanyak 68 dan 24 responden berpendidikan SD/SMP (72,34%) dan SMA/PT (77,42%) merasa sebagai korban langsung konflik. Sedangkan untuk responden yang tidak sekolah, tercatat sebanyak 29 responden (45,31%) merasa mereka sebagai korban langsung konflik (lihat tabel C.5 di Lampiran C).

5.2. Pembelian Barang Konsumsi

Berdasarkan hasil wawancara ZMET, salah satu dampak konflik akibat kehadiran perusahaan kelapa sawit adalah hilangnya hutan dan fungsinya sebagai penyedia bahan kebutuhan hidup masyarakat di sekitar hutan. Di masa pra konflik, keberadaan hutan mendukung sebagian besar kebutuhan masyarakat. Perbedaan latar belakang ekonomi antar anggota masyarakat, misalnya kaya atau miskin, tidak mempengaruhi akses masyarakat dalam mengakses sumber daya yang dihasilkan hutan. Pada saat itu hanya diperlukan usaha bagi masyarakat untuk memperoleh sebagian besar barang konsumsi sehari-hari tersebut tanpa perlu terlibat kegiatan transaksi jual-beli.

Namun demikian pasca terjadinya konflik tanah dan sumber daya alam yang terkait dengan keberadaan perusahaan kelapa sawit, hampir semua kebutuhan hidup harus dibeli dengan uang. Proses transformasi pemenuhan konsumsi dari yang semula sebagian besar kebutuhan diambil dari alam lalu harus menggunakan sistem transaksi jual-beli untuk semua kebutuhan konsumsi, bukanlah hal yang mudah bagi masyarakat. Penurunan fungsi hutan akibat konflik berbanding terbalik dengan peningkatan adaptasi rumah

tangga memenuhi kebutuhannya dengan melakukan aktivitas transaksi jual-beli. Pada titik ini, upaya pemenuhan kebutuhan berbanding lurus dengan latar belakang ekonomi rumah tangga (kaya atau miskin). Semakin miskin rumah tangga, maka semakin kecil kemampuan rumah tangga membeli keperluan konsumsi karena hampir semua keperluan konsumsi harus dibeli.

Transformasi perubahan pola pemenuhan konsumsi tersebut tidak pernah diantisipasi masyarakat ataupun ada upaya pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat menghadapi perubahan tersebut. Adaptasi yang dilakukan rumah tangga sebagai reaksi terhadap perubahan lingkungan yang dialami dilakukan tanpa ada perhatian maupun bantuan dari pemerintah selama proses transformasi terjadi. Kalaupun terdapat peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, hal tersebut merupakan akibat dari kebijakan di tingkat pusat dan bukan karena kebijakan akibat kondisi yang berkembang di area konflik.

Perlu dicatat bahwa masyarakat adat pada umumnya adalah petani dan profesi ini sudah digeluti turun-temurun. Keahlian untuk menjadi pedagang umumnya tidak dimiliki masyarakat adat. Keahlian sebagai pedagang dimiliki oleh sebagian besar pendatang yang kemudian tinggal di daerah tersebut. Permasalahan bagi masyarakat adat cukup kompleks mengingat walaupun petani mampu mempertahankan kepemilikan lahannya, namun daya tawar atau nilai tukar komoditas petani pada umumnya mengalami penurunan. Dengan kata lain, daya beli yang dihasilkan dari komoditas produksi petani memiliki nilai tukar yang menurun, sehingga kesejahteraan petani mengalami penurunan meskipun dalam keadaan normal tanpa konflik. Kondisi menjadi lebih buruk bagi kelompok rumah tangga petani yang kehilangan lahannya akibat keberadaan perkebunan kelapa sawit.

Dampak konflik yang langsung dirasakan masyarakat di tiga wilayah konflik adalah penurunan kualitas dan kuantitas konsumsi barang primer. Di masa pra konflik, hewan buruan, sayur-mayur, buah-buahan, air bersih, madu dan bahan obat-obatan tradisional, tersedia dalam berbagai jenis. Di masa itu kemampuan untuk mengakses sumber daya tersebut ditentukan hanya oleh kemauan masyarakat saja. Paska terjadinya konflik, hampir semua kebutuhan

konsumsi primer harus dibeli. Terjadi penurunan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi jenis maupun kuantitas barang yang dapat dikonsumsi. Babi hutan, rusa, kijang, landak, beberapa jenis burung dan berbagai jenis ikan dengan mudah ditangkap dan dikonsumsi pra konflik.

Namun saat ini, sebagian besar hewan buruan tersebut sulit ditemui lagi, dan kalau pun dapat dikonsumsi maka rumah tangga harus membelinya. Permasalahannya, paska terjadinya konflik mereka hanya bisa mengkonsumsi saat memiliki uang, sehingga ketika musim buah-buahan tiba, rumah tangga yang tidak memiliki kebun/*lembo* belum tentu menikmati buah-buahan karena tidak memiliki uang untuk membeli buah. Kondisi ini terjadi pula untuk barang konsumsi lain seperti buah, madu, sayur-mayur, dll.

Tabel 3. Total Konsumsi Primer - Sekunder dan Proporsi Konsumsi Primer Paska Konflik (Kini Beli) per KK per Bulan, per Wilayah.

Area	Total Konsumsi (Primer-Sekunder)/KK/Bulan	Total Konsumsi Primer/KK/Bulan	Nilai Konsumsi Primer (bagian dari A yang kini beli)/KK/Bulan	Proporsi
	A	B	C	C/B
Jambi	Rp3.215.478	Rp 2.975.045	Rp 880.025	29,58%
N	40	40	40	
Kalimantan Barat	Rp6.944.057	Rp 6.230.897	Rp 2.595.040	41,65%
N	40	40	40	
Kalimantan Timur	Rp5.739.798	Rp5.393.080	Rp1.931.954	35,82%
N	40	40	40	
Total	Rp5.375.991	Rp4.934.074	Rp1.815.146	36,79%
N	120	120	120	

Tabel 3 menunjukkan bahwa saat ini rata-rata, sebesar 36.79% dari nilai komoditas konsumsi masyarakat bisa didapatkan tanpa harus membeli di masa lalu (pra konflik). Angka ini dapat diartikan sebagai biaya peluang (*opportunity cost*) yang ditanggung masyarakat akibat saat ini harus membeli

komoditas tersebut dibandingkan di masa lalu dimana komoditas tersebut bisa didapatkan secara gratis. Tentu saja proporsi tersebut berbeda-beda di setiap wilayah konflik.

Dampak tersebut tertinggi terjadi di wilayah konflik di Kalimantan Barat yakni sebesar 41.65%, diikuti oleh Kalimantan Timur sebesar 35.82% dan Jambi sebesar 29.58%. Kontraksi konsumsi di ketiga daerah konflik tersebut tidak dapat dikatakan kecil. Jika dibandingkan dengan kondisi di saat krisis ekonomi pada tahun 1998, Indonesia mengalami penurunan GDP/kapita sekitar 15% dan dampak akibat krisis tersebut menjadi trauma bagi yang pernah mengalaminya. Penurunan tingkat konsumsi sebesar rata-rata 29,58%-41,65% adalah signifikan bagi rumah tangga.

Perlu dicatat bahwa estimasi di tabel 3 dilakukan dengan pendekatan *minimum irreducible estimation*. Hasil estimasi di tabel 3 menggambarkan minimum penurunan kesejahteraan yang dialami rumah tangga, sementara nilai sesungguhnya dari penurunan kesejahteraan lebih tinggi daripada nilai estimasi tersebut. Namun demikian tidak ada data baseline terkait dengan barang konsumsi yang akurat yang dapat digunakan sebelum pra konflik. Dengan demikian estimasi yang dapat dilakukan hanya berdasarkan pada tingkat konsumsi saat ini. Estimasi perhitungan dampak konflik ke konsumsi primer belum memperhitungkan penurunan jenis barang konsumsi, misalnya ada berbagai jenis landak, rusa, burung dan ikan yang dulu dapat dikonsumsi namun saat ini tidak dapat dikonsumsi sama sekali.

Perlu dicatat bahwa intensitas penurunan tingkat konsumsi di atas adalah gambaran yang terjadi pada saat dilakukan survei di lapangan. Analisis di atas tidak lebih sebagai hasil analisis statis, namun belum memperhitungkan analisis dinamis yang memperhitungkan akumulasi penurunan konsumsi sejak konflik terjadi hingga sekarang. Jika analisis *intertemporal* dilakukan, maka dampak konflik terhadap tingkat konsumsi primer tentunya sangat besar. Permasalahan semakin kompleks mengingat masyarakat akan menanggung dampak tersebut di masa datang. Sejalan dengan berjalannya waktu, tentu saja akumulasi biaya ini akan terus meningkat.

Tabel 4. Total Konsumsi Primer – Sekunder dan Proporsi Konsumsi Primer Paska Konflik (Kini Beli) per KK per Bulan, per Kepemilikan Kebun Sawit.

Area	Total Konsumsi (Primer-Sekunder)/KK/Bulan	Total Konsumsi Primer /KK/Bulan	Nilai Konsumsi Primer (bagian dari A yang dahulu tidak harus beli) /KK/Bulan	Proporsi
	A	B	C	C/B
<i>Tidak Punya</i>	Rp4.919.640	Rp4.536.854	Rp1.451.617	29,51%
<i>N</i>	67	67	67	
<i>Punya</i>	Rp5.746.519	Rp5.248.334	Rp2.146.290	37,35%
	53	53	53	
<i>Total</i>	Rp5.296.543	Rp4.861.157	Rp1.788.321	33,76%
<i>N</i>	120	120	120	

Tabel 4 menunjukkan proporsi nilai konsumsi yang dulu tidak perlu dibeli namun sekarang harus dibeli oleh rumah tangga berdasarkan kepemilikan kebun sawit rata-rata adalah sebesar 33,76%. Keluarga yang tidak memiliki kebun sawit dan/atau tidak mengikuti program inti-plasma, cenderung memiliki proporsi konsumsi primer (kini beli) sebesar 29,51%. Proporsi ini lebih rendah daripada proporsi bagi rumah tangga pemilik kebun dan/atau peserta inti-plasma sebesar 33,76%.

Pertanyaan mendasar yang muncul adalah mengapa rumah tangga pemilik kebun sawit/peserta inti-plasma justru memiliki proporsi konsumsi primer (kini beli) yang lebih tinggi daripada rumah tangga non-pemilik/non-peserta inti plasma. Informasi yang dikumpulkan belum mendukung tim peneliti untuk memastikan faktor yang menyebabkan fenomena ini. Eksplorasi lebih lanjut perlu dilakukan di masa depan untuk menyelidiki mengapa fenomena ini terjadi.

Tabel 5 menunjukkan proporsi beban konsumsi primer yang kini harus dibeli oleh rumah tangga responden berdasarkan tingkat pendidikan kepala keluarga. Dampak konflik terhadap konsumsi primer rumah tangga responden berbanding lurus dengan tingkat pendidikan. Rumah tangga responden dengan tingkat pendidikan kepala keluarga SMA/PT harus menanggung proporsi konsumsi primer sebesar 74,59% yang saat ini harus dipenuhi melalui transaksi (jual-beli).

Proporsi ini sangat tinggi dan diperlukan kehati-hatian untuk menganalisis hasil ini mengingat jumlah keluarga yang berada di kelompok ini kurang dari 30 (syarat untuk sampel besar). Terlepas dari kendala statistik tersebut, angka ini jauh di atas angka rata-rata proporsi indikator yang sama yaitu 36,82%. Proporsi tersebut menunjukkan biaya oportunitas yang muncul akibat konflik yang ada.

Tabel 5. Total Konsumsi Primer, Sekunder dan Proporsi Konsumsi Primer Paska Konflik (Kini Beli) per KK per Bulan, per Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga.

Pendidikan Kepala KK	Total Konsumsi (Primer-Sekunder)/KK/Bulan	Total Konsumsi Primer /KK/Bulan	Nilai Konsumsi Primer (bagian dari A yang dahulu tidak harus beli) /KK/Bulan	Proporsi
	A	B	C	C/B
<i>Tidak Sekolah/TK</i>	Rp3.407.628	Rp3.234.302	Rp1.058.127	32,72%
<i>N</i>	32	32	32	
<i>SD/SMP</i>	Rp4.717.363	Rp4.248.812	Rp987.966	23,25%
<i>N</i>	60	60	60	
<i>SMA/PT</i>	Rp8.515.765	Rp7.922.699	Rp5.909.733	74,59%
<i>N</i>	28	28	28	
<i>Total</i>	Rp4.951.766	Rp4.556.409	Rp1.677.477	36,82%
<i>N</i>	120	120	120	

Tabel 6 mengeksplorasi mengenai besarnya senjang pendapatan yang terjadi akibat perbedaan tingkat pendidikan responden.³⁸ Untuk mengetahui nilai dari potensi pendapatan (konsumsi) tahunan yang hilang akibat putus sekolah, kami mengestimasi perbedaan pendapatan (konsumsi) dari rumah tangga dengan cara membandingkan tingkat konsumsi per kapita di rumah tangga antar kepala keluarga dengan tingkat pendidikan berbeda-beda. Perbedaan nilai kemudian digunakan untuk mengestimasi dampak putus sekolah terhadap konsumsi per kapita tahunan.

Tabel 6. Income Gap Berdasarkan Pendidikan

	Income Gap SD-SMP	Income Gap SMP-SMA	Income Gap SMA-PT
<i>Total</i>	-5,837,265.00	4,498,680.00*	15,991,844.32*

*: signifikan pada 10%

Tabel 6 ini menunjukkan perbedaan pendapatan (income gap) antara lulusan SD dan SMP yaitu minus Rp5.837.265,00 per tahun, namun demikian angka ini tidak signifikan secara statistik. Dengan kata lain, bahwa pendapatan rumah tangga responden antara yang berpendidikan SD dan SMP (tingkat pendidikan wajib belajar) tidak dapat dibedakan secara statistik.

Perbedaan pendapatan cenderung positif ketika terjadi fenomena putus sekolah untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan hasil ini sesuai dengan ekspektasi. Seseorang yang putus sekolah di jenjang SMA secara rata-rata kehilangan kesempatan konsumsi perorangan sebesar Rp4.498.680 per tahunnya. Angka ini lebih tinggi bagi mereka yang harus putus pendidikan di level perguruan tinggi, dimana artinya ia harus kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan (konsumsi) sebesar Rp15.991.844,32 per tahunnya.

38 Putus sekolah tidak ditemukan di Kalimantan Barat maupun di Kalimantan Timur, namun ditemukan dalam hasil FGD di Jambi.

5.3. Valuasi Ekonomi Dampak Konflik Terhadap Ketersediaan Air, Tanaman Obat dan Kerukunan Sosial

Estimasi biaya konflik terhadap lingkungan idealnya dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan semua faktor jasa lingkungan (*ecosystem services*). Hasil wawancara ZMET dan FGD menunjukkan bahwa para informan menyebutkan bahwa konflik lahan yang terjadi berdampak negatif kepada hampir semua faktor jasa lingkungan.

Namun demikian faktor penyedia bahan dan faktor budaya yang dirasakan paling menonjol. Diantara berbagai elemen yang diartikulasikan oleh informan melalui wawancara ZMET dan FGD, peneliti memilih tiga aspek utama yaitu ketersediaan air, tanaman obat dan kerukunan sosial.

Pilihan analisis valuasi ekonomi mengerucut pada tiga aspek tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan biaya konflik minimum sehingga faktor yang paling dirasakan informan rumah tangga selama wawancara ZMET dan FGD dapat menjadi acuan. Kedua, teknik *choice model* cukup kompleks dan responden terpaparkan untuk melakukan pilihan berganda (*pair-wise choices*) dari kombinasi antar elemen yang ingin divalusi. Kompleksitas muncul mengingat tambahan jumlah pertanyaan pilihan berganda tidak bersifat linear namun cenderung eksponensial untuk setiap tambahan elemen yang divalusi.

Implikasi dari hal ini adalah adanya peningkatan jumlah dari elemen yang ingin divalusi. Oleh karena itu diperlukan responden dengan tingkat kemampuan kognitif yang lebih tinggi pula. Fakta di lapangan menunjukkan variasi yang tinggi dari kemampuan kognitif informan rumah tangga dan hal ini terobservasi ketika peneliti melakukan wawancara ZMET dan FGD. Untuk mengatasi kompleksitas di atas, maka pilihan elemen yang dilakukan valuasi dengan teknik *choice model* terbatas pada ketiga elemen tersebut.

Pendekatan *choice model* memungkinkan peneliti dalam mencari nilai yang bersedia dibayarkan oleh responden terhadap suatu atribut tertentu, tanpa

harus bertanya secara langsung mengenai berapa nilai tersebut. Angka yang dihasilkan dari model ini memiliki istilah teknis yakni *willingness to pay* (WTP) yakni nilai uang tertinggi yang bersedia dibayar responden untuk mendapatkan barang tertentu, dan/atau *willingness to accept* (WTA) yakni nilai uang terendah yang bersedia diterima responden untuk kehilangan suatu barang. Dua istilah ini merupakan penjabaran lebih teknis dari konsep biaya peluang (*opportunity cost*).

Tabel 7. Hasil Estimasi Model Mixlogit untuk Ekstraksi WTP

VARIABLES	(1) Mean	(2) SD
<i>Price</i>	1.50e-06*** (4.52e-07)	
<i>Air</i>	2.045*** (0.339)	3.246*** (0.399)
<i>tanaman obat</i>	0.242 (0.340)	-0.581 (2.556)
<i>social_capital</i>	0.0555 (0.360)	0.0125 (0.609)
<i>Observations</i>	2,098	2,098

Standar errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Sumber: Data primer, diolah.

Berdasarkan hasil estimasi menggunakan *model mixlogit*, didapatkan koefisien dari ketiga variabel random beserta koefisien harga. Koefisien harga dan kondisi air signifikan secara statistik berada pada level 5%, yang menandakan bahwa dua faktor tersebut adalah komponen yang paling diperhatikan atau diprioritaskan oleh responden/sampel pada saat melakukan pemilihan di kuesioner *choice model*.

Nilai yang tidak signifikan mengindikasikan bahwa responden cenderung tidak memperhatikan aspek tersebut sebagai faktor utama dalam pemilihan jawaban. Perlu diperhatikan bahwa jumlah observasi pada tabel di atas

bukanlah merupakan jumlah sampel yang ditanyakan, melainkan total jawaban yang diberikan oleh sampel.

Tabel 8. Hasil Estimasi WTP untuk setiap komponen, data agregat tiga wilayah.

	<i>Air</i>	<i>Tanaman obat</i>	<i>social_capital</i>
<i>WTP</i>	-Rp1,361,971***	-Rp161,345	-Rp36,975
<i>Lower limit</i>	-2,325,712.7	-625,247.31	-517,789.07
<i>Upper limit</i>	-398,229.52	302,557.31	443,839.65

Sumber: Data primer, diolah.

Didasarkan pada Tabel 8, responden di ketiga lokasi memiliki nilai WTP sebagai berikut:

- Sampel di ketiga lokasi bersedia membayar sebesar Rp1.361.971 per bulan agar bisa merasakan ketersediaan air seperti kondisi sebelum adanya konflik, dibandingkan kondisi saat ini yaitu penurunan kualitas dan ketersediaan. Atau, dengan kata lain, harga dari ketersediaan air adalah sebesar Rp1.361.971.
- Sampel di ketiga lokasi bersedia membayar sebesar Rp161.345 per bulan agar bisa mendapatkan tanaman obat seperti kondisi sebelum adanya konflik, dibandingkan dengan kelangkaan yang dihadapi saat ini. Namun, perlu diperhatikan, angka ini tidak signifikan secara statistik.
- Sampel di ketiga lokasi bersedia membayar sebesar Rp36.975 per bulan untuk merasakan ketertiban dan kerukunan masyarakat seperti kondisi sebelum adanya konflik. Namun, perlu diperhatikan, angka ini juga tidak signifikan secara statistik.

Analisis lebih lanjut dilakukan untuk melakukan *estimasi mixlogit* di ketiga daerah konflik seperti tertera di Tabel 9. Hasil regresi menunjukkan ketersediaan air menjadi pertimbangan utama bagi responden di ketiga daerah dalam memilih pilihan di *choice model* (signifikan pada level 1%). Sementara faktor ketersediaan tanaman obat dan kondisi modal sosial tidak signifikan secara statistik sebagai faktor yang penting dipertimbangkan dalam pemilihan *choice model*. Hal ini menunjukkan di antara ketiga masalah yang dihadapi masyarakat di daerah konflik, maka isu degradasi kualitas

dan ketersediaan air merupakan masalah utama yang menyita perhatian masyarakat.

Tabel 9. Estimasi Mixlogit per Wilayah Survei

VARIABLES	Jambi		Kalimantan Timur		Kalimantan Barat	
	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
<i>Price</i>	1.31e-06*		-1.67e-06		1.39e-06	
	(7.30e-07)		(4.63e-06)		(2.68e-06)	
<i>Air</i>	1.996***	1.542***	0,686	4.955***	2.796***	3.338***
	(0.350)	(0.376)	(0.736)	-1.116	(0.895)	(0.831)
<i>Tanaman obat</i>	-	-	-	-	1.187	-0.723
					(0.744)	-1.492
<i>Modal sosial</i>	-0.428	-0.507	0,197	0,247	0,572	1.613
	-1.494	-1.011	(0.584)	(0.735)	(0.876)	(0.988)
<i>Observations</i>	768	768	688	688	652	652

Note: Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Sumber: Data primer, diolah

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 9, terdapat perbedaan tanda koefisien antara beberapa wilayah, seperti negatif untuk Kalimantan Timur dan positif untuk Jambi dan Kalimantan Barat. Perbedaan ini patut diakui menjadi indikasi adanya perbedaan persepsi masyarakat dalam memandang biaya, baik melalui mekanisme WTP maupun WTA. Pada dasarnya perbedaan tanda ini menandakan adanya perbedaan persepsi responden terhadap biaya. Namun, angka ini tetap valid mengingat perbedaan mendasar dari WTP dan WTA terletak pada persepsi yang digunakan masyarakat, dan umumnya nilai WTP akan menghasilkan estimasi yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai WTA (Brown dan Gregory, 1999).

Banyak penghitungan kesejahteraan yang berkaitan dengan lingkungan menggunakan survei yang berbasis WTP. Padahal penggunaan penghitungan tersebut dapat merendahkan nilai dari aset lingkungan yang ada jika dibandingkan dengan penggunaan penghitungan berbasis WTA. Pada survei berbasis WTP, khususnya yang digunakan untuk mengukur tingkat kerugian, terbukti hal tersebut menciptakan bias (Brown dan Gregory, 1999). Ahlheim

dan Buchholz (2000) tidak mempermasalahkan penggunaan metode survei berbasis apapun, hanya saja penggunaan survei berbasis WTP ataupun WTA idealnya dibedakan berdasarkan konteks tertentu. Penggunaan data survei berbasis WTP akan lebih tepat digunakan saat penelitian berfokus pada penghitungan besaran pengembangan kualitas lingkungan yang dibutuhkan, sementara data survei berbasis WTA lebih tepat digunakan saat penelitian berfokus pada penghitungan besaran kerugian yang dirasakan oleh masyarakat akibat penurunan kualitas lingkungan. Namun, pemilihan WTP atau WTA tidak akan memunculkan masalah dalam survei yang mengestimasi besaran *minimum irreducible cost* (MIC), mengingat angka WTP umumnya lebih kecil dibanding WTA sehingga sesuai dengan definisi MIC. Diskusi lanjut terkait dengan mengenai perbedaan nilai WTP dan WTA dapat dilihat di Lampiran G.

Tabel 10. Estimasi WTP per bulan per Wilayah Survei

Areas		WTP	Low Level	Upper Level
Jambi	Air	-1.520.486	-3.329.082	288.111
	modal sosial	325.804	-1.604.304	2.255.913
Kalimantan Timur	Air	590.594	-2.438.749	3.619.937
	modal sosial	169.913	-677.717	1.017.542
Kalimantan Barat	Air	-2.005.152	-10.337.487	6.327.182
	tanaman obat	-851.007	-4.777.061	3.075.046
	modal sosial	-590.702	-3.543.261	2.361.856

Sumber: Data primer, diolah.

Perlu diperhatikan bahwa dari Tabel 10, estimasi WTP air di daerah Kalimatan Timur menghasilkan angka positif. Hal ini dipengaruhi oleh tidak signifikannya faktor air secara statistik dalam choice model di daerah tersebut, sehingga tidak dapat diinterpretasikan secara statistik. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa di Jambi, responden bersedia membayar Rp1.520.485 per KK per bulan untuk mendapatkan kondisi air selayaknya jaman sebelum konflik. Sementara itu, responden Kalimantan Barat bersedia membayar Rp2.005.152 per KK per bulan untuk mendapatkan kondisi air seperti sebelum konflik.

Sementara itu, apabila kita melihat besaran WTP air dan modal sosial berdasarkan kepemilikan sawit, nilai WTP terbesar diberikan oleh responden yang mengikuti sistem inti-plasma serta pemilik kebun sawit yaitu sebesar Rp2.005.152 per KK per bulan untuk air dan Rp49.225 per bulan untuk modal sosial. Besaran angka ini mengindikasikan kerugian tahunan yang mereka alami dari penurunan kualitas air dan modal sosial. Mereka yang tidak memiliki maupun berpartisipasi dalam program inti-plasma justru memiliki WTP terkecil yaitu Rp1.043.392 per KK per bulan untuk air dan Rp23.186 per KK per bulan untuk modal sosial.

Tabel 11. Estimasi WTP per KK per Bulan per Kepemilikan Kebun Sawit

Kepemilikan Sawit	WTP Air*	WTP Modal sosial*
<i>Tidak Punya</i>	Rp1.043.392	Rp278.230
	Rp590.594	Rp169.913
	67	67
<i>Punya</i>	Rp1.743.037	Rp447.441
	Rp1.520.486	Rp325.805
	53	53
<i>Total</i>	Rp1.359.360	Rp354.648
	Rp1.520.486	Rp325.805
	120	120

Catatan: *) Uji ANOVA signifikan pada 1%

Sumber: Data primer, diolah.

Tabel 12. Estimasi WTP per KK per Bulan Menurut Gender

Gender	WTP Air	WTP Modal sosial
<i>Wanita</i>	Rp1.375.983	Rp361.184
<i>Pria</i>	Rp1.331.803	Rp348.517
<i>Average</i>	Rp1.355.560	Rp355.328

Sumber: Data primer, diolah.

Di lain sisi, faktor gender nampaknya tidak mempengaruhi besaran WTP responden untuk air dan modal sosial. Hasil T-test menunjukkan perbedaan yang ada secara statistik tidak signifikan baik untuk air maupun modal

sosial. Hal ini menarik untuk dicermati mengingat terdapat konsistensi antar kelompok gender dalam memandang dampak konflik terhadap air dan modal sosial. Tidak ada cukup bukti yang mendukung hipotesis bahwa antara responden perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan valuasi terhadap air dan modal sosial.

5.4. Penilaian Subjektif Kondisi Sosial

Bagian berikut mengulas mengenai penilaian subjektif kondisi sosial masyarakat sebelum dan sesudah konflik. Dalam survei responden diminta membandingkan kondisi saat ini dan pra-konflik dalam lima poin, yakni (1) biaya dan akses pendidikan, (2) kondisi kriminalitas, (3) kondisi kesehatan (4) kondisi lingkungan dan (5) kepastian masa depan. Kelima aspek tersebut teridentifikasi didasarkan pada hasil wawancara ZMET dan FGD.

5.4.1. Aspek Pendidikan dan Kesehatan

Penilaian akses dan biaya pendidikan serta kesehatan menggunakan skala 1-10, dimana semakin besar angka tersebut maka kondisi tersebut dianggap semakin baik relatif terhadap angka kecil. Tabel 12 menunjukkan responden dari ketiga wilayah survei secara rata-rata menyatakan bahwa ada peningkatan akses pendidikan, meskipun responden di Jambi tidak merasakan perubahan akses pendidikan sebelum dan sesudah konflik. Namun demikian responden di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur merasakan peningkatan akses pendidikan yang signifikan secara statistik. Terkait dengan biaya pendidikan, responden di ketiga wilayah konflik merasakan penurunan biaya pendidikan pada saat ini relatif dibandingkan sebelum konflik. Peningkatan akses dan membaiknya biaya pendidikan dirasakan paling besar oleh responden di wilayah Kalimantan Barat.

Secara umum uji-T menunjukkan akses kesehatan lebih baik daripada di masa sebelum konflik. Namun demikian secara statistik tidak ada perubahan biaya kesehatan. Uji beda rata-rata terkait akses dan biaya kesehatan

per tingkat pendidikan menunjukkan peningkatan akses kesehatan yang signifikan secara statistik pada tingkat 1% (lihat Tabel 13). Meski terjadi perbaikan dari sisi akses kesehatan secara statistik namun dari sisi biaya kesehatan tidak terjadi perbedaan yang signifikan secara statistik.

Hasil uji ANOVA menunjukkan terdapat perbedaan secara statistik di tingkat 5% mengenai rata-rata penilaian akses pendidikan maupun biaya pendidikan antar responden di ketiga daerah survei. Namun demikian, hasil analisis ANOVA tidak menunjukkan adanya perbedaan secara statistik antara penilaian akses pendidikan dan biaya pendidikan dari ketiga kategori pendidikan responden.

Dari hasil uji ANOVA, rata-rata dari ketiga wilayah berbeda secara statistik. Tercatat bahwa responden di Jambi tidak merasakan adanya perbaikan dari aspek akses kesehatan dan biaya kesehatan, bahkan ada peningkatan biaya kesehatan yang dirasakan oleh responden Jambi. Sementara itu, responden di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur merasakan ada peningkatan akses kesehatan pada saat ini dibanding sebelum konflik. Responden di Kalimantan Timur merasakan perbaikan dari sisi biaya kesehatan saat ini dibandingkan di masa pra konflik.

Tabel 13 menunjukkan hasil penilaian responden terhadap perbedaan akses dan biaya pendidikan didasarkan pada klasifikasi pendidikan responden. Secara umum responden relatif merasakan peningkatan akses dan biaya pendidikan saat ini dibandingkan di masa pra krisis meski hanya signifikan pada tingkat 10%. Responden di ketiga klasifikasi pendidikan menyatakan adanya peningkatan akses ke pendidikan pada tingkat 5%. Namun demikian terkait dengan biaya pendidikan, hanya responden yang tidak sekolah yang merasakan perbaikan biaya pendidikan yang signifikan di tingkat 5% untuk saat ini relatif dibandingkan sebelum konflik.

Tabel 13. Penilaian Responden Terhadap Pendidikan dan Kesehatan di Wilayah Survei

Wilayah	Akses Pendidikan		Biaya Pendidikan		Akses Kesehatan		Biaya Kesehatan	
	Saat Ini	Pra-Krisis	Saat Ini	Pra-Krisis	Saat Ini	Pra-Krisis	Saat Ini	Pra-Krisis
Jambi	4.72 ^{^^}	4.87 ^{^^}	3.32 ^{^^}	4.25 ^{^^}	4.65 [^]	4.64 [^]	2.92 ^{^^}	3.65 ^{^^}
	(1.48)	(2.11)	(1.50)	(2.55)	(1.25)	(1.80)	(1.43)	(2.52)
	N=75	N=75	N=75	N=75	N=74	N=74	N=75	N=75
Kalimantan Barat	7.02 ^{^^}	3.88 ^{^^}	6.69 ^{^^}	5.22 ^{^^}	7.20 ^{^^}	4.65 ^{^^}	5.70 [^]	5.09 [^]
	(2.07)	(2.09)	(2.34)	(2.12)	(1.86)	(2.11)	(2.34)	(2.01)
	N=66	N=66	N=65	N=65	N=66	N=66	N=66	N=66
Kalimantan Timur	5.96 ^{^^}	5.14 ^{^^}	5.82 ^{^^}	5.11 ^{^^}	5.69 ^{^^}	4.74 ^{^^}	5.45 [^]	5 [^]
	(1.59)	(1.17)	(1.49)	(1.23)	(1.20)	(1.26)	(1.35)	(1.45)
	N=72	N=72	N=72	N=72	N=68	N=69	N=69	N=69
Total	5.85 [^]	4.65 [^]	5.20 [^]	4.84 [^]	5.80 ^{^^}	4.67 ^{^^}	4.62 [^]	4.55 [^]
	(1.95)	(1.90)	(2.29)	(2.09)	(1.79)	(1.75)	(2.16)	(2.15)
		N=213	N=212	N=212	N=208	N=209	N=210	N=210

Note:

*: T-Test signifikan pada level 5%, **: T-Test signifikan pada level 1%

^: Test ANOVA signifikan pada level 5%, ^^: Test ANOVA signifikan pada level 1%

Sumber: Data primer, diolah.

Tabel 14 menunjukkan bahwa responden berpendidikan SMA/PT merasakan perbaikan akses kesehatan yang relatif lebih tinggi (signifikan pada tingkat 1%) dibandingkan kelompok responden lain (signifikan pada tingkat 5%). Namun demikian, di semua kelompok latar belakang pendidikan tidak merasakan adanya perbaikan dari sisi biaya kesehatan.

Tabel 14. Penilaian Responden Terhadap Pendidikan dan Kesehatan, Per Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat Pendidikan	Akses Pendidikan		Biaya Pendidikan		Akses Kesehatan		Biaya Kesehatan	
	Saat Ini	Pra-Krisis	Saat Ini	Pra-Krisis	Saat Ini	Pra-Krisis	Saat Ini	Pra-Krisis
Tidak Sekolah/TK	5.49***^	4.04***^	5.24***^	4.47***^	5.78**	4.19**	04.46	04.13
	(2.14)	(1.74)	(2.44)	(1.94)	(1.96)	(1.82)	(2.28)	(2.22)
	N=71	N=71	N=70	N=70	N=67	N=68	N=69	N=69
SD/SMP	5.87**	4.92**	5.15**	5.11**	5.95**	5*	0,21875	0,227
	(1.96)	(1.90)	(2.32)	(2.22)	(1.75)	(1.65)	(2.04)	(2.07)
	N=105	N=105	N=105	N=105	N=106	N=106	N=106	N=106
SMA/PT	6.49**	5.05**	5.27**	4.76**	5.37*	4.63*	04.54	04.04
	(1.30)	(1.97)	(1.95)	(1.89)	(1.54)	(1.70)	(2.28)	(2.20)
	N=37	N=37	N=37	N=37	N=35	N=35	N=35	N=35
Total	5.85*^	4.65*^	5.20*^	4.84*^	5.80**	4.67**	0,210	04.55
	(1.95)	(1.90)	(2.29)	(2.09)	(1.79)	(1.75)	(2.16)	(2.15)
	N=213	N=213	N=213	N=213	N=208	N=209	N=210	N=210

Note:

*: T-Test signifikan pada level 5%, **: T-Test signifikan pada level 1%

^: Test ANOVA signifikan pada level 5%, ^^: Test ANOVA signifikan pada level 1%

Sumber: Data primer, diolah.

Eksplorasi lebih lanjut dilakukan untuk membandingkan persepsi responden terhadap akses dan biaya kesehatan berdasarkan gender. Tidak didapatkan bukti yang mendukung hipotesis bahwa terdapat perbedaan persepsi terkait dengan akses dan biaya kesehatan sebelum dan sesudah konflik antar gender (lihat Tabel C.6. di Lampiran C).

Tabel 15. Penilaian Responden dalam Aspek Kesehatan, per Kepemilikan Sawit

Kepemilikan Sawit	Akses Saat Ini	Akses Pra-Krisis	Biaya Saat ini*	Biaya Pra-Krisis
<i>Punya</i>	5,886*	4,704*	4,89	4,67
<i>sd</i>	1,65	1,65	2,15	1,99
<i>n</i>	114	115	116	116
<i>Tidak Punya</i>	5,691*	4,638*	4,30	4,39
<i>sd</i>	1,95	1,86	2,13	2,35
<i>n</i>	94	94	94	94
<i>Total</i>	5,80	4,67	0,46	4,55
<i>sd</i>	1,79	1,75	2,16	2,15
<i>n</i>	208	209	210	210

*T-test signifikan pada 5%

Sumber: Data primer, diolah

Persepsi responden terhadap akses dan biaya kesehatan dan kaitannya dengan kepemilikan kebun sawit juga dilakukan. Tabel 15 menunjukkan terdapat perbedaan persepsi antar kelompok yang memiliki dan tidak memiliki kebun sawit terkait dengan akses dan biaya kesehatan.

5.4.2. Aspek Kriminalitas

Penilaian responden dalam kriminalitas menggunakan skala 1-7, dimana semakin besar angka tersebut maka kondisi tersebut dianggap relatif semakin buruk terhadap angka yang lebih kecil. Angka 1-3 menandakan bahwa ada perbaikan kondisi kriminalitas dibandingkan dengan kondisi di masa lalu, sementara angka 5-7 mengungkapkan adanya situasi kriminalitas yang semakin buruk dibandingkan masa sebelum konflik. Angka 4 menunjukkan bahwa responden tidak merasakan adanya perbedaan situasi saat ini maupun di masa lalu.

Tabel 16. Penilaian Responden dalam Kondisi Kriminalitas, per Wilayah Survei*

Area	Mean	Median	sd	N
<i>Jambi</i>	5.38	5	1.17	77
<i>Kalimantan Barat</i>	3.76	4	1.60	66
<i>Kalimantan Timur</i>	4.96	6	1.47	72
<i>Total</i>	4.74	5	1.56	215

*: Uji ANOVA signifikan pada 5%

Sumber: Data primer, diolah.

Tabel 16 menunjukkan dari ketiga wilayah survei, responden di wilayah Jambi dan Kalimantan Timur secara umum merasakan ada pemburukan kondisi kriminalitas di wilayahnya setelah adanya konflik. Namun demikian responden di wilayah Kalimantan Barat justru merasakan adanya penurunan tingkat kriminalitas, meskipun tidak ekstrim. Nilai median dan mean untuk Kalimantan Timur berbeda cukup signifikan relatif dibandingkan dengan nilai serupa di daerah konflik lain. Ketika nilai median dan mean berbeda, maka idealnya nilai median yang digunakan sebagai basis analisis. Nilai median penilaian responden di Kalimantan Timur tentang tingkat kejahatan menunjukkan bahwa kondisi saat ini lebih buruk dibandingkan dengan kondisi sebelum konflik. Hasil ANOVA signifikan pada tingkat 5% dan menunjukkan adanya variasi dampak konflik di ketiga wilayah sampel.

Tabel 17. Penilaian Responden dalam Kondisi Kriminalitas, per Tingkat Pendidikan Responden

Kategori Pendidikan	mean	Median	sd	N
<i>Tidak Sekolah/TK</i>	4.83	5	1.60	72
<i>SD/SMP</i>	4.57	5	1.64	106
<i>SMA/PT</i>	5.05	5	1.18	37
<i>Total</i>	4.74	5	1.56	215

Sumber: Data primer, diolah.

Analisis ANOVA berdasarkan pada tingkat pendidikan yang ditunjukkan pada Tabel 17 tidak menunjukkan perbedaan signifikan dari ketiga kelompok responden mengenai persepsi mereka terhadap tingkat kriminalitas. Responden di kelompok pendidikan tidak sekolah dan SMA/PT cenderung menyatakan kondisi kriminalitas saat ini memburuk dibandingkan masa lalu.

Tabel 18 menunjukkan besaran nilai kerugian akibat kriminalitas selama periode konflik. Sebagian besar dari nilai kehilangan diakibatkan oleh barang-barang lainnya (selain ternak, pohon/kayu, buah/madu, rotan, perhiasan, elektronik). Nilai kehilangan terbesar selanjutnya diikuti oleh nilai kerugian akibat pencurian kendaraan bermotor.

Tabel 18. Total Kerugian Langsung Akibat Kriminalitas/Kehilangan Harta Benda, selama Periode Konflik

Area	Jambi	Kalimantan Barat	Kalimantan Timur	Total
<i>Ternak</i>	Rp536,364	Rp321,000	Rp120,000	Rp430,278
<i>Pohon/Kayu</i>	Rp1,957,000	Rp50,000	.	Rp1,783,636
<i>Buah/Madu</i>	Rp-	Rp680,000	Rp10,000	Rp294,286
<i>Rotan</i>	Rp-	Rp50,000	.	Rp25,000
<i>Kendaraan Bermotor</i>	Rp2,500,000	Rp21,000,000	Rp2,000,000	Rp4,625,000
<i>Perhiasan</i>	Rp5,000,000	.	.	Rp5,000,000
<i>Elektronik</i>	Rp917,500	.	Rp2,000,000	Rp1,134,000
<i>Lainnya</i>	Rp3,900,769	Rp14,000,000	Rp1,000,000	Rp7,969,000
<i>Total</i>	Rp14,811,633	Rp36,101,000	Rp5,130,000	Rp21,261,200

Sumber: Data primer, diolah.

5.4.3. Kondisi Lingkungan Hidup

Penilaian kualitas lingkungan hidup dan risiko kecelakaan menggunakan skala 1-10, dimana semakin besar angka tersebut maka kondisi tersebut dianggap semakin baik relatif terhadap angka kecil. Disini kita melihat bahwa secara umum, responden di ketiga lokasi menyatakan terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup di masa kini dibandingkan

dengan kondisi pra-konflik. Begitu pula dengan risiko kecelakaan yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan (seperti halnya lubang tambang), meningkat dibandingkan masa lalu. Responden di wilayah Jambi merasakan tingkat penurunan kualitas hidup yang tertinggi di antara ketiga daerah survei. Sementara itu, apabila dilihat dari tingkat pendidikan responden, tidak ada perbedaan signifikan antara responden di ketiga kelompok tingkat pendidikan.

Tabel 19. Penilaian Responden dalam Kondisi Lingkungan, per Wilayah Survei

Area	Kualitas Lingkungan Hidup		Risiko Kecelakaan Lubang Tambang	
	Saat Ini	Pra-Krisis	Saat ini	Pra-Krisis
<i>Jambi</i>	4.37 [^]	8.35 [^]	0 [^]	0 [^]
<i>sd</i>	1.28	1.05	0	0
<i>n</i>	79	79	4	4
<i>Kalimantan Barat</i>	6 [^]	6.18 [^]	5.34 [^]	0 [^]
<i>sd</i>	2.28	2.48	2.19	0
<i>n</i>	65	65	61	0
<i>Kalimantan Timur</i>	5.24 [^]	5.34 [^]	5.13 [^]	5.62 [^]
<i>sd</i>	1.52	1.29	1.69	1.29
<i>n</i>	71	71	71	71
<i>Total</i>	5.15 ^{***^}	6.70 ^{***^}	5.07 [^]	5.35 [^]
<i>sd</i>	1.83	2.12	2.10	2.08
<i>n</i>	215	215	136	136

** : T-test signifikan pada level 5%

[^] : Uji ANOVA signifikan pada level 1%

Sumber: Data primer, diolah.

Konflik terkait dengan sengketa lahan memiliki dampak langsung memiliki dampak pada kualitas lingkungan. Hasil wawancara ZMET menunjukkan bahwa konflik terkait tanah dan operasionalisasi perusahaan sawit berdampak luas pada kualitas lingkungan. Tabel 19 menunjukkan bahwa secara umum responden merasakan penurunan kualitas lingkungan hidup saat ini dibandingkan dengan kondisi pra-krisis. Perubahan paling drastis

dirasakan oleh responden di Jambi, dibandingkan dengan responden di dua daerah konflik lainnya. Sementara itu dampak keberadaan bekas lubang tambang terjadi di Kalimantan Timur, dan tidak dijumpai di Jambi maupun Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat ada responden yang bekerja di pertambangan, tetapi lokasinya berada di wilayah kabupaten lain, sehingga tidak berpengaruh pada wilayah studi kasus. Persepsi masyarakat terhadap risiko kecelakaan akibat lubang tambang secara statistik tidak signifikan sebelum dan sesudah konflik.

Tabel 20. Penilaian Responden dalam Kondisi Lingkungan, per Tingkat Pendidikan Responden

Kategori Pendidikan	Kualitas Lingkungan Hidup		Risiko Kecelakaan Lubang Tambang	
	Saat Ini	Pra-Krisis	Saat ini	Pra-Krisis
<i>Tidak Sekolah/TK</i>	4.69**	6.85**	5.25**	5.33**^
<i>Sd</i>	1.91	2.28	1.82	1.72
<i>N</i>	71	71	48	48
<i>SD/SMP</i>	5.53**	6.56**	4.91**	5.328358**^
<i>Sd</i>	1.80	2.16	2.24	2.414527
<i>N</i>	107	107	67	67
<i>SMA/PT</i>	4.92**	6.84**	5.19**	5.47619**^
<i>Sd</i>	1.55	1.66	2.29	1.74983
<i>N</i>	37	37	21	21
<i>Total</i>	5.15**	6.70**	5.07**	5.352941**
<i>Sd</i>	1.83	2.12	2.10	2.081771
<i>N</i>	215	215	136	136

Note: **) signifikan pada tingkat 5%

Sumber: Data primer, diolah.

Tabel 20 menunjukkan persepsi responden terhadap kondisi lingkungan berdasarkan tingkat pendidikannya. Kualitas lingkungan diakui memburuk oleh responden di semua tingkat pendidikan. Hal serupa juga terjadi pada risiko kecelakaan lubang tambang yang dirasakan memburuk untuk semua latar belakang pendidikan.

Tabel 21. Penilaian Responden dalam Kondisi Lingkungan, per Kepemilikan Perkebunan Sawit

Kepemilikan Sawit	Kualitas Lingkungan Saat ini	Kualitas Lingkungan Pra-krisis**	Risiko lubang tambang saat ini	Risiko pra-krisis
<i>Punya</i>	5,085**	6,169**	5,23	5,37
<i>sd</i>	1,88	2,04	2,03	1,81
<i>n</i>	118	118	92	92
<i>Tidak Punya</i>	5,227**	7,351**	4,75	5,32
<i>sd</i>	1,77	2,05	2,23	2,59
<i>n</i>	97	97	44	44
<i>Total</i>	5,15**	6,70**	5,07	5,35
<i>sd</i>	1,83	0,21	0,21	2,08
<i>n</i>	215	215	136	136

** T-Test signifikan pada 1%

Sumber: Data primer, diolah.

Berdasarkan pada status kepemilikan perkebunan sawit dan atau keikutsertaan masyarakat sebagai anggota inti-plasma, terdapat kecenderungan baik pemilik/peserta maupun non-pemilik/non-peserta dalam merasakan penurunan kualitas lingkungan yang signifikan. Hasil ini menarik untuk dicermati karena hasil ini menunjukkan bahwa penurunan kualitas lingkungan dirasakan oleh semua pihak, baik pemilik kebun/peserta inti-plasma maupun rumah tangga non pemilik kebun/non peserta inti-plasma.

Penurunan kualitas lingkungan juga dirasakan oleh semua gender. Tidak ada bukti yang mendukung hipotesis bahwa responden laki-laki dan perempuan memiliki persepsi yang berbeda terkait dengan penurunan kualitas lingkungan.

Tabel 22. Penilaian Responden dalam Kondisi Lingkungan, per Gender

Gender	Kualitas Lingkungan Hidup		Risiko Kecelakaan Lubang Tambang	
Wanita	Saat Ini	Pra-Krisis	Saat ini	Pra-Krisis
	5.451*	6.735*	5.097	5.3889
	1.793	2.126	2.001	2.113
	113	113	72	72
Pria	4.866*	6.588*	5.047	5.313
	1.846	2.140	2.221	2.062
	97	97	64	64
Total	5.181**	6.667**	5.074	5.353
	1.837	2.128	2.100	2.082
	210	210	136	136

Note: ** T-Test signifikan pada 1% *: 5%
Sumber: Data primer, diolah.

5.5. Total Biaya Konflik Terhadap Rumah Tangga

Didasarkan pada seluruh informasi yang diperoleh terkait dengan konflik, beberapa elemen digunakan untuk mengestimasi biaya ekonomi konflik. Setidaknya, ada dua komponen biaya yang dapat dijumlahkan secara langsung, mengingat kedua komponen ini adalah biaya rutin yang dikeluarkan keluarga secara berkala. Kedua komponen biaya tersebut adalah:

- Nilai konsumsi barang primer yang dikonsumsi di masa lalu tanpa harus membeli oleh setiap KK per tahun.
- Nilai WTP air sebagai kompensasi atas turunnya kualitas air bersih. Nilai WTP air disajikan untuk setiap rumah tangga selama sebulan.

Tabel 23 menunjukkan total proporsi konsumsi primer yang kini harus dibeli per KK per bulan. Rata-rata proporsi konsumsi primer yang kini harus dibeli ditambah valuasi WTP bulanan adalah Rp3,48 juta per bulan atau 55,26% dari total konsumsi primer per KK per bulan. Beban terbesar akibat konflik ditanggung paling besar oleh rumah tangga di Kalimantan Barat yaitu

Rp5,35 juta (61,41%) per KK per bulan dan terendah adalah rumah tangga di Kalimantan Timur Rp2,38 juta (41,69%) per KK per bulan. Intensitas biaya akibat konflik terhadap tingkat konsumsi rumah tangga ini tidaklah ringan.

Pertanyaan yang mengemuka kemudian adalah, bagaimana rumah tangga harus menutup *gap*/senjang pendapatan yang muncul tersebut. Jika diasumsikan satu hari kerja seseorang digaji Rp100 ribu/hari/orang, maka penurunan pendapatan akibat konflik menyebabkan tambahan hari kerja sebesar: a) 26,5 hari kerja orang/bulan untuk responden di Jambi; b) 53,5 hari kerja orang/bulan untuk responden di Kalimantan Barat; dan c) 23,8 hari kerja orang/bulan untuk responden di Kalimantan Timur. Rata-rata beban tambahan hari kerja di ketiga wilayah adalah 34,8 hari/kerja/orang. Ini berarti jika rumah tangga tidak ingin mengalami penurunan pendapatan maka keluarga harus menanggung beban kerja tambahan rata-rata seperti disebutkan diatas yaitu 34,8 hari kerja/bulan.

Tabel 23. Total Biaya Konflik per Wilayah (per KK, per bulan)

Area	Total Konsumsi (Primer-Sekunder)/KK/Bulan + Valuasi Ekonomi	Total Konsumsi Primer /KK/ Bulan + Valuasi Ekonomi	Total Konsumsi Primer (yang kini beli) /KK/Bulan + Valuasi Ekonomi	Proporsi
	A	B	C	C/B
<i>Jambi</i>	Rp4.947.318	Rp4.723.349	Rp2.655.055	56,21%
<i>N</i>	40	40	40	
<i>Kalimantan Barat</i>	Rp9.426.215	Rp8.709.471	Rp5.348.750	61,41%
<i>N</i>	40	40	40	
<i>Kalimantan Timur</i>	Rp5.992.872	Rp5.718.950	Rp2.384.048	41,69%
<i>N</i>	40	40	40	
<i>Total</i>	Rp6.691.882	Rp6.296.525	Rp3.479.556	55,26%
	120	120	120	

Sumber: Data primer, diolah.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga harus menggunakan sumber dayanya seoptimal mungkin untuk mengatasi penurunan pendapatan akibat krisis. Jika diasumsikan orang bekerja 40 jam seminggu (lima hari kerja/minggu atau 22 hari kerja/bulan), maka rumah tangga responden di Jambi memerlukan tambahan sekitar 120,5% full time equivalent (FTE). Beban kerja ini dapat didistribusikan diantara anggota keluarga tentunya, baik kepada suami-istri maupun anak-anak. Pada kondisi seperti ini, responden di Kalimantan Barat menanggung beban paling besar yaitu 2,43 FTE, dan responden di Kalimantan Timur menanggung 1,08 FTE.

Hasil wawancara ZMET tidak menunjukkan adanya indikasi terjadi putus sekolah yang diakibatkan karena konflik. Namun demikian, jika terjadi kasus putus sekolah akibat konflik, maka biaya ekonomi konflik dapat ditambah satu elemen lagi yaitu nilai potensi pendapatan yang hilang sebagai akibat dari putus sekolah, atau nilai potensi pendapatan seandainya tingkat pendidikan yang diinginkan tercapai (lihat Tabel 6).

Perlu dicatat bahwa pada umumnya responden di ketiga lokasi konflik adalah petani, dan mereka tidak mudah untuk beralih profesi selain sebagai petani. Di masyarakat Dayak Benuaq misalnya, anggota masyarakat yang berprofesi selain petani pada umumnya adalah para pendatang. Masyarakat Dayak Benuaq cenderung tetap menjadi petani, karena itulah profesi yang mereka ketahui dan lakukan turun-temurun. Permasalahan menjadi kompleks ketika tanpa adanya beban akibat konflik, pada dasarnya profesi petani mengalami penurunan nilai tukar perdagangan (*term of trade*). Beban konflik menciptakan tambahan beban rumah tangga mereka selain penurunan nilai tukar perdagangan tersebut.

Salah satu temuan menarik dari kajian ini adalah bahwa biaya ekonomi akibat konflik lebih tinggi ditanggung oleh rumah tangga responden yang memiliki perkebunan sawit daripada yang tidak memiliki. Pola kepemilikan kebun sawit ada tiga jenis yaitu memiliki kebun sendiri, mengikuti program inti-plasma atau gabungan keduanya.

Tabel 24. Total Biaya Konflik per Kepemilikan Kebun Sawit (per KK, per bulan)

Kepemilikan Sawit	Total Konsumsi (Primer-Sekunder)/KK/Bulan + Valuasi Ekonomi	Total Konsumsi Primer /KK/Bulan + Valuasi Ekonomi	Total Konsumsi Primer (yang kini beli) /KK/Bulan + Valuasi Ekonomi	Proporsi
	A	B	C	C/B
<i>Tidak Punya</i>	Rp5.792.924	Rp5.501.293	Rp2.691.237	48,92%
<i>N</i>	67	67	67	
<i>Punya</i>	Rp7.729.854	Rp7.214.730	Rp4.301.420	59,62%
<i>N</i>	53	53	53	
<i>Total</i>	Rp6.691.882	Rp6.296.525	Rp3.479.556	55,26%
<i>N</i>	120	120	120	

Sumber: Data primer, diolah.

Tabel 24 menunjukkan rumah tangga yang tidak memiliki kebun kelapa sawit ternyata menanggung biaya ekonomi akibat konflik lebih rendah daripada rumah tangga pemilik kebun kelapa sawit. Proporsi total beban biaya ekonomi akibat konflik bagi rumah tangga non-pemilik kebun kelapa sawit adalah sebesar 48,92%, namun angka ini meningkat menjadi sebesar 59,62% bagi keluarga pemilik kebun kelapa sawit. Salah satu sumber perbedaan tersebut terletak pada valuasi ekonomi terhadap air, yang mana rumah tangga pemilik kebun sawit cenderung memiliki WTP terhadap air lebih tinggi daripada rumah tangga yang tidak memiliki kebun kelapa sawit.

Hasil pada Tabel 24 menarik untuk digabungkan dengan hasil pada Tabel 11 dan Tabel 23. Tidak ada responden di Kalimantan Timur yang memiliki kebun kelapa sawit, mengingat selama ini mereka selalu terlibat konflik akibat upaya mereka mempertahankan perkebunan adat. Tabel 11 menunjukkan WTP terhadap air oleh pemilik kebun kelapa sawit lebih tinggi daripada WTP non-pemilik kelapa sawit. Tidak mengherankan kemudian bahwa rumah tangga responden di Kalimantan Timur menanggung biaya ekonomi akibat konflik lebih rendah dibandingkan dua daerah sampel yang lain.

Tabel 25. Total Biaya Konflik dan Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga (per KK, per bulan)

Pendidikan Kepala KK	Total Konsumsi (Primer-Sekunder)/KK/Bulan + Valuasi Ekonomi	Total Konsumsi Primer /KK/Bulan + Valuasi Ekonomi	Total Konsumsi Primer (yang kini beli) /KK/Bulan + Valuasi Ekonomi	Proporsi
	A	B	C	C/B
<i>Tidak Sekolah/TK</i>	Rp5.149.687	Rp4.976.362	Rp2.816.140	56,59%
<i>N</i>	32	32	32	
<i>SD/SMP</i>	Rp6.503.854	Rp6.035.302	Rp2.804.340	46,47%
<i>N</i>	60	60	60	
<i>SMA/PT</i>	Rp10.115.716	Rp9.522.650	Rp7.761.957	81,51%
<i>N</i>	28	28	28	
<i>Total</i>	Rp6.691.882	Rp6.296.525	Rp3.479.556	55,26%
<i>N</i>	120	120	120	

Sumber: Data primer, diolah.

Jika total biaya ekonomi akibat konflik dikaitkan dengan tingkat pendidikan kepala keluarga, maka rumah tangga dengan pendidikan kepala rumah tangga SMA/PT menanggung beban biaya tertinggi yaitu sebesar 81,51% dari nilai total konsumsi. Proporsi ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga dengan tingkat pendidikan kepala keluarga SD/SMP (46,47%) ataupun yang tidak sekolah/TK (56,59%).

5.6. Kondisi Sosial Sebagai Elemen Biaya Tambahan Akibat Konflik

Hasil analisis kondisi sosial menunjukkan bahwa akses kesehatan dan pendidikan dirasakan meningkat oleh responden, meskipun tidak ada perbaikan dari sisi harga kesehatan dan pendidikan. Kedua aspek tersebut meningkat akibat *affirmative action* dari pemerintah pusat sejak 2004 yang berkomitmen mengalokasikan 20% APBN untuk pendidikan dan 5% dana APBN untuk kesehatan. Terlepas dari itu, persepsi masyarakat terhadap

kondisi sosial cenderung memburuk di wilayah sampel.

Dalam jangka menengah dan panjang, ada pertanyaan mendasar yang perlu dipikirkan yaitu kemampuan rumah tangga dalam menabung dan menjaga agar anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan adalah sarana untuk melakukan mobilitas vertikal, dan hasil kajian menunjukkan bahwa meski akses ke pendidikan membaik, namun biaya pendidikan tidaklah lebih murah. Besarnya beban rumah tangga akibat konflik menurunkan potensi bagi rumah tangga untuk menabung. Konsekuensi logis yang dihadapi adalah kemampuan rumah tangga untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka mencapai pendidikan tinggi cenderung terbatas. Jika anak-anak tersebut terpaksa tidak melanjutkan sekolah selain di tingkat wajib belajar akibat tekanan ekonomi akibat konflik, maka hasil analisis di Tabel 6 dapat digunakan untuk menambahkan elemen biaya ekonomi akibat konflik.

Di bidang kesehatan, perubahan pola konsumsi rumah tangga, ternyata menciptakan banyak munculnya penyakit-penyakit 'baru' yang dulu tidak dikenal masyarakat misalnya kanker, stroke dan sakit jantung. Hasil wawancara ZMET menunjukkan kemunculan kasus-kasus serangan stroke di masyarakat Dayak Benuaq, hal yang tidak pernah terjadi saat sebelum konflik terjadi.

Konflik lahan dan sumber daya alam akibat keberadaan perusahaan kelapa sawit, pada dasarnya berpotensi menciptakan kemiskinan bagi masyarakat di sekitar perkebunan kelapa sawit. Perlu dicatat bahwa kajian ini mengestimasi dampak sosial akibat konflik dengan pendekatan *minimum irreducible costs*. Artinya hasil estimasi yang diperoleh adalah nilai minimum biaya yang ditanggung rumah tangga, tidak bisa kurang, namun pasti nilai sesungguhnya lebih tinggi daripada hasil estimasi.

Perlu menjadi catatan bahwa estimasi biaya ekonomi akibat konflik di kajian ini diestimasi secara komparatif statis. Fakta menunjukkan bahwa biaya konflik bersifat dinamis (bisa tereskalasi), bersifat antar waktu (*intertemporal*) dan terjadi dalam waktu yang tidak pendek. Biaya ekonomi akibat konflik terhadap rumah tangga idealnya dihitung sebagai akumulasi biaya antar

waktu (*intertemporal cost*) terhadap rumah tangga. Saat ini masyarakat di ketiga daerah masih menghadapi konflik, dan itu berarti beban biaya pada dasarnya terus terakumulasi kepada mereka. Kalaupun di masa depan konflik ini berhenti, namun dampak konflik terhadap rumah tangga tetap terjadi mengingat ada jeda waktu antara selesainya konflik dengan hilangnya dampak konflik kepada rumah tangga.

5.7. Kemampuan Mengalihkan Biaya Ekonomi Konflik

Didasarkan pada hasil wawancara ZMET, konflik tanah dan sumber daya alam akibat kehadiran perkebunan kelapa sawit, melibatkan tiga pihak yaitu perusahaan kelapa sawit, pemerintah daerah dan rumah tangga. Kompleksitas analisis biaya ekonomi akibat konflik tidak sebatas pada kemampuan menganalisis berapa besarnya biaya ekonomi yang ditanggung oleh pihak yang terlibat di dalam konflik. Analisis tersebut perlu dilanjutkan dengan analisis kemampuan para pihak dalam mengalihkan biaya ekonomi akibat konflik kepada pihak lain.

Diantara ketiga pihak yang terlibat di dalam konflik, maka pihak pemerintah daerah merupakan pihak dengan kemampuan mengalihkan biaya ekonomi akibat konflik tertinggi diantara ketiga pihak yang terlibat. Pemerintah daerah, bagaimanapun juga, memiliki kewenangan dalam hal perijinan. Kekuasaan inilah yang menyebabkan pemerintah memiliki posisi tawar (*bargaining position*) lebih tinggi dibandingkan perusahaan maupun masyarakat.

Pihak kedua yang memiliki kemampuan dalam mengalihkan biaya ekonomi akibat konflik adalah perusahaan kelapa sawit. Setiap biaya ekonomi yang timbul akibat konflik pada dasarnya berpotensi untuk dialihkan seluruh atau sebagian kepada dua pihak yaitu a) konsumen pembeli Crude Palm Oil (CPO); dan b) anggota program inti-plasma. Jika perusahaan menginternalisasi semua biaya ekonomi akibat konflik yang ditanggungnya, maka konsekuensinya adalah terjadi peningkatan harga jual CPO. Seberapa

besar perusahaan mampu mengalihkan biaya ekonomi akibat konflik terhadap konsumen CPO bergantung pada elastisitas permintaan CPO dan tingkat kompetisi di pasar CPO. Potensi kedua pengalihan biaya ekonomi akibat konflik oleh perusahaan dapat dialihkan seluruh atau sebagian kepada anggota program inti-plasma. Kemampuan mengalihkan biaya ekonomi akibat konflik kepada anggota inti-plasma bergantung pada bagaimana posisi tawar perusahaan terhadap anggota inti-plasma. Semakin tinggi posisi tawar perusahaan terhadap anggota inti-plasma, maka semakin tinggi kemampuan perusahaan membebankan biaya ekonomi akibat konflik kepada para anggota inti-plasma.

Pihak terakhir yang terlibat di dalam konflik adalah rumah tangga. Rumah tangga memiliki kemampuan terkecil mengalihkan beban biaya ekonomi akibat konflik kepada pihak lain. Konsekuensi logis dari fakta ini adalah bahwa rumah tangga adalah satu-satunya pihak yang terpaksa harus menanggung biaya ekonomi akibat konflik yang dideritanya tanpa dapat mengalihkan kepada pihak manapun. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa semua biaya ekonomi akibat konflik yang diestimasi di atas, pada dasarnya harus ditanggung sepenuhnya oleh rumah tangga tanpa mereka mampu mengalihkannya kepada pihak manapun.

6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa dampak konflik pertanahan, dampak yang lebih besar kepada rumah tangga relatif karena kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit dibandingkan kehadiran perusahaan HPH maupun perusahaan tambang. Intensitas konflik antara masyarakat dengan perusahaan HPH relatif lebih rendah daripada intensitas konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat. Kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit menciptakan konflik yang sangat intens dengan masyarakat. Hilangnya sebagian besar fungsi hutan akibat perluasan operasi perusahaan perkebunan kelapa sawit berdampak pada perubahan drastis jenis komoditas konsumsi di tingkat rumah tangga.

Dampak konflik pertanahan dan kehadiran perusahaan kelapa sawit terhadap rumah tangga berawal dari turunnya area hutan dan kepemilikan lahan masyarakat. Hutan bagi masyarakat menyediakan sebagian besar komoditas konsumsi yang dapat diakses tanpa dipengaruhi oleh faktor latar belakang ekonomi yang dimiliki rumah tangga. Keluarga miskin maupun kaya memiliki akses yang sama terhadap sumber daya hutan di era pra konflik.

Sebagian besar barang konsumsi dapat diakses secara bebas (tidak perlu membayar) dan hanya diperlukan kemauan dari pihak rumah tangga untuk mengakses sumber daya hutan tersebut. Berbagai binatang buruan, berbagai jenis ikan, buah-buahan, sayur-mayur, rotan, kayu ulin, madu dan air bersih dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat di masa pra konflik. Namun semua itu berubah drastis ketika perkebunan sawit meluas, hutan semakin menyempit dan fungsi hutan menurun drastis. Sebagian besar barang kebutuhan harus dibeli dan penurunan kesejahteraan terjadi karena dua hal: a) penurunan jenis hewan dan tumbuhan yang dapat dikonsumsi; dan b) penurunan kuantitas konsumsi karena semua harus dibeli.

Hasil kajian menunjukkan rata-rata, sebesar 36.79% dari nilai komoditas konsumsi masyarakat saat ini bisa didapatkan tanpa harus membeli di masa lalu. Dampak tersebut tertinggi terjadi di wilayah konflik di Kalimantan Barat yakni sebesar 41.65%, diikuti oleh Kalimantan Timur sebesar 35.82% dan Jambi sebesar 29.58%. Kontraksi konsumsi ini tidak dapat dikatakan kecil, mengingat ketika krisis moneter di tahun 1998, kontraksi ekonomi yang terjadi hanyalah 15% (penurunan GDP/kapita). Terdapat korelasi positif antara tingkat pendidikan dan proporsi konsumsi primer yang dulu tidak perlu dibeli (Kini Beli). Responden dengan tingkat pendidikan tertinggi justru memiliki rasio konsumsi primer yang tidak perlu dibeli tertinggi, yakni sebesar 80.41%.

Hasil valuasi ekonomi dengan menggunakan *choice model* menunjukkan bahwa penilaian responden signifikan untuk air namun tidak signifikan untuk tanaman obat-obatan dan modal sosial. Sampel di ketiga lokasi bersedia membayar sebesar Rp1.361.971 per bulan agar bisa merasakan ketersediaan air seperti kondisi sebelum adanya konflik, dibandingkan kondisi saat ini yaitu penurunan kualitas dan ketersediaan. Di Jambi dan di Kalimantan Barat, responden bersedia membayar air berturut-turut Rp18.245.820 dan Rp24.061.824 per tahun (Rp1.520.485 dan Rp2.005.152 per bulan). Demikian untuk air bagi responden di Kalimantan Timur melalui pendekatan WTA, responden ingin menerima uang sebesar Rp590.954 per bulan (Rp7.091.448 per tahun) sebagai kompensasi atas hilangnya hak mereka atas air. Baik menggunakan pendekatan WTP maupun WTA menunjukkan besarnya nilai

kerugian masyarakat akibat hilangnya akses terhadap air sebagai akibat konflik.

Responden yang memiliki kebun sawit dan atau mengikuti program inti-plasma memiliki tingkat WTP terhadap air dan modal sosial yang lebih tinggi daripada responden yang tidak memiliki kebun sawit. Temuan ini mengindikasikan kerugian tahunan yang dialami oleh responden yang memiliki kebun sawit/peserta inti-plasma dari penurunan kualitas air dan modal sosial.

Tiap anggota keluarga responden di tiga lokasi survei harus menanggung total biaya sebesar Rp41.754.672 per tahun sebagai dampak dari konflik. Responden di Kalimantan Barat menanggung biaya rata-rata terbesar Rp64.185.000 per rumah tangga per tahunnya, sementara Kalimantan Timur sebesar Rp28.608.576 dan Jambi sebesar Rp31.860.660 per tahun per keluarga. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa justru rumah tangga yang memiliki kebun sawit atau mengikuti program inti-plasma, menanggung biaya konflik lebih besar dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak memiliki kebun sawit dan atau mengikuti program inti-plasma. Total biaya yang harus ditanggung kelompok pemilik sawit ini adalah sebesar Rp51.617.040 per tahun per keluarga, dibandingkan kelompok yang tidak memiliki sawit yang sebesar Rp32.294.844 per tahun per keluarga.

6.2. Rekomendasi

Sebagaimana telah ditunjukkan dalam bagian-bagian terdahulu, keberadaan kegiatan perkebunan yang disertai dengan konflik pertanahan dan sumber daya alam, terlepas dari salah-benarnya klaim masing-masing pihak telah menimbulkan kerugian yang tidak kecil di pihak masyarakat.

Bahkan konflik yang berlangsung dan tidak selesai dalam waktu yang relatif lama telah memerangkap masyarakat ke dalam proses pemiskinan yang makin lama kian dalam, yang ditandai oleh melemahnya kemampuan masyarakat untuk menabung ataupun melakukan investasi dan menyempitnya peluang untuk terjadinya mobilitas sosial karena terbatasnya peluang untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik.

Situasi menjadi kian rumit dan berbeda dengan pihak perusahaan yang bisa saja membebaskan biaya tambahan akibat konflik ke dalam biaya operasinya sementara masyarakat hanya bisa pasrah terhadap masalah yang dihadapinya.

Menyikapi temuan-temuan pokok tersebut, maka kajian ini merekomendasikan hal-hal berikut :

1. Izin usaha perkebunan dan pemberian hak guna usaha haruslah diberikan kepada calon lahan perkebunan yang benar-benar clear and clean. Penyerahan penyelesaian hak-hak pihak ketiga lain yang diserahkan kepada perusahaan sebagaimana yang ada dalam kebijakan saat ini perlu direvisi.
2. Mekanisme inti-plasma perlu ditinjau ulang agar sistem ini mampu menjadi katub pengaman bagi penduduk yang secara terpaksa harus beralih mata pencahariannya.
3. Pemerintah bersama pelaku usaha perkebunan perlu memikirkan dan mengembangkan skema asuransi yang dapat menjamin keberlanjutan pendidikan anak-anak usia sekolah korban konflik tanah dan sumber daya alam pada kasus-kasus perusahaan perkebunan yang memiliki konflik tanah dan sumber daya alam.

4. Kajian lebih lanjut diperlukan khususnya yang dapat mengkaji secara komprehensif dampak usaha sawit secara terhadap perusahaan, rumah tangga, dan keuangan negara. Termasuk juga kajian yang mengkaji dampak konflik usaha sawit terhadap perempuan dan anak, keterkaitan sawit dengan kemiskinan dan peluang akses pendidikan yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Abadie, A. dan Gardeazabal, J. (2010). Implementing matching estimators for average treatment effects in Stata. *American Economic Review* 93 (1).
- Ahlheim, M. dan Buchholz, W. (2000). WTP or WTA-Is that the question. *Zeitschrift für Umweltpolitik & Umweltrecht*, 23(2), pp.253-271.
- Agrawal, A., dan Gibson, C. C., (1999). Enchantment and Disenchantment: The Role of Community in Natural Resource Conservation. *World Development*, 27(4), 629–649. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(98\)00161-2](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(98)00161-2)
- Arunatilake dkk. (2001). The Economic Cost of the War in Sri Lanka. *World Development* 29(9), 1483-1500.
- Barron, P., Kaiser, K. dan Pradhan, M.P. (2004). *Local conflict in Indonesia: Measuring incidence and identifying patterns*. World Bank:
<https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/1813-9450-3384>
- Bernstein, H. (2010). *Class dynamics of agrarian change*. Fernwood Publishing, Halifax.
- Brand, S. dan Price, R. (2000). *The Economic and Social Cost of Crime. Research Study*. United Kingdom Home Office, UK.

- Brint, S. (2001). *Gemeinschaft Revisited: A Critique and Reconstruction of the Community Concept*. *Sociological Theory*, 19(1), 1–23.
<https://doi.org/10.1111/0735-2751.00125>
- Brown, T.C. dan Gregory, R. (1999). Why the WTA-WTP disparity matters. *Ecological economics*, 28(3), pp.323-335.
- Cloke, K. (2002). *Mediating dangerously: The frontiers of conflict resolution*. John Wiley & Sons.
- Crist Michell, *The Structure of International Conflict*. London: Macmillan, 1981.
 Quote from Simon Fisher, dkk., 2001. *Mengelola Konflik. Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council, Indonesia.
- Daemeter Consltant, CRU-IBCSO, 2017. *The Cost of Conflict in Oil Palm in Indonesia*
- Davis, S. J., Murphy, K. M. dan Topel, R. H. (2009). War in Iraq versus Containment. in *Guns and Butter*, Gregory D. Hess, *CESifo Seminar Series*. The MIT Press, Cambridge. https://www.researchgate.net/publication/5186890_War_in_Iraq_versus_Containment
- Davis, R., dan Franks, D. M. (2014). Costs of company-community conflict in the extractive sector. *Corporate Social Responsibility Initiative Report*, 66, 1-56.
- Dhiaulhaq, A., De Bruyn, T. dan Gritten, D., (2015). The use and effectiveness of mediation in forest and land conflict transformation in Southeast Asia: Case studies from Cambodia, Indonesia and Thailand. *Environmental Science & Policy*, 45, pp.132-145.
- Dhiaulhaq, A., dkk. (2014). Transforming conflict in plantations through mediation: Lessons and experiences from Sumatera, Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 41, pp.22-30.
- Feather, N. T. (1995). Values, valences, and choice: The influences of values on the perceived attractiveness and choice of alternatives. *Journal of personality and social psychology*, 68(6), 1135.
- Feintrenie, L., Chong, W.K. dan Levang, P., (2010). Why do farmers prefer oil palm? Lessons learnt from Bungo district, Indonesia. *Small-scale forestry*, 9(3), pp.379-396.
- Gardeazabal, J. (2010). Methods for measuring aggregate costs of conflict. *The oxford handbook of the economics of peace and conflict*, 227.

- Grutters, J. P., dkk. (2008). Willingness to accept versus willingness to pay in a discrete choice experiment. *Value in Health*, 11(7), 1110-1119.
- Gummesson, E., (2004). Qualitative research in marketing: Road-map for a wilderness of complexity and unpredictability. *European Journal of Marketing* 39 (3-4), 309-327.
- Horowitz, J.K. dan McConnell, K.E., 2003. Willingness to accept, willingness to pay and the income effect. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 51(4), pp.537-545.
- Hess, G. D. (2012). The economic welfare cost of conflict: An empirical assessment. *The Oxford Handbook of the Economics of Peace and Conflict*, 412.
- Idemudia, U. (2007). Community perceptions and expectations: reinventing the wheels of corporate social responsibility practices in the Nigerian oil industry. *Business and Society Review*, 112(3), 369-405.
- Inkuiri Nasional KOMNAS HAM (2016). *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayah- nya di Kawasan Hutan*. KOMNAS HAM, Indonesia.
- Keegan, J. (2011). *A history of warfare*. Alfred A. Knopf, Random House. Inc, New York.
- Koentjaraningrat, (1979). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Aksara Baru, Jakarta.
- Koentjaraningrat, ed., (1981). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. PT. Gramedia, Jakarta.
- Koentjaraningrat, (1985). *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. PT. Dian Rakyat, Jakarta.
- Kuriyama, K. dan Takeuchi, K. (2001). The Disparity between WTP and WTA with or without Money. https://www.researchgate.net/profile/Koichi_Kuriyama/publication/255589504_The_Disparity_between_WTP_and_WTA_with_or_without_Money/links/54a13eed0cf256bf8bae6e31.
- Lambini, K. (2010). Forest conflicts' influence on local people's livelihoods: A case of conflicts between timber companies and farmers in the Mankranso District of Ghana. *International Master of Science in Rural Development Ghent University (Belgium), Agrocampus Rennes (France), Humboldt University (Germany)*. University of Córdoba, Spanyol.
- Larson, A.M., dkk. (2013). Land tenure and REDD+: The good, the bad and the ugly. *Global Environmental Change*, 23(3), pp.678-689.

- Loewenstein, G., dan Lerner, J. S. (2003). The role of affect in decision making. *Handbook of affective science*, 619 (642), 3.
- Malik, I. (2016). Asumsi Dasar, Sumber, dan Resolusi Konflik. *Handout of Modul 4, Pelatihan Sekolah Perdamaian Gus Dur*. Jakarta: the Wahid Foundation.
- Malik, I., dkk. (2003). *Menyeimbangkan Kekuatan. Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumberdaya Alam*. Jakarta: Yayasan Kemala.
- M.A., 2008. Willingness to accept versus willingness to pay in a discrete choice experiment. *Value in Health*, 11(7), pp.1110-1119.
- Pasha, G. dan Sirait, T. M. (2011). *Analisa Gaya Bersengketa. Panduan Ringkas untuk Membantu Memilih Bentuk Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumberdaya Alam*. Bogor: The Samdhana Institute.
- Polinsky, A. M. (1989). *An introduction to law and economics*. Aspen Publishers.
- Posner, E. A. (2009). *Law and social norms*. Harvard university press, Cambridge.
- Ravlin, E. C. dan Meglino, B. M. (1987). Effect of values on perception and decision making: A study of alternative work values measures. *Journal of Applied psychology*, 72(4), 666-673.
- Rist, L., Feintrenie, L. dan Levang, P. (2010). The livelihood impacts of oil palm: smallholders in Indonesia. *Biodiversity and conservation*, 19(4), pp.1009-1024.
- Shahrabani, S., Benzion, U. dan Shavit, T., (2008). WTP and WTA in competitive and non-competitive environments. *Judgment and Decision Making*, 3(2), p.153.
- Siaran Pers Bersama KOMNAS HAM, KPA dan WALHI, 9 September 2014, Penyelesaian Konflik Agraria Wajib Jadi Prioritas Jokowi-JK .
- Siaran Pers KPA dalam Kompas 5 Januari 2017, Konflik Agraria Dipicu Ekspansi Perkebunan, Properti dan Infrastruktur.
- Simon Fisher, et.al., 2001. *Mengelola Konflik. Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council, Indonesia.
- Sirait, M.T., (2009). *Indigenous Peoples and Oil Palm Plantation Expansion in West Kalimantan, Indonesia*. Cordaid, The Hague, Belanda.
- Smith, V. K., van Houtven, G. dan Pattanayak, S. K. (2002). Benefit transfer via preference calibration: Prudential algebra for policy. *Land Economics*, 78(1), 132-152.

- Singarimbun, M. dan Effendi, S. (eds.), 1984. *Metode Penelitian Survei*. Cetakan ke 4. Penerbit LP3ES, Jakarta.
- Yasmi, Y. dkk. (2012). The struggle over Asia's forests: An overview of forest conflict and potential implications for REDD+. *International Forestry Review*, 14(1), pp.99-109.
- Zhao, J. dan Kling, C.L., (2001). A new explanation for the WTP/WTB disparity. *Economics Letters*, 73(3), pp.293-300.
- Zhao, J. dan Kling, C.L., (2004). Willingness to pay, compensating variation, and the cost of commitment. *Economic Inquiry*, 42(3), pp.503-517.

Lampiran

Lampiran A

10 Langkah dalam Hirarki Rantai Makna pada Wawancara ZMET

Metode *Zaltman's Metaphor Elicitation Technique* (ZMET) diperkenalkan pertama kali oleh Zaltman sebagai instrumen yang digunakan untuk menangkap persepsi individu dan peta mental terhadap suatu isu yang diberikan, baik itu persepsi dalam tingkat pikiran sadar (conscious) maupun bawah sadar (sub-conscious). Pengembangan metode ini adalah bagian dari kritik terhadap metode survei, yang cenderung kurang mampu mengeksplorasi persepsi dan struktur berpikir informan sebagai akibat dari keterbatasan penggunaan pendekatan verbal (Gummesson, 2004).

Metode ZMET berusaha untuk mengeksplorasi ikatan personal seseorang terhadap suatu topik tertentu yang dapat digambarkan dengan suatu model mental. Model mental dapat memberikan informasi yang kaya terkait dengan perilaku, emosi, perasaan, nilai pribadi, pengalaman, visi, dan pengalaman

indra seperti sentuh, rasa, dan cium dari subyek terhadap suatu topik. Di dalam ZMET, model mental ini dibangun dalam suatu struktur tangga tertentu (*laddering*). *Laddering* adalah suatu hirarki rantai makna (*means end chain theory*) yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga tingkatan dasar makna:

1. Atribut: hal yang paling cepat dikenali oleh partisipan. Contoh: "Saya merasa dirugikan oleh perusahaan tersebut karena saya tidak diberi pekerjaan yang dijanjikan."
2. Konsekuensi: alasan di belakang jawaban dari atribut. Contoh: "Orang yang diberikan pekerjaan yang awalnya dijanjikan pada saya itu ternyata berasal dari luar desa ini, jadi masyarakat kami malah terpinggirkan."
3. Nilai dasar: terkait nilai dasar manusia. Contoh: "Rasanya sangat tidak adil ketika masyarakat desa ini, yang tanahnya digunakan, justru tidak dilibatkan dalam kegiatan perusahaan."

Dengan menanyakan lebih dalam jawaban awal dari subyek, pewawancara dapat mengungkap nilai emosi dan nilai dasar manusia dari subyek (Feather, 1995). Menurut means end chain theory, hampir seluruh aspek manusia memiliki keterkaitan dengan beberapa landasan nilai kemanusiaan tertentu, antara lain: a) keamanan; b) kesetaraan; c) keadilan; d) kejujuran; e) iri dan dengki; f) cinta; g) keserakahan; g) kedermawanan; h) perhatian; i) kebebasan; dan j) kepercayaan. ZMET memiliki keunggulan dibandingkan metode survei dalam hal menggali persepsi seseorang secara lebih mendalam sehingga diharapkan dapat mengidentifikasi tidak hanya persepsi yang sebenarnya namun juga hal yang menjadi dasar persepsi (*underlying rationality*) seseorang. Secara garis besar prosedur pelaksanaan ZMET dapat dibagi dalam 5 tahap:

Pertama: Memberikan penjelasan kepada informan terkait konflik yang akan dibahas dan batasan-batasan isu.

Kedua: Meminta informan untuk mencari gambar yang dipandang mewakili persepsi mereka terhadap konflik tersebut maupun elemen-elemen yang terlibat (anggota masyarakat lain, perusahaan, mediator).

Penjelasan pada prosedur tahap pertama dan kedua umumnya dilakukan beberapa hari sebelum pelaksanaan wawancara mendalam pada tahapan ketiga.

Ketiga: Melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap setiap informan. Proses wawancara mendalam (*in-depth interview*) dalam ZMET secara umum dapat dilakukan dalam tahapan, sebagai berikut:

1. *Storytelling*: informan diminta untuk menjabarkan isi dari tiap gambar.
2. *Missed images*: informan diminta untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin tidak dapat dijelaskan dengan gambar yang ada.
3. *Sorting task*: informan diminta untuk menyeleksi gambar yang ada dalam susunan yang menurut dia ada artinya, seperti mengurutkan gambar berdasarkan urutan kronologi.
4. *Construct elicitation*: melalui wawancara, menggali bagaimana informan mengkaitkan antara persepsi yang diwakili suatu gambar dengan persepsi yang diwakili oleh gambar yang lain.
5. *Most representative picture*: informan diminta untuk mengurutkan gambar dari yang paling mewakili konflik tersebut.
6. *Opposite images*: informan diminta mendeskripsikan gambar yang paling tidak mewakili konflik tersebut.
7. *Sensory images*: informan diminta mendeskripsikan konsep apa saja yang sudah tereksplorasi dan konsep apa saja yang belum tereksplorasi selama ini.
8. *The mental map*: informan diminta untuk membuat peta hubungan sebab-akibat antara konsep yang telah teridentifikasi.
9. *The summary image*: informan dengan bantuan pewawancara diminta untuk merangkum seluruh gambar yang ada dalam satu gambar atau dalam satu rangkuman gambar (penggabungan dari beberapa gambar).
10. *The vignette*: peneliti mengkonstruksi sebuah peta mental (*mental map*) dari informan tersebut terkait konflik tersebut dari sudut pandang informan.

Keempat: Membangun *mental map* dari tiap informan terkait konflik.

Kelima: Membangun sintesa *mental map* dari seluruh informan terkait konflik.

Kita dapat memahami struktur pemikiran informan berdasarkan informasi dari peta mental yang dihasilkan. Hubungan struktural antar variabel dalam peta mental juga dapat memperkaya pembahasan hasil analisis kuantitatif nantinya. Namun sebagaimana pendekatan kualitatif lainnya, jumlah sampel yang diperlukan umumnya tidak besar. Fokus ZMET bukan pada mengidentifikasi generalisasi dari populasi ataupun pengambilan kesimpulan secara statistik. Dalam studi ini khususnya, ZMET bertujuan untuk menggali informasi terkait konflik, khususnya mengenai persepsi masyarakat terhadap konflik, penyebab konflik, dampak dan pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik itu serta memetakan jenis-jenis biaya yang muncul bagi masyarakat.

Lampiran B

Metoda *Choice Model*

Berikut adalah tahapan penyusunan model yang kita lakukan:

1. Kita mengakomodasi kondisi yang diterangkan oleh responden dari hasil interview ZMET. Secara umum, responden membandingkan dua kondisi dalam dua periode waktu, yakni saat ini dan pra-konflik. Responden mendeskripsikan kondisi pra-konflik sebagai kondisi dimana mereka merasakan sumber air dalam kondisi yang baik, tanaman obat mudah dijumpai dan masyarakat cenderung rukun. Sementara itu, kondisi saat ini dideskripsikan sebagai kondisi yang mana kualitas air cenderung buruk, tanaman obat susah dicari dan kondisi sosial masyarakat cenderung tidak harmonis. Pertimbangan untuk memilih ketiga faktor ini dalam *choice model* adalah karena tiga biaya ini sulit dikuantifikasi secara moneter.

	Kualitas Air	Tanaman Obat	Kondisi Sosial
Pra-Konflik	(1) Baik	(1) Mudah dicari	(1) Harmonis
Saat ini	(0) Buruk	(0) Sulit dicari	(0) Tidak rukun

2. Kini kita memiliki 3 buah atribut dalam *choice model* yang akan kita susun. Ketiga faktor ini kita akan asumsikan sebagai variabel acak dalam *choice model*. Kita akan memiliki beberapa pertanyaan berupa pilihan yang mengandung ketiga faktor tersebut secara acak dari total kombinasi produk, dan kita meminta individu untuk memilih salah satu dari pilihan tersebut, misalkan seperti di bawah ini.

	Kualitas Air	Tanaman Obat	Kondisi Sosial	Harga
Pilihan A1	1	0	1	20
Pilihan B1	0	0	1	10
Pilihan A2	0	1	0	30
...
...
Pilihan B5	1	1	0	5

Di tabel ini, atribut direpresentasikan dalam bentuk nilai biner. Nilai level 0 merepresentasikan kondisi 'atribut' tersebut di masa kini dan 1 adalah kondisi 'atribut' tersebut di masa lampau. Berdasarkan informasi yang diterima melalui wawancara ZMET, seluruh individu menyatakan bahwa kondisi air di masa lalu adalah baik, tanaman obat mudah dicari dan kondisi sosial harmonis. Lain kata, nilai biner ini juga bersifat ordinal (1 lebih baik daripada 0) dan tidak memerlukan ukuran konkrit sebagaimana nilai produk.

Pilihan Ai/Bi tidak merepresentasikan 'produk' berupa kondisi masa lalu maupun masa depan sepenuhnya, melainkan suatu keadaan *state of the world* yang memiliki nilai acak dari masing-masing atribut. Hal ini merupakan salah satu pendekatan baru yang digunakan peneliti dalam formulasi choice model, untuk mengakomodasi keterbatasan responden. Terdapat kekhawatiran apabila responden diminta membandingkan kondisi lama dengan baru secara langsung tanpa adanya proses randomisasi nilai di masing-masing atribut, akan memicu adanya *dominant choice* yang membuat estimasi nilai WTP menjadi mustahil.

Individu memilih pilihan j (A/B) di setiap pertanyaannya dengan mempertimbangkan kondisi kualitas air, tanaman obat dan kondisi sosial yang tercantum secara acak di pilihan tersebut. Perhatikan bahwa terdapat salah satu kolom tambahan berupa harga untuk membantu pengukuran *willingness to pay*. Nilai ini didapatkan dari informasi responden ZMET yang merupakan orang yang dianggap paling memahami nilai dari ketiga atribut tersebut.

3. Fungsi utilitas individu dari setiap faktor tersebut adalah:

$$U_{nj} = V_{nj} + \varepsilon_{nj}$$

Dimana n adalah individu, untuk setiap alternatif j (substitusikan dengan keempat [air, tanaman obat, kondisi sosial dan harga] atribut di atas), sementara ε_{nj} adalah faktor acak. V_{nj} merupakan fungsi utilitas dari keempat atribut tersebut.

Misalkan individu dihadapkan pada pilihan A dan B. Probabilitas individu dalam memilih pilihan A dijabarkan sebagai:

$$\begin{aligned}
 P_{nA} &= Pr(U_{nA} > U_{nB}), A \neq B \\
 &= Pr(V_{nA} + \varepsilon_{nA} > V_{nB} + \varepsilon_{nB}), A \neq B \\
 &= Pr(V_{nA} - V_{nB} < \varepsilon_{nA} - \varepsilon_{nB}), A \neq B
 \end{aligned}$$

Dengan mengasumsikan bahwa *error term* ε_{nj} tidak berkorelasi dengan V_{nj} maka persamaan di atas dapat diubah menjadi:

$$Pr(V_{nA} - V_{nB} < 0), A \neq B$$

Besaran pengaruh atribut x (dalam vektor x') dalam mempengaruhi probabilitas seseorang dalam memilih A dapat diukur dengan mengestimasi nilai β dalam persamaan *mixlogit* berikut:

$$P_{nA} = \int \exp(x'_{nA}\beta) / (1 + \exp(x'_{nB}\beta)) f(\beta | \theta) d\beta$$

Dimana β adalah koefisien dalam model *mixlogit*. Nilai β dapat diestimasi dengan menggunakan piranti lunak statistik seperti STATA. Terdapat beberapa alternatif penggunaan model yang lebih umum digunakan dalam estimasi CM, seperti misalnya *asclogit* atau *clogit*, namun peneliti mempertimbangkan untuk tidak mengadopsi model tersebut dikarenakan beberapa faktor.

Pertama, penggunaan model *asclogit* atau *clogit* memiliki keterbatasan krusial karena menggunakan asumsi IIA (*Independence of Irrelevant Alternatives*). Asumsi ini berpendapat bahwa masing-masing atribut akan independen satu sama lain, dan tambahan satu atribut tidak akan berpengaruh pada preferensi seseorang. Secara formal, jika seseorang memiliki pilihan $\{A, B\}$ dan preferensi $A > B$, maka adanya faktor $X \{A, B, X\}$ tidak akan mengubah preferensi $A > B$. Namun, sayangnya asumsi ini terbukti tidak valid secara deskriptif dari sudut pandang ekonomika keperilakukaan ataupun eksperimen (lihat Ray, 1973; McFadden et al, 1977; McLean, 1995; Tversky dan Kahneman, 1992). Penggunaan *mixlogit* menghilangkan asumsi IIA yang tidak realistis ini dan memperbolehkan variansi koefisien antar responden, terlihat pada adanya fungsi densitas pada koefisien beta yang ditunjukkan pada $f(\beta | \theta)$.

Kedua, adanya variansi koefisien dalam $f(\beta | \theta)$ membuat model ini tidak memerlukan asumsi tambahan yang tidak realistis seperti

homogenitas preferensi individu. Dalam hal ini, konstanta ASC tidak lagi diperlukan untuk menjelaskan bias responden terhadap alternatif tertentu (Hole dan Kolstrad, 2012). Preferensi responden yang berbeda cukup realistis untuk diasumsikan dalam penelitian ini. Meskipun jumlah sampel yang digunakan relatif sedikit, namun mengingat adanya perbedaan faksi dalam masyarakat sesuai temuan ZMET, ada baiknya kita mengakomodasi temuan ini.

4. Setelah mendapatkan nilai β untuk keempat faktor (air, tanaman obat, kondisi sosial, harga), kita dapat mengestimasi nilai *willingness to pay* sampel dengan cara membandingkan nilai β faktor tersebut dengan β dari faktor harga. Atau, secara matematis, nilai WTP untuk faktor k adalah:

$$E(WTP_k) = (E(\beta^k)) / \beta^{\text{price}}$$

Nilai dari WTP dapat diinterpretasikan sebagai berapa besaran kenaikan/penurunan harga dari suatu pilihan yang diperlukan akibat perubahan dari nilai suatu atribut, untuk mempertahankan nilai utilitas tertentu.

Terdapat beberapa keunggulan penerapan *contingent choice model* dibandingkan dengan metode lain seperti *contingent valuation model* (CVM). Pertama, model ini tidak melancarkan pertanyaan langsung mengenai berapa WTP seseorang seperti pada CVM. Ada beberapa kritik yang menjelaskan kelemahan metode CVM, dimana kritik utama muncul terhadap bagaimana pertanyaan langsung tidak memunculkan aspek *revealed preference* dari seseorang (Arrow et al, 1993). Selain itu, Mogas (2006) menjelaskan bahwa metode CVM memberikan estimasi yang tidak konsisten mengenai preferensi seseorang melalui pertanyaan WTP. Pendekatan *choice model* berusaha mengeliminasi hal ini dengan memunculkan atribut harga sebagai faktor eksternal dalam pilihan tersebut. Meskipun angka harga dimunculkan dari pendapat subyektif individu, dalam *choice modelling* atribut harga juga diposisikan sebagai variabel random dan eksternal, sehingga efeknya tetap dapat diamati dalam mempengaruhi pilihan responden.

Sementara itu, keterbatasan dari penggunaan *choice model* dalam riset ini adalah peningkatan kompleksitas kuisioner apabila ada peningkatan jumlah variabel yang ingin dinilai *willingness to pay*-nya. Desain pertanyaan *choice model* idealnya dilakukan dengan konfigurasi ortogonal, yakni sebanyak $\prod_k n_k$ pilihan. Untuk setiap atribut k dengan nilai sebanyak n_k , jumlah konfigurasi ideal adalah banyaknya nilai yang mungkin dari atribut k dikalikan untuk seluruh atribut. Mudah-mudahan, andaikan kita memiliki 4 atribut dengan 2 nilai di setiap atributnya, maka jumlah kombinasi yang ideal adalah $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$ kombinasi produk. Jumlah ini akan bertambah seiring dengan semakin banyaknya faktor yang akan diobservasi. Mengingat tingkat pendidikan responden pada umumnya masih rendah, penambahan atribut akan meningkatkan kompleksitas kuisioner dan berisiko tidak dapat dicerna oleh responden seluruhnya.

Lampiran C

Hasil Survei

Statistik Deskriptif.

Paparan berikut adalah mengenai karakteristik sampel dalam survei.

Tabel C.1: Distribusi Jenis Kelamin Sampel

Jenis Kelamin	Jambi	Kalbar	Kaltim	Total
Perempuan	40	37	37	114
% Total	35.09	32.46	32.46	100
% di Wilayah	54.05	56.06	51.39	53.77
Laki-Laki	34	29	35	98
% Total	34.69	29.59	35.71	100
% di Wilayah	45.95	43.94	48.61	46.23
Total	74	66	72	212
% Total	34.91	31.13	33.96	100
% di Wilayah	100	100	100	100

Tabel C.2: Distribusi Pendidikan Sampel

Pendidikan	Jambi	Kalbar	Kaltim	Total
Tidak Pernah Sekolah	22	22	26	70
	31.43	31.43	37.14	100
	30.14	33.33	36.11	33.18
Taman Kanak-Kanak	0	2	0	2
	0	100	0	100
	0	3.03	0	0.95
SD/MI	25	28	26	79
	31.65	35.44	32.91	100
	34.25	42.42	36.11	37.44

SMP/Sederajat	16	7	6	29
	55.17	24.14	20.69	100
	21.92	10.61	8.33	13.74
SMA/Sederajat	10	3	9	22
	45.45	13.64	40.91	100
	13.7	4.55	12.5	10.43
Perguruan Tinggi	0	4	5	9
	0	44.44	55.56	100
	0	6.06	6.94	4.27
Total	73	66	72	211
	34.6	31.28	34.12	100
	100	100	100	100

Tabel C.3: Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga per KK

Area	Mean	Std. Dev.	Freq.
Jambi	4.5324675	1.428879	77
Kalbar	3.5909091	1.3356332	66
Kaltim	3.9848485	1.8186421	66
Total	4.062201	1.5783868	209

Tabel C.4: Identifikasi Korban Konflik berdasarkan Gender

Gender	Tidak Langsung	Langsung	Total
Wanita	37	61	98
	37,76%	62,24%	100%
Pria	29	57	86
	33,72%	66,28%	100%
Total	66	118	184
	35,87%	64,13%	100%

Tabel C. 5: Identifikasi Korban Konflik berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Tidak Langsung	Langsung	Total
Tidak Sekolah/TK	35	29	64
	54,69%	45,31%	100,00%
SD/SMP	26	68	94
	27,66%	72,34%	100,00%
SMA/PT	7	24	31
	22,58%	77,42%	100,00%
Total	68	121	189
	35,98%	64,02%	100,00%

Tabel C. 6: Penilaian Responden dalam Aspek Kesehatan, per Gender

Gender	Akses Kesehatan		Biaya Kesehatan	
	Saat Ini	Pra-Krisis	Saat ini	Pra-Krisis
Wanita	5,87	4,96	4,96	5,06
sd	1,84	1,53	2,07	1,82
n	109	110	111	111
Pria	5,77	4,40	4,36	4,10
sd	1,76	1,92	2,18	2,34
n	94	94	94	94
Total	5,82	4,71	4,69	4,62
	1,80	1,74	2,14	2,12
	203	204	205	205

Lampiran D

Disparitas WTP dan WTA

Berbagai studi menunjukkan bahwa individu cenderung memiliki disparitas dalam menyatakan WTP dan WTA terhadap suatu barang (Knetsch, 1989, Horowitz dan McConell, 2000, Grutters dkk., 2008, Kuriyama, 2001, Shahrabani dkk., 2008, dan Zhao dan Kling, 2001). Horowitz dan McConell (2000) melakukan meta-analisis menggunakan 201 data rasio WTA/WTP pada 45 penelitian yang berbeda. Keduanya menemukan adanya penyimpangan pada besaran rasio tersebut terhadap penjelasan teori preferensi neoklasik. Horowitz dan McConell (2000) menyatakan adanya disparitas tersebut dapat terjadi karena adanya kelemahan dari metode survei yang dilakukan, misal desain pertanyaan terkait WTP mampu mengukur preferensi seseorang namun desain pertanyaan terkait WTAny tidak, selain itu adanya disparitas dapat juga terjadi karena memang seseorang tidak memiliki preferensi yang sejalan dengan teori neoklasik. Penelitian Grutters dkk. (2008) juga menunjukkan adanya disparitas antara WTP dengan WTA bahkan dalam konteks pilihan yang bersifat diskrit. Grutters dkk. (2008) menyatakan bahwa disparitas yang terjadi disebabkan karena adanya efek pendapatan yang akhirnya memperbesar disparitas antara WTP dan WTA seseorang.

Zhao dan Kling (2001, 2004) menemukan disparitas WTP dan WTA pada berbagai kondisi yang dihadapi seseorang, yaitu saat terdapat ketidakpastian akan nilai barang yang diperjualbelikan, saat terdapat perbedaan tingkat kesabaran antar orang, dan saat seseorang dapat belajar dari keputusan yang ia ambil sebelumnya. Menurut Zhao dan Kling, dalam berbagai kondisi tersebut biaya komitmen lah yang berperan penting dalam menyebabkan terjadinya disparitas WTP dan WTA seseorang. Serupa dengan Zhao dan Kling, Shahrabani dkk. (2008) melakukan pengujian disparitas WTP dan WTA dalam dua kondisi, namun berdasarkan tingkat kompetisi dan risiko yang masing-masing diwakili oleh dua jenis lelang dan dua jenis lotere (normal dan ekstrim).

Shahrabani dkk. (2008) menemukan bahwa WTP seseorang terhadap barang dan juga lotere normal lebih tinggi dalam kondisi kompetitif dibandingkan non kompetitif, sedangkan pada lotere ekstrim tidak terdapat perbedaan besaran WTP di dua kondisi tersebut. Terkait WTA, hanya WTA untuk lotere normal saja yang terbukti lebih rendah pada kondisi kompetitif dibandingkan non kompetitif. Dari temuan tersebut Shahrabani menyimpulkan bahwa WTP, WTA, dan disparitas WTP dengan WTA dipengaruhi oleh tingkat kompetisi dan juga tingkat risiko yang dihadapi oleh seseorang.

Kuriyama (2001) bahkan menemukan disparitas antara WTP dan WTA dalam konteks non moneter. Kuriyama mengganti uang dengan pengadaan barang publik. Hasil penelitian Kuriyama menunjukkan bahwa disparitas antara WTP dan WTA non moneter sangat mirip dengan disparitas yang terjadi pada versi moneter. Akan tetapi, perbedaan yang terjadi antara WTP dengan WTA non moneter tidak sebesar yang terjadi di WTP dan WTA moneter. Pada penelitiannya disparitas yang terjadi lebih disebabkan karena adanya efek substitusi dibandingkan efek pendapatan.

Conflict Resolution Unit adalah jasa layanan yang berkomitmen untuk mendukung upaya mediasi konflik lahan dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia.

Kontak kami

Conflict Resolution Unit (CRU)
Indonesia Business Council
for Sustainable Development (IBCSd)

📍 Gedung Menara Duta, Lt. 7 Wing B
JL. HR. Rasuna Said Kav. B-9
Jakarta 12910, Indonesia

🌐 conflictresolutionunit.id
✉ cru@ibcsd.or.id